



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi serta perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya; dan
- d. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017 meliputi kebijakan-kebijakan akuntansi dan penjelasan pos yang terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai yaitu:

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan disusunnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting selama satu periode pelaporan untuk

memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna laporan keuangan adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi dan berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami pembaca secara luas,



tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas tertentu. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBK dengan memuat penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi mengenai Pelaksanaan APBK tahun 2017 yang meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Kebijakan makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target;
- c. Kinerja keuangan daerah;
- d. Kebijakan akuntansi;
- e. Penjelasan pos-pos laporan keuangan; dan
- f. Penjelasan atas informasi non keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;



22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib pajak;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
27. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Lhokseumawe;
28. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
29. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
30. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017;

1.3 Informasi Umum Tentang Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara dan terletak di pesisir timur Pulau Sumatra. Posisi Kota Lhokseumawe berada dalam jalur Banda Aceh dan Medan, menjadikan kota ini sangat strategis sebagai jalur distribusi dan perdagangan di Provinsi Aceh. Pada saat awal terbentuk pada tahun 2001,



Kota Lhokseumawe terdiri atas tiga kecamatan. Sedangkan saat ini Kota Lhokseumawe terdiri atas empat kecamatan dan 68 gampong. Hal ini terjadi karena terdapat pemekaran kecamatan. Hasil pemekaran adalah Kecamatan Muara Satu yang merupakan pecahan dari Kecamatan Muara Dua.

Kota Lhokseumawe merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +24 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 04°54' Lintang Utara dan 05°18' Lintang Selatan, serta 96°20' dan 97°21' bujur Timur. Luas wilayah Kota Lhokseumawe, adalah berupa daratan seluas 181,06 km². Per 31 Desember 2017, wilayah administrasi Kota Lhokseumawe terdiri dari empat wilayah kecamatan, dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut:

- Blang Mangat : 56,12 Km²
- Muara Dua : 57,80 Km²
- Muara Satu : 55,90 Km²
- Banda Sakti : 11,24 Km²

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Lhokseumawe berada pada Pulau Sumatera yang menjadi bagian dari Kepulauan Indonesia. Rata-rata suhu udara minimum tahun 2017 22°C dan rata-rata suhu udara maksimum 34°C. Rata-rata kelembaban udara tahun 2017 berkisar antara 81% sampai dengan 87% . Rata-rata tekanan udara tahun 2017 berkisar antara 1.009mb sampai dengan 1011mb. Rata-rata curah hujan tahun 2017 sekitar 117 mm.

Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 195.186 jiwa, jumlah penduduk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

- Blang Mangat : 26.870 jiwa
- Muara Dua : 53.766 jiwa
- Muara Satu : 33.363 jiwa
- Banda Sakti : 81.187 jiwa

Secara organisasi, pada tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe terdiri dari tiga fraksi, yaitu fraksi Partai Aceh, Partai Demokrat dan Partai Koalisi dengan total anggota sebanyak 25 orang. Fraksi Partai Aceh memiliki anggota sebanyak 12 orang, dengan 11 orang laki-laki dan seorang perempuan. Fraksi Partai



Demokrat memiliki anggota sebanyak lima orang, dengan empat orang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan untuk Fraksi Partai Koalisi beranggotakan delapan orang yang seluruhnya laki-laki.

Dalam menjalankan fungsinya, DPRK Lhokseumawe dibentuk empat komisi dan satu Koordinator/Pimpinan DPRK Lhokseumawe yang masing-masing beranggotakan enam orang untuk komisi A, lima orang untuk komisi B, lima orang untuk komisi C, empat orang untuk komisi D, tiga orang untuk Koordinator/Pimpinan DPRK Lhokseumawe.

Pemerintah Kota Lhokseumawe menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe mencakup urusan:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum;
- d. Perencanaan pembangunan;
- e. Perhubungan;
- f. Lingkungan hidup;
- g. Kependudukan dan catatan sipil;
- h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- j. Sosial;
- k. Ketenagakerjaan;
- l. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- m. Penanaman modal;
- n. Kebudayaan;
- o. Kepemudaan dan olah raga;
- p. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- q. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi;
- r. Keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- s. Ketahanan pangan;
- t. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- u. Kearsipan;



- v. Komunikasi dan informatika; dan
- w. Perpustakaan.

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kota Lhokseumawe juga melaksanakan urusan yang mencakup:

- a. Pertanian;
- b. Pariwisata;
- c. Kelautan dan perikanan;
- d. Perdagangan;
- e. Industri;

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 dibentuk berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan :
 - a. Setariat Kota Lhokseumawe
 - b. Sekretariat DPRK Lhokseumawe
 - c. Inspektorat Kota Lhokseumawe
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe
 - e. Dinas Sosial



3. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar:
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - b. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
 - c. Dinas Lingkungan Hidup
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
 - f. Dinas Perhubungan
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - h. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 - i. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
 - j. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 - k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4. Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan :
 - a. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
 - b. Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama
 - c. Sekretaris Majelis Adat Aceh
 - d. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
 - e. Sekretariat Baitul Mal
5. Perangkat Daerah Lainnya :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe (s.d per akhir tahun 2017 belum terbentuk)
 - c. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Lhokseumawe (s.d per akhir tahun 2017 masih bergabung ke Sekretariat Kota Lhokseumawe pada Bagian Organisasi)
6. Kecamatan :
 - a. Kecamatan Banda Sakti
 - b. Kecamatan Blang Mangat
 - c. Kecamatan Muara Satu
 - d. Kecamatan Muara Dua



Badan Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe selaku pelaksana Entitas Pelaporan Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dinas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Kebijakan Makro

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBK, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

2.1.1 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Daerah juga di berikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas Daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.

Penyusunan APBK Tahun 2017 didasarkan pada pendekatan kinerja yang mengutamakan output, outcome dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang direncanakan, dengan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, disiplin, adil, efisien dan efektif, transparansi dan akuntabel merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan anggaran, sementara disiplin anggaran dimaksudkan adanya



keseimbangan antara pendapatan dan belanja, prinsip yang lain yang dilaksanakan prinsip partisipatif untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Pajak dibagi 2 (dua) yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, Pajak Provinsi terdiri dari 5 Jenis Pajak dan Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk memungut 16 jenis pajak didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak tersebut secara umum di pungut hampir di semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik.

b. Dana Perimbangan

1) Bagian Daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (*Revenue Sharing*)

Untuk menambah Pendapatan Daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara Pusat dan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2) Dana Alokasi Umum

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan.



Berdasarkan konsep *fiscal gap*, kontribusi DAU daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

3) Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan Kebutuhan Khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Implementasi konsep DAK di Indonesia mencakup pula alokasi dana untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi, dimana pembiayaannya berasal dari penerimaan Dana Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan 40% nya kepada Daerah Penghasil. Pembiayaan dari DAK-DR sejalan dengan keinginan Pemerintah untuk melibatkan Pemerintah Daerah penghasil Dana Reboisasi dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi kawasan hutan di Daerahnya, dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

c. Pinjaman Daerah

Untuk membiayai kebutuhan Daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), Daerah juga dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan Pusat.



2.1.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengemban visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe telah direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah diagendakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2012 – 2017 Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai semua target dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2017.

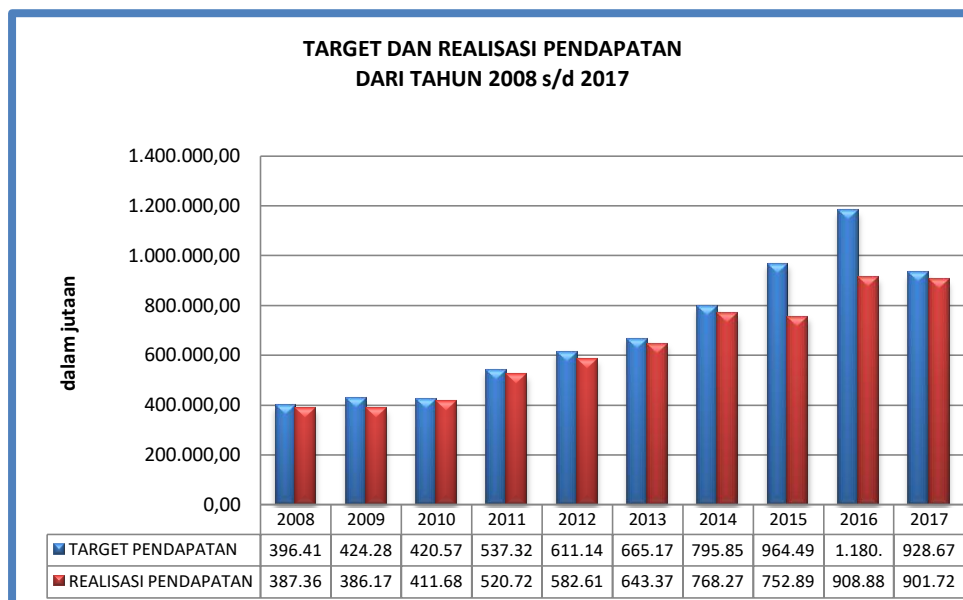
Pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan selain telah direpresentasikan dalam RPJM dan juga dapat dilihat dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap SKPD Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2017 sehingga memungkinkan kinerja SKPD menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Lhokseumawe mencapai Realisasi Pendapatan sebesar 97,10%, sedangkan Realisasi Anggaran Belanja sebesar 91,36% ini menunjukkan bahwa persentase pencapaian Realisasi Pendapatan masih diatas persentase Realisasi Belanja. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja dalam sepuluh tahun terakhir secara rinci dapat dilihat seperti berikut ini :

1. Realisasi Pendapatan dari sebesar Rp387.364.219.427,00 pada Tahun Anggaran 2008, menjadi Rp386.173.541.065,52 pada Tahun Anggaran 2009, menjadi Rp411.680.275.530,92 pada Tahun Anggaran 2010, menjadi Rp520.729.023.712,21 pada Tahun Anggaran 2011, menjadi Rp582.615.583.256,10 pada Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp643.373.365.018,25 pada Tahun Anggaran 2013 menjadi Rp768.270.271.382,74 pada Tahun Anggaran 2014 menjadi Rp834.790.954.810,35 pada Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp908.888.389.623,51 pada Tahun Anggaran 2016 dan menjadi Rp901.721.200.897,32 pada Tahun 2017. Penurunan Realisasi Pendapatan daerah pada Tahun 2017 sebesar Rp7.167.188.726,19 dari Realisasi Tahun 2016 disebabkan beberapa komponen Pendapatan Daerah Realisasinya belum mencapai target, secara grafis perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat seperti dalam gambar berikut (**Lihat Gambar 1**).



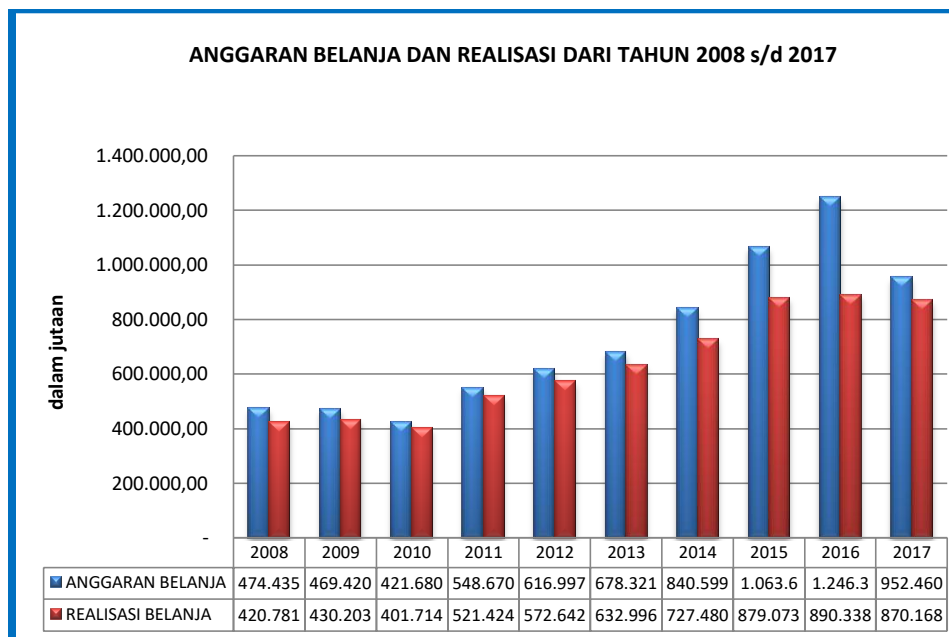
2. Realisasi Belanja daerah dari sebesar Rp420.781.746.731,00 pada Tahun Anggaran 2008, menjadi Rp430.203.875.325,00 pada Tahun Anggaran 2009, menjadi Rp401.714.388.013,00 pada Tahun Anggaran 2010, menjadi Rp521.424.477.433,21 pada Tahun Anggaran 2011, menjadi Rp572.642.520.110,00 pada Tahun Anggaran 2012, menjadi Rp632.996.981.578,00 pada Tahun Anggaran 2013, menjadi Rp727.480.904.420,00 pada Tahun Anggaran 2014, menjadi Rp879.073.955.280,00 pada Tahun Anggaran 2015, menjadi Rp890.338.348.966,21 pada Tahun Anggaran 2016 serta menjadi Rp870.168.392.236,00 pada Tahun 2017. Penurunan Realisasi Belanja daerah pada Tahun 2017 sebesar Rp20.169.956.730,21 dari Realisasi Tahun 2016 disebabkan pada Tahun 2017 adanya pembayaran Kewajiban (Utang) sebesar 40%. Perkembangan belanja daerah dari tahun ketahun secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut (**Lihat Gambar 2**)

Gambar 1. Target dan Realisasi Pendapatan dari Tahun 2008 s/d 2017





Gambar 2. Anggaran Belanja dan Realisasi dari Tahun 2008 s/d 2017





BAB III

KINERJA KEUANGAN DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Perkembangan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

3.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Pendapatan Pajak Daerah	27.839.764.484,00	24.519.447.668,83

Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 44,20%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 3,08% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 11,92%.

3.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Pendapatan Retribusi Daerah	4.050.483.522,00	3.816.764.587,00

Kontribusi Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 6,43%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 0,45% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,77%.

3.1.3 Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.093.717.479,31	4.253.406.003,14



Kontribusi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 8,09%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 0,56% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 16,49%.

3.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.002.294.618,54	23.759.013.214,05

Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 41,28%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 2,88% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 9,00%.

3.1.5 Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Pajak

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Pajak	45.470.527.507,00	40.599.787.794,00

Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pendapatan Transfer adalah sebesar 5,56%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 5,04% atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 10,71%.

3.1.6 Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.795.459.091,00	2.365.387.805,00

Kontribusi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terhadap Pendapatan Transfer adalah sebesar 6,03%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 0,42% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 37,67%.



3.1.7 Dana Perimbangan – Dana Alokasi Umum

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Dana Perimbangan – Dana Alokasi Umum	459.628.037.000,00	467.846.597.000,00

Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Transfer adalah sebesar 56,18%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 50,97% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 1,79%.

3.1.8 Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus	135.319.889.183,00	177.543.384.827,00

Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Transfer adalah sebesar 16,54%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 15,01% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 31,20%.

3.1.9 Dana Penyesuaian dan Otsus

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Dana Penyesuaian dan Otsus	150.851.536.719,00	122.530.124.755,00

Kontribusi Dana Penyesuaian dan Otsus terhadap Pendapatan Transfer adalah sebesar 18,44%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 16,73% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 18,77%.

3.1.10 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	23.121.731.293,47	25.208.475.969,49



Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi terhadap Pendapatan Transfer adalah sebesar 2,83%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 2,56% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 9,03%.

3.1.11 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi	0,00	16.446.000.000,00

Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi terhadap Pendapatan Transfer adalah sebesar 0,00%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 0,00% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 100%.

3.1.12 Pendapatan Hibah dari Pemerintah

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	20.547.760.000,00	0,00

Kontribusi Pendapatan Hibah dari Pemerintah terhadap Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah sebesar 18,42%, sedangkan terhadap keseluruhan pendapatan adalah sebesar 2,28% atau mengalami peningkatan dari realisasi sebelumnya sebesar 100%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2017 sebesar Rp62.986.260.103,85 berarti kontribusi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah sebesar 6,98%. Dengan demikian ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat dan Provinsi dirasakan masih cukup besar yaitu sebesar 93,02%.

Komposisi PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, zakat, infaq dan sadaqah dan Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas. Dari penerimaan PAD ini yang paling besar penerimaannya adalah dari Pajak Daerah sebesar Rp27.839.764.484,00 atau 3,08% dari keseluruhan Pendapatan, sedangkan dari Lain-lain

PAD yang Sah sebesar 2,88%, Retribusi Daerah sebesar 0,44%, dan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,56%.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun 2017 realisasinya sebesar Rp644.213.912.781,00 terdiri dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp45.470.527.507,00 dan Bukan Pajak sebesar Rp3.795.459.091,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp459.628.037,00, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp135.319.889.183,00. Dengan demikian kontribusi total dana perimbangan terhadap total realisasi pendapatan sebesar 71,31%. Dana DAU sebesar 75,20% dialokasikan untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang dialokasikan untuk Belanja Aparatur, Pelayanan Publik dan lainnya. Hal ini menggambarkan alasan Pemerintah Kota Lhokseumawe belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena kebutuhan untuk pembayaran gaji dan Belanja Aparatur tidak mungkin dikurangi. Persentase sumber pendapatan Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017

Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan keuangan daerah dengan menyempurnakan manajemen keuangan, melakukan efisiensi dan penghematan, mempertajam prioritas dan berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan meningkatkan penerimaan keuangan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik. Adapun realisasi belanja daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut :



3.1.13 Belanja Pegawai

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Belanja Pegawai	345.459.645.215,00	396.283.041.380,00

Kontribusi Belanja Pegawai terhadap Belanja Operasi adalah sebesar 53,52%, sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 39,70% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 12,82%.

3.1.14 Belanja Barang dan Jasa

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Belanja Barang dan Jasa	99.652.653.287,00	93.303.636.048,21

Kontribusi Belanja Barang terhadap Belanja Operasi adalah sebesar 15,43%, sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 11,45% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 6,37%.

3.1.15 Belanja Hibah

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Belanja Hibah	59.525.325.773,00	51.927.177.175,00

Kontribusi Belanja Hibah terhadap Belanja Operasi adalah sebesar 9,22%, sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 6,84% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 12,76%.

3.1.16 Belanja Bantuan Sosial

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Belanja Bantuan Sosial	31.480.613.809,00	22.679.951.700,00

Kontribusi Belanja Sosial terhadap Belanja Operasi adalah sebesar 4,87%, sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 3,61% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 27,95%.



3.1.17 Belanja Modal – Tanah

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Belanja Modal – Tanah	7.657.161.155,00	18.631.135.900,00

Kontribusi Belanja Modal Tanah terhadap Belanja Modal adalah sebesar 3,42%, sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 0,88% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 41,09%.

3.1.18 Belanja Modal – Peralatan dan Mesin

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Belanja Modal – Peralatan dan Mesin	23.572.905.862,00	11.837.194.229,00

Kontribusi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terhadap Belanja Modal adalah sebesar 10,54%, sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 2,71% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 49,73%.

3.1.19 Belanja Modal – Gedung dan Bangunan

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Belanja Modal – Gedung dan Bangunan	44.348.598.500,00	35.556.555.820,00

Kontribusi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terhadap Belanja Modal adalah sebesar 19,83%, sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 5,09% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 19,82%.



3.1.20 Belanja Modal – Bangunan Air, Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Belanja Modal – Bangunan		
Air, Jalan, Jembatan,	147.877.598.738,00	169.457.918.839,00
Irigasi dan Jaringan		

Kontribusi Belanja Modal Bangunan Air, Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan terhadap Belanja Modal adalah sebesar 66,14%, sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 16,99% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 14,59%.

3.1.21 Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Belanja Modal – Aset Tetap		
Lainnya	138.254.500	502.205.700,00

Kontribusi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terhadap Belanja Modal adalah sebesar 0,06%, sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 0,02% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 72,47%.

3.1.22 Belanja Tak Terduga

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Belanja Tak Terduga	206.399.000,00	353.829.000,00

Kontribusi Belanja Tak Terduga terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 0,02% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 41,67%.

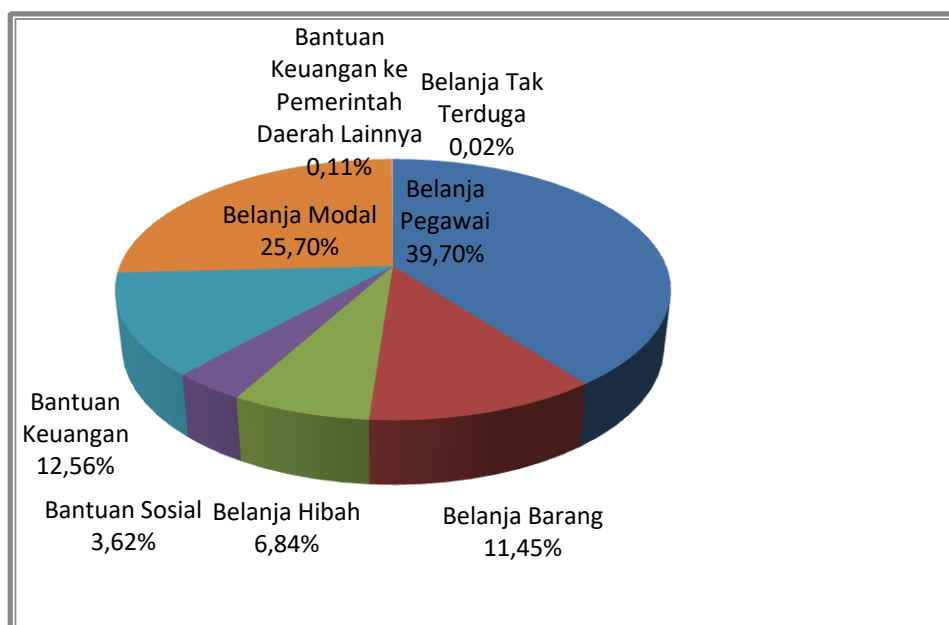
3.1.23 Belanja Transfer

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Belanja Transfer Bagi Hasil		
Pendapatan	928.342.379,00	0,00

Kontribusi Belanja Transfer Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 0,10% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 100,00%.

Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017



Gambar 4. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe diantaranya yaitu:

1. Tingkat pencapaian pendapatan belum memenuhi harapan yang telah ditetapkan. Walaupun secara persentase realisasi pendapatan meningkat dari tahun 2016 sebesar 76,98% menjadi 97,10% pada tahun 2017 atau naik sebesar 20,12%. Namun secara nominal realisasi pendapatan tahun 2017 turun sebesar Rp7.167.188.726,19 dibandingkan dengan nominal realisasi pendapatan tahun 2016 (Realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp908.888.389.623,51 dikurang realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp901.721.200.897,32 = Rp7.167.188.726,19).



2. Dari sisi pertumbuhan pendapatan, belum dapat memenuhi harapan yang ditetapkan, di sisi yang lain pengeluaran untuk belanja harus dibiayai dan utang/kewajiban tahun sebelumnya juga harus dibayar sebesar 40% atau sebesar Rp162.315.870.933,98.

Konsekuensi selanjutnya kegiatan di hampir seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe relatif stagnan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe meliputi :

4.1 Entitas Pelaporan

Pemerintah Kota Lhokseumawe memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe sebagai Bendaharawan Umum Daerah untuk mengelola administrasi Keuangan daerah beserta pelaporan keuangannya.

Bendaharawan Umum Daerah selaku entitas pelaporan melakukan fungsi penganggaran, fungsi verifikasi, fungsi perbendaharaan dan fungsi akuntansi.

Laporan keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.1.1 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam perhitungan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca Daerah, Pendapatan dan Beban Operasional dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual mulai diterapkan sepenuhnya pada Tahun Anggaran 2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak Kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.2 Pengakuan dan Pengukuran

4.1.2.1 Pendapatan

Pendapatan dibagi menjadi 2 (dua) yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua Penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Pendapatan-LO diakui pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) di mana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - 2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu.

Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di Rekening Umum Kas Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD.



Pengakuan Pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO diukur berdasarkan Azas Bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

4.1.2.2 Pengakuan Belanja dan Beban

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah dan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran berdasarkan jumlah nominal yang terdapat pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan posnya masing-masing. Sedangkan pengakuan beban dapat diakui dengan tiga kondisi yaitu (i) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; (ii) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan (iii) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

4.1.2.3 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat. Alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau Peraturan Perundang-Undangan.

a. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :

1. Transaksi dengan Pertukaran (*Exchange Transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2. Transaksi Tanpa Pertukaran (*Non-Exchange Transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa



depan secara Cuma-Cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dilanggarkan.

3. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintahan (*Government-Related Events*)

Dalam kewajiban yang berkaitan dengan Pemerintahan Kota, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Kota dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Kota.

4. Kejadian yang diakui pemerintah (*Government-Acknowledge Events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kota memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintahan daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Kota, misal Pemerintah Kota memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

b. Pengukuran

Kewajiban Pemerintah Kota dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Kota berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

1. Pengukuran Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Apabila rekanan menyediakan barang/jasa sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.



2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan Perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengukuran Kewajiban Lancar lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, antara lain: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun, penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Kota diukur berdasarkan karakteristik utang, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjual belikan

Utang yang tidak diperjual belikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari world bank.

2. Utang yang diperjual belikan

Utang yang diperjual belikan pada umumnya berbentuk Sekuritas Utang Pemerintah Kota. Sekuritas Utang Pemerintah Kota dinilai sebesar nilai pari (*Original Face Value*) dengan memperhitungkan diskon atau sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar parinya.

Jika sekuritas utang Pemerintah Kota dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo.



Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Kota disajikan dalam neraca disisi pasiva. Dalam pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan terkait dengan kewajiban, diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;
 - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya Pinjaman:
 - a. perlakuan biaya pinjaman;
 - b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
 - c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.1.2.4 Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti Bunga, Dividen dan Royalti, atau Manfaat Sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka



panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi meliputi:

A. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek berbeda dengan kas dan setara kas. Suatu investasi masuk klasifikasi kas dan setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

B. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

a. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memungkinkan Pemerintah Kota memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau



2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*Reliable*).

b. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi Jangka Pendek disajikan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi non permanent dan investasi permanen.

Penyajian dana bergulir dineraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

4.1.2.5 Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Transfer keluar LRA adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Kota.

a. Pengakuan

1. transfer masuk diakui pada saat terjadinya penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. dana transfer diakui sesuai hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

b. Pengukuran

1. transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.



2. transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.
 3. dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.
- c. Penyajian dan Pengungkapan
1. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan transfer masuk meliputi:
 - a) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.
 2. Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait dengan transfer keluar meliputi:
 - a) rincian transfer keluar;
 - b) penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.1.2.6 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kota.

- a. Pengakuan
1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Daerah, penerimaan kembali pinjaman



yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengukuran

Pengukuran Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan meliputi:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.1.2.7 Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah



yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dan tanggal perolehannya.

a. Pengakuan

Kas dan setara kas yang diakui mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

1. Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
2. Setara Kas, dapat berupa Surat Utang Negara (SUN)/Obligasi dan Deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

b. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas disajikan dalam neraca dan laporan arus kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada laporan arus kas.

Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan kas dan setara kas meliputi:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.



4.1.2.8 Piutang

Piutang adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian Kualitas Piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

a. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

b. Pengukuran

Setelah diterbitkan surat tagihan maka piutang pendapatan diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih

dilakukan penyisihan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Piutang dan perhitungan nilai penyisihannya disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet;

Penggolongan piutang dipilih menjadi:

1. Piutang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Dalam masa/jangka waktu SKPD/SKRD, sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - b. Dalam masa/jangka waktu akad kredit perikatan.
2. Piutang kurang lancar, dengan kriteria:
Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun setelah SKPD/SKRD/ akad kredit perikatan jatuh tempo.
3. Piutang diragukan, dengan kriteria:
Umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah SKPD/SKRD/ akad kredit perikatan jatuh tempo.
4. Piutang macet, dengan kriteria:
Umur piutang diatas 3 (tiga) tahun setelah SKPD/SKRD/akad kredit perikatan jatuh tempo.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

No	Kualitas piutang	Taksiran piutang tak tertagih
1.	Lancar	5%
2.	Kurang lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%



Penyisihan piutang tidak tertagih, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar Sebesar 5% (lima perseratus);
2. Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
4. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

4.1.2.9 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategi/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.



Persediaan untuk tujuan strategik/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

a. Pengakuan

Persediaan dicatat berdasarkan :

1. Pendekatan persediaan berdasarkan beban, metode perpetual dimana fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.
2. Proses pencatatan dan penatausahaan persediaan menggunakan Aplikasi Persediaan Kementerian Keuangan, dan dilakukan rekonsiliasi saldo persediaan dengan *E-Finance*.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*, apabila disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa, atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban. Sedangkan selisih persediaan karena persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan kerugian daerah.

b. Pengukuran

Persediaan diukur dengan :

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*Arm Length Transaction*).



Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pada setiap mutasi dan pada akhir tahun persediaan dinilai dengan menggunakan harga perolehannya.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.1.2.10 Aset Tetap

4.1.2.10.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

a. Pengakuan

Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.



Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

c. Pengungkapan

Tanah disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula:

Dasar penilaian yang digunakan Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan:

- Penambahan;
- Pelepasan;
- Mutasi Tanah lainnya.

4.1.2.10.2 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah Barang Milik Daerah (BMD) yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

a. Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai gedung dan bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan gedung dan bangunan tersebut.



Pengembangan adalah peningkatan nilai gedung dan bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai gedung dan bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

b. Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

c. Pengungkapan

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - Penambahan
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.



4.1.2.10.3 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

a. Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat peralatan dan mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai peralatan dan mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan peralatan dan mesin tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai peralatan dan mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai peralatan dan mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

b. Pengukuran

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa



konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

c. Pengungkapan

Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula :

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - Penambahan;
 - Pengembangan ; dan
 - Penghapusan.

Penghapusan aset-aset pemerintah dalam hal ini mengacu pada ketentuan dan peraturan daerah yang telah di atur dalam Surat Keputusan Berdasarkan hasil Penelitian Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Daerah yang dinyatakan hilang, rusak berat dan tidak efesien lagi penggunaannya untk kepentingan dinas, dan pelaksanaan penghapusan dilakukan dengan cara:

- Untuk barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan dengan cara penjualan/pelelangan atau disumbangkan kepada pihak lain;
- Untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara pemusnahan.

- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

4.1.2.10.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.



a. Pengakuan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berkaitan pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset tersebut.

b. Pengukuran

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

c. Pengungkapan

Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula :

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan
 - Pengembangan, dan



- Penghapusan
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

4.1.2.10.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

a. Pengakuan

Aset Tetap lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika Aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk Aset tersebut. Aset Tetap lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Aset Tetap lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap lainnya yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap lainnya tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset tersebut.

b. Pengukuran

Biaya perolehan Aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan Aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.



c. Pengungkapan

Aset Tetap lainnya disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan.
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

4.1.2.10.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah Aset-Aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

a. Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan pada saat Penyusunan Laporan Keuangan jika:

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kota atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu konstruksi dalam pengertian dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.



b. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyalah; biaya bahan; pemindahan sarana; peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

c. Pengungkapan

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula :

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan;
- 5) Retensi.

4.1.2.10.7 Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.



4.1.2.10.8 Aset Bersejarah

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*) tidak disajikan di Neraca namun Aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa Aset tetap dijelaskan sebagai Aset Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari Aset Bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen. Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu Aset Bersejarah :

- a. Nilai Kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset Bersejarah biasanya diharapkan untuk mempertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset Bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah mungkin mempunyai banyak Aset Bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset Bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi, harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan Aset Bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa Aset Bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

4.1.2.10.9 Kapitalisasi Aset tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Jenis aset	Nilai (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	300.000,00
2	Gedung dan Bangunan	30.000.000,00
3	Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya	200.000,00

Kapitalisasi Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi tidak menambah umur ekonomis aset tetap tersebut. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap diperlakukan sebagai belanja/beban. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah.

4.1.2.10.10 Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud

Penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud yang nilainya diatas kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*Straight Line Method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Pengecualian penyusutan Aset Tetap dilakukan terhadap Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Lainnya seperti Buku.



BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut :

5.3.1. Pendapatan - LRA

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp928.679.687.143,16 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp901.721.200.897,32 atau 97,10% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan
Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	64.251.583.646,00	62.986.260.103,85	(1.265.323.542,15)	98,03
2	Pendapatan Transfer	752.863.826.818,16	818.187.180.793,47	65.323.353.975,31	108,68
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	111.564.276.679,00	20.547.760.000,00	(91.016.516.679,00)	18,42
	Jumlah	928.679.687.143,16	901.721.200.897,32	(26.958.486.245,84)	97,10

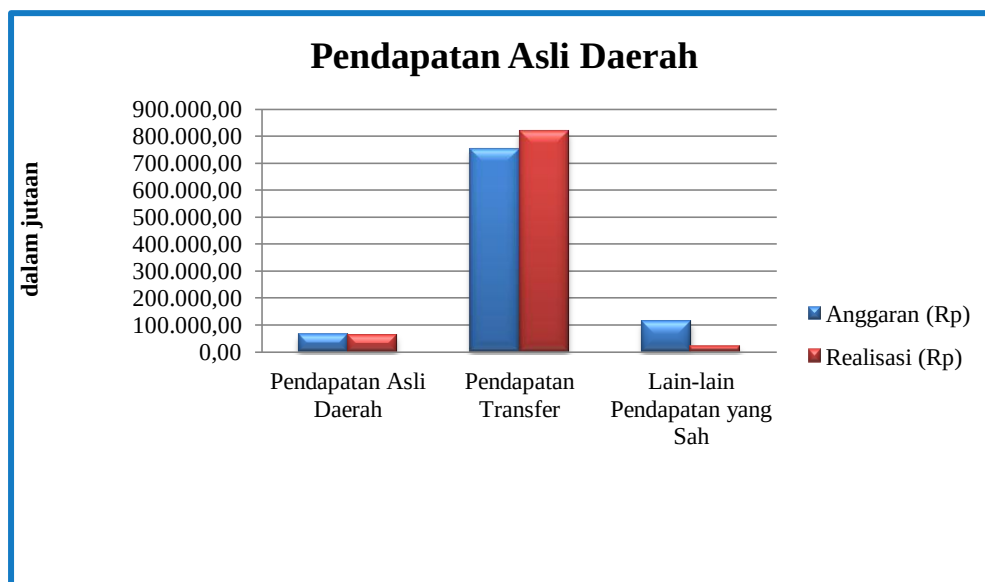
Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan atau hanya sebesar 98,03%. Realisasi pendapatan transfer Tahun 2017 melebihi target sebesar 108,68% dari target yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan terealisasi 98,04% atau Rp644.213.912.781,00 dari anggaran sebesar Rp657.119.886.340,00.
2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya terealisasi 238,81% atau Rp150.851.536.719,00 dari anggaran sebesar Rp63.167.967.000,00.
3. Pendapatan Transfer Provinsi terealisasi sebesar Rp23.121.731.293,47 atau 70,98% dari anggaran sebesar Rp32.575.973.478,16.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi 18,42% atau Rp20.547.760.000,00 dari anggaran sebesar Rp111.564.276.679,00 merupakan hibah dana BOS dari pemerintah pusat.

Penyajian pendapatan secara grafik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 5. Realisasi Pendapatan Tahun 2017



Berdasarkan grafik di atas, jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki ketergantungan yang besar dari Pendapatan Transfer sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu terealisasi sebesar Rp818.187.180.793,47 atau 90,73% dari keseluruhan pendapatan daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe.

5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

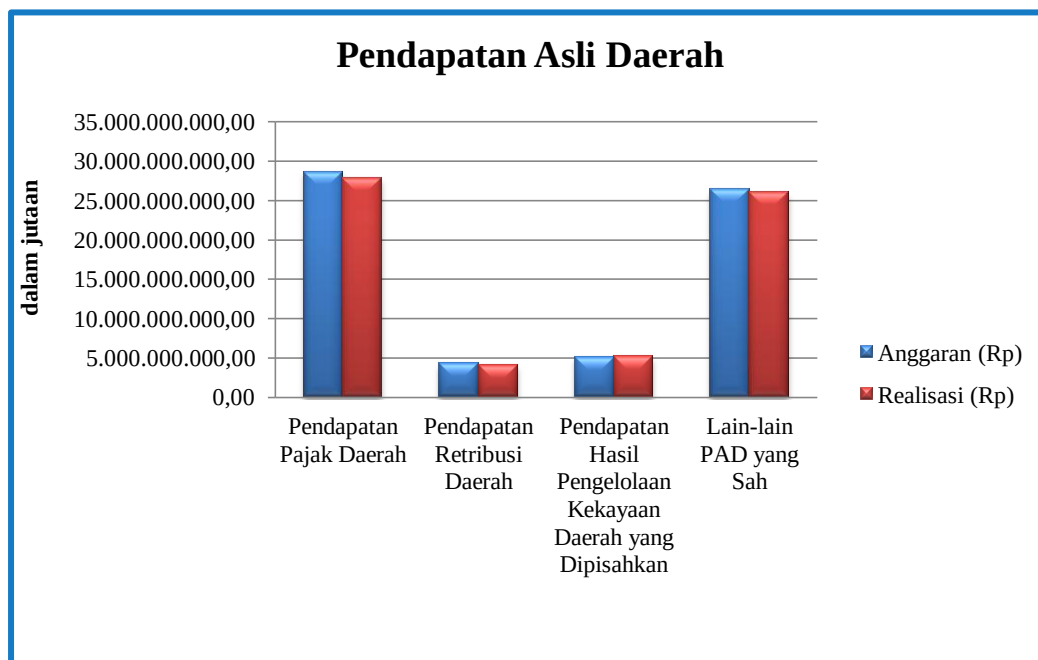
Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp62.986.260.103,85 atau 98,03% dari anggaran sebesar Rp64.251.583.646,00. Nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terhadap keseluruhan pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar 6,98%. Berikut realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	28.623.150.951,00	27.839.764.484,00	(783.386.467,00)	97,26
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.252.300.000,00	4.050.483.522,00	(201.816.478,00)	95,25
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.040.000.000,00	5.093.717.479,31	53.717.479,31	101,07
4	Lain-lain PAD yang Sah	26.336.132.695,00	26.002.294.618,54	(333.838.076,46)	98,73
	Jumlah	64.251.583.646,00	62.986.260.103,85	(1.265.323.542,15)	98,03

Komposisi masing-masing jenis pendapatan dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 6. Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017



5.3.1.1.2 Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp28.623.150.951,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp27.839.764.484,00 atau 97,26% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 3. Rincian Pendapatan Pajak Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Pajak Hotel	307.974.000,00	251.570.700,00	(56.403.300,00)	81,69
2	Pajak Restoran	2.393.072.951,00	2.703.864.639,00	310.791.688,00	112,99
3	Pajak Hiburan	12.000.000,00	10.800.000,00	(1.200.000,00)	90,00
4	Pajak Reklame	850.000.000,00	767.766.745,00	(82.233.255,00)	90,33
5	Pajak Penerangan Jalan	15.700.000.000,00	15.574.198.671,00	(125.801.329,00)	99,20
6	Pajak Parkir	8.604.000,00	8.913.300,00	309.300,00	103,59
7	Pajak Air Tanah	1.500.000,00	1.618.896,00	118.896,00	107,93
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.150.000.000,00	1.166.304.574,00	16.304.574,00	101,42
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.600.000.000,00	3.048.671.118,00	(551.328.882,00)	84,69
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	4.600.000.000,00	4.306.055.841,00	(293.944.159,00)	93,61
	Jumlah	28.623.150.951,00	27.839.764.484,00	(783.386.467,00)	97,26

5.3.1.1.3 Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp4.252.300.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp4.050.483.522,00 atau 95,25% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	2.019.800.000,00	1.703.426.500,00	(316.373.500,00)	84,34
2	Retribusi Jasa Usaha	530.000.000,00	564.190.000,00	34.190.000,00	106,45
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.702.500.000,00	1.782.867.022,00	80.367.022,00	104,72
	Jumlah	4.252.300.000,00	4.050.483.522,00	(201.816.478,00)	95,25

1. Retribusi Jasa Umum

Rincian Retribusi Jasa Umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Rincian Retribusi Jasa Umum
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	450.000.000,00	530.736.000,00	80.736.000,00	117,94
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	808.800.000,00	642.278.000,00	(166.522.000,00)	79,41
3	Retribusi Pelayanan Pasar	400.000.000,00	423.835.000,00	23.835.000,00	105,96



No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	111.000.000,00	106.577.500,00	(4.422.500,00)	96,02
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	-
	Jumlah	2.019.800.000,00	1.703.426.500,00	(316.373.500,00)	84,34

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari 5 (lima) jenis pendapatan Retribusi Jasa Umum, sebanyak dua jenis retribusi melebihi target anggaran, yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 117,94% dan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 105,96%, dan retribusi yang terendah realisasinya adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hanya 79,41%%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Rincian Retribusi Jasa Usaha dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Rincian Retribusi Jasa Usaha
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	530.000.000,00	564.190.000,00	34.190.000,00	106,45
	Jumlah	530.000.000,00	564.190.000,00	34.190.000,00	106,45

Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut menggambarkan bahwa jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melebihi target anggaran sebesar 106,45%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Jasa Angkutan. Realisasi per masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	552.853.750,00	52.853.750,00	110,57
2	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/kegiatan kepada orang pribadi	-	1.217.700.772,00	1.217.700.772,00	100,00



No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
3	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/kegiatan kepada badan	1.100.000.000,00	-	(1.100.000.000,00)	-
4	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-
5	Retribusi Terminal	76.500.000,00	9.500.000,00	(67.000.000,00)	12,42
6	Retribusi Izin Usaha Angkutan	25.000.000,00	2.812.500,00	(22.187.500,00)	11,25
	Jumlah	1.702.500.000,00	1.782.867.022,00	80.367.022,00	104,72

Realisasi dua jenis retribusi tersebut yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan melampaui target antara lain disebabkan oleh semakin pesatnya pembangunan dan perkembangan dunia usaha di Kota Lhokseumawe, sedangkan Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada orang pribadi tidak ditargetkan namun terdapat realisasi sebesar Rp1.217.700.772,00. Untuk Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada badan tidak ada realisasi. Retribusi Izin Usaha Angkutan tidak mencapai target disebabkan oleh jumlah angkutan yang trayeknya dalam wilayah Kota Lhokseumawe semakin sedikit, seiring dengan pertumbuhan jumlah angkutan becak mesin yang semakin meningkat.

5.3.1.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terdiri dari Penerimaan Deviden dan BPR Sabee Meusampe. Realisasi masing-masing Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Penerimaan Deviden	5.000.000.000,00	5.093.717.479,31	93.717.479,31	101,87
2	BPR Sabee Meusampe	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	-
	Jumlah	5.040.000.000,00	5.093.717.479,31	53.717.479,31	101,07

Penerimaan Deviden adalah Bagian Laba atas penyertaan modal pada Bank Aceh yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.093.717.479,31 atau melebihi target 101,87%. Jumlah tersebut merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Aceh. Sedangkan pada BPR Sabee Meusampe dianggarkan penerimaan laba sebesar Rp40.000.000,00 akan tetapi tidak terealisasi. Hal ini dikarenakan oleh



penyertaan modal pada BPR Sabee Meusampe tidak berjalan lancar, sesuai dengan hasil tim verifikasi tahun 2014 sisa dana modal Pemerintah Kota Lhokseumawe pada BPR Sabee Meusampe yang masih lancar akan dikembalikan oleh pihak BPR Sabee Meusampe sehingga pengembalian dana tersebut dicatat sebagai piutang.

5.3.1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp26.336.132.695,00 dapat dicapai sebesar Rp26.002.294.618,54 atau 98,73% dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 9. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	32.761.800,00	0,00	(32.761.800,00)	-
2	Penerimaan Jasa Giro	400.000.000,00	261.114.331,93	(138.885.668,07)	65,28
3	Pendapatan Bunga Deposito	3.200.000.000,00	4.583.928.464,53	1.383.928.464,53	143,25
4	Pendapatan Lain-Lain Dari Penerimaan Asli Daerah	-	3.236.707.183,08	3.236.707.183,08	100,00
5	Lain-Lain Penerimaan Dari Denda Pajak	2.356.753.052,00	207.017.314,00	(2.149.735.738,00)	8,78
6	Pendapatan Zakat/Infaq	7.000.000.000,00	7.167.082.575,00	167.082.575,00	102,39
7	Dana Kapitasi JKN	13.346.617.843,00	10.546.444.750,00	(2.800.173.093,00)	79,02
	Jumlah	26.336.132.695,00	26.002.294.618,54	(333.838.076,46)	98,73

1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp32.761.800,00 tidak terealisasi.
2. Pendapatan Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp261.114.331,93 yang merupakan jasa giro dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. Pendapatan Bunga Deposito Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah penerimaan bunga deposito dari Bank Aceh dengan anggaran sebesar Rp3.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.583.928.464,53.
4. Pendapatan Lain-lain dari Penerimaan Asli Daerah tidak dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp3.236.707.183,08.
5. Lain-lain Penerimaan dari Denda Pajak dianggarkan sebesar Rp2.356.753.052,000 terealisasi sebesar Rp207.017.314,00.



6. Pendapatan Zakat dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.167.082.575,00.
7. Dana Kapitasi JKN dianggarkan sebesar Rp13.346.617.843,00 dan terealisasi sebesar Rp10.546.444.750,00. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10. Rincian Dana Kapitasi JKN
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Mon Geudong	2.420.171.726,00	1.258.563.900,00	(1.161.607.826,00)	52,00
2	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Banda Sakti	3.331.725.109,00	2.959.074.900,00	(372.650.209,00)	88,82
3	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Muara Dua	3.009.031.834,00	2.688.351.300,00	(320.680.534,00)	89,34
4	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Muara Satu	2.632.469.730,00	1.921.919.700,00	(710.550.030,00)	73,01
5	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Blang Mangat	1.518.547.232,00	1.229.886.100,00	(288.661.132,00)	80,99
6	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Blang Cut	434.672.212,00	488.648.850,00	53.976.638,00	112,42
	Jumlah	13.346.617.843,00	10.546.444.750,00	(2.800.173.093,00)	79,02

Zakat dan Infaq/Sadaqah dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp7.167.082.575,00 atau 102,39% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11. Rincian Pendapatan Zakat, Infaq/Shadaqah
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Zakat	7.000.000.000,00	6.093.169.186,00	(906.830.814,00)	87,05
2	Infaq/Shadaqah	-	1.073.913.389,00	1.073.913.389,00	100,00
	Jumlah	7.000.000.000,00	7.167.082.575,00	167.082.575,00	102,39

5.3.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer mencapai sebesar Rp818.187.180.793,47 atau 108,68% dari anggaran sebesar Rp725.863.826.818,16. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.



5.3.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer–Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan
pada Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
I	Bagi Hasil Pajak	52.740.187.507,00	45.470.527.507,00	(7.269.660.000,00)	86,22
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	14.488.456.463,00	16.856.557.628,00	2.368.101.165,00	116,34
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	37.979.736.385,00	28.346.309.220,00	(9.633.427.165,00)	74,64
3	Bagi Hasil Cukai Tembakau	271.994.659,00	267.660.659,00	(4.334.000,00)	98,41
II	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	3.678.539.247,00	3.795.459.091,00	116.919.844,00	103,18
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	6.220.673,00	2.618.473,00	(3.602.200,00)	42,09
2	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	0,00	6.790.804,00	6.790.804,00	100,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	3.386.862,00	0,00	(3.386.862,00)	-
4	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	356.208.073,00	252.492.373,00	(103.715.700,00)	70,88
5	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	977.663.506,00	525.572.127,00	(452.091.379,00)	53,76
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	542.979.110,00	418.087.910,00	(124.891.200,00)	77,00
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.792.081.023,00	2.200.005.093,00	407.924.070,00	122,76
8	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	0,00	12.461.862,00	12.461.862,00	100,00
9	Bagi Hasil dari Perkebunan	0,00	377.430.449,00	377.430.449,00	100,00
III	Dana Alokasi Umum	459.628.037.000,00	459.628.037.000,00	-	100,00
IV	Dana Alokasi Khusus	141.073.122.586,00	135.319.889.183,00	(5.753.233.403,00)	95,92
	Jumlah	657.119.886.340,00	644.213.912.781,00	(12.905.973.559,00)	98,04



5.3.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar Rp150.851.536.719,00 atau 238,81% dari anggaran sebesar Rp63.167.967.000,00. Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 13. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
pada Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
I	Dana Penyesuaian	63.167.967.000,00	62.910.060.040,00	(257.906.960,00)	99,59
1	Dana Alokasi Desa	55.667.967.000,00	55.410.060.040,00	(257.906.960,00)	99,54
2	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	100,00
II	Dana Otonomi Khusus	0,00	87.941.476.679,00	87.941.476.679,00	100,00
	Dana Otonomi Khusus	0,00	87.941.476.679,00	87.941.476.679,00	100
	Jumlah	63.167.967.000,00	150.851.536.719,00	87.683.569.719,00	238,81

Realisasi Dana Alokasi Desa terealisasi sebesar Rp55.667.967.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp55.410.060.040 atau 99,54% dan Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 100% dari nilai yang dianggarkan sebesar Rp7.500.000.000,00. Realisasi Dana Otonomi Khusus tidak dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp87.941.476.679,00.

5.3.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp23.121.731.293,47 atau 70,98 % dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp32.575.973.478,16. Jumlah tersebut merupakan penerimaan dari pendapatan transfer Pemerintah Provinsi tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penetapan Perkiraan jumlah DBH Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2017. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 14. Rincian Pendapatan Transfer Provinsi
pada Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.242.073.156,70	3.989.887.919,28	(252.185.237,42)	94,06
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.551.990.749,31	2.734.080.425,47	(1.817.910.323,84)	60,06
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.595.698.986,86	7.216.920.188,63	(4.378.778.798,23)	62,24
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0,00	4.820.358,80	4.820.358,80	100,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	13.314.950,18	11.778.831,93	(1.536.118,25)	88,46
6	Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok	0,00	9.164.243.569,36	9.164.243.569,36	100,00
7	Dana Bagil Pajak dari Provinsi	12.172.895.635,11	0,00	(12.172.895.635,11)	-
	Jumlah	32.575.973.478,16	23.121.731.293,47	(9.454.242.184,69)	70,98

5.3.2. Belanja dan Transfer

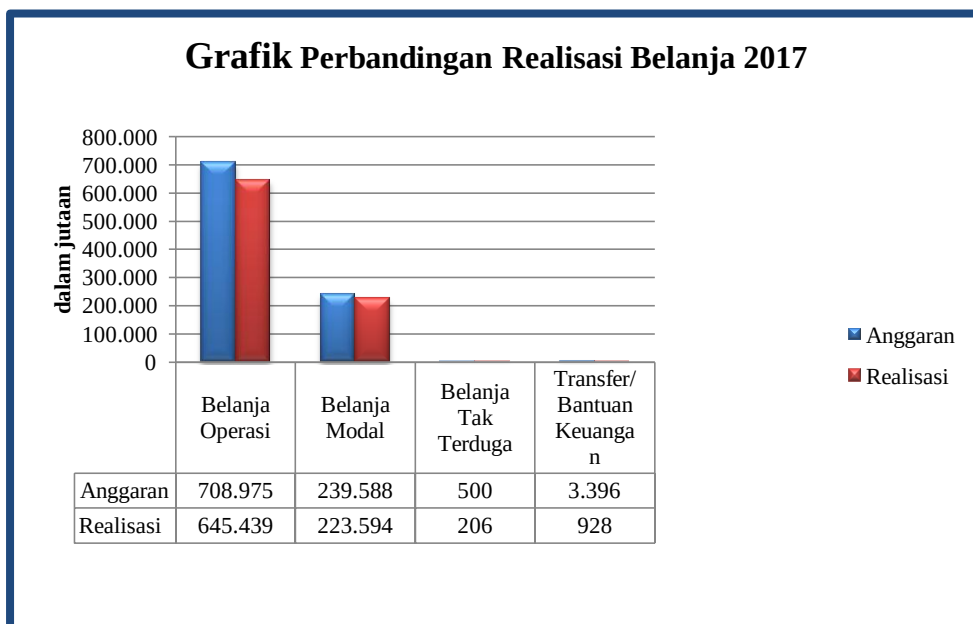
Realisasi Belanja dan Transfer Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp870.168.392.236,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp82.291.898.028,39 yaitu 91,36% dari anggaran sebesar Rp952.460.290.264,39 yang terdiri dari :

Tabel 15. Rincian Belanja dan Transfer Daerah
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Belanja Operasi	708.975.618.530,39	645.439.132.102,00	(63.536.486.428,39)	91,04
2	Belanja Modal	239.588.041.734,00	223.594.518.755,00	(15.993.522.979,00)	93,32
3	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	206.399.000,00	(293.601.000,00)	41,28
4	Transfer	3.396.630.000,00	928.342.379,00	(2.468.287.621,00)	27,33
	Jumlah	952.460.290.264,39	870.168.392.236,00	(82.291.898.028,39)	91,36

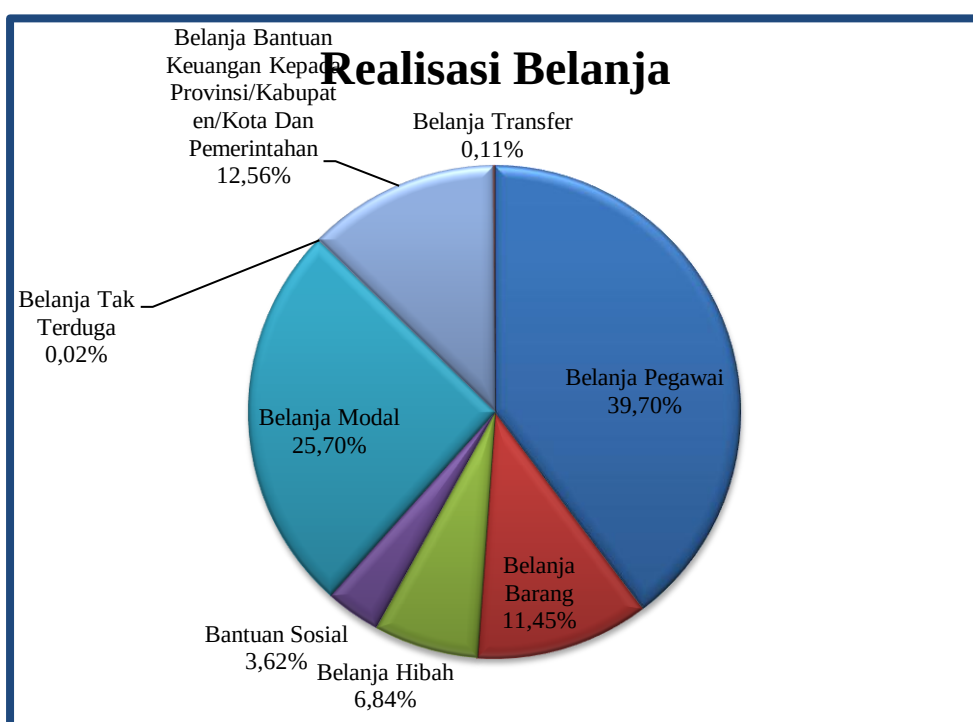
Berdasarkan tabel realisasi di atas, semua belanja terserap di bawah alokasi anggaran sehingga terdapat efisiensi 8,64% atas penghematan pemakaian dana dari berbagai kegiatan dan non kegiatan.

Gambar 7. Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2017



Berdasarkan grafik di atas, belanja terbesar dialokasikan untuk Belanja Operasi yaitu sebesar Rp645.439.132.102,00 atau 91,04% dari total Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe secara keseluruhan. Berikut perbandingan rincian realisasi belanja Tahun 2017 terhadap total belanja.

Gambar 8. Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2017





5.3.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi mencapai sebesar Rp645.439.132.102,00 atau 91,04%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp63.536.486.428,39 atau 8,96% dari anggaran sebesar Rp708.975.618.530,39. Rincian realisasi Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Rincian Belanja Operasi
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

^	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Belanja Pegawai	377.792.208.260,23	345.445.392.215,00	(32.346.816.045,23)	91,44
2	Belanja Barang	116.762.201.814,16	99.664.505.287,00	(17.097.696.527,16)	85,36
3	Belanja Hibah	63.974.944.125,00	59.525.325.773,00	(4.449.618.352,00)	93,04
4	Bantuan Sosial	35.892.792.327,00	31.480.613.809,00	4.412.178.518,00	87,71
5	Bantuan Keuangan	114.553.472.004,00	109.323.295.018,00	5.230.176.986,00	95,43
	Jumlah	708.975.618.530,39	645.439.132.102,00	(63.536.486.428,39)	91,04

5.3.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai sebesar Rp345.445.392.215,00 atau 91,44% sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp32.346.816.045,23 atau 8,56% dari anggaran sebesar Rp377.792.208.260,23. Rincian realisasi Belanja Pegawai terdiri dari :

Tabel 17. Rincian Belanja Pegawai
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Gaji Dan Tunjangan	282.362.935.967,23	262.249.340.171,00	(20.113.595.796,23)	92,88
2	Tambahan Penghasilan PNS	32.324.615.000,00	24.476.074.000,00	(7.848.541.000,00)	75,72
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH / WKDH	2.630.000.000,00	2.196.900.000,00	(433.100.000,00)	83,53
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.313.750.000,00	1.079.769.474,00	(233.980.526,00)	-
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	105.000.000,00	80.000.000,00	(25.000.000,00)	76,19
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	36.250.000,00	0,00	(36.250.000,00)	-
7	Honorarium PNS	10.459.318.233,00	9.673.630.070,00	(785.688.163,00)	92,49
8	Honorarium non PNS	43.136.527.700,00	40.941.225.200,00	(2.195.302.500,00)	94,91
9	Uang Lembur	38.320.000,00	10.240.000,00	(28.080.000,00)	26,72



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
10	Honorarium Pengelola Dana BOS	2.062.881.360,00	2.201.461.800,00	138.580.440,00	106,72
11	Belanja honorarium non pegawai	3.322.610.000,00	2.536.751.500,00	(785.858.500,00)	76,35
	Jumlah	377.792.208.260,23	345.445.392.215,00	(32.346.816.045,23)	91,44

Untuk Honorarium Pengelola Dana BOS berdasarkan RKAS yang telah digabungkan dari masing-masing sekolah dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 18. Belanja Pegawai BOS
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Uraian	SDN	SMPN	Jumlah
1	Honorarium PNS	836.286.000,00	420.455.000,00	1.256.741.000,00
2	Honorarium Non PNS	560.416.800,00	320.260.000,00	880.676.800,00
3	Uang Lembur	64.044.000,00	0,00	64.044.000,00
		1.460.746.800,00	740.715.000,00	2.201.461.800,00

Secara keseluruhan Honorarium Pengelola Dana BOS terealisasi sebesar Rp2.201.461.800,00 terdiri dari Honorarium PNS yang terealisasi sebesar Rp1.256.741.000.000,00 dimana untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) terealisasi sebesar Rp836.286.000,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebesar Rp420.455.000,00. Honorarium Non PNS terealisasi sebesar Rp880.676.800,00 terdiri dari Rp560.416.800,00 untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Rp320.260.000,00 untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Sedangkan untuk Uang Lembur terealisasi sebesar Rp64.044.000,00 pada Sekolah Dasar Negeri (SDN).

5.3.2.1.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang mencapai sebesar Rp99.664.505.287,00 dari anggaran sebesar Rp116.762.201.814,16 atau sebesar 85,36%. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 19. Rincian Belanja Barang
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Belanja bahan pakai habis	9.231.340.865,00	8.422.039.435,00	(809.301.430,00)	91,23
2	Belanja bahan / material	6.315.537.353,00	5.139.770.031,00	(1.175.767.322,00)	81,38



*Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe*

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
3	Belanja jasa kantor	39.251.844.088,00	30.443.828.700,00	(8.808.015.388,00)	77,56
4	Belanja premi asuransi	1.663.382.800,00	1.109.492.867,00	(553.889.933,00)	66,70
5	Belanja perawatan kendaraan bermotor	6.184.085.150,00	5.630.701.895,00	(553.383.255,00)	91,05
6	Belanja cetak dan penggandaan	4.375.986.972,16	3.807.738.533,00	(568.248.439,16)	87,01
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	2.283.910.000,00	2.161.832.728,00	(122.077.272,00)	94,65
8	Belanja sewa sarana mobilitas	315.200.000,00	310.000.000,00	(5.200.000,00)	98,35
9	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	701.320.000,00	659.017.059,00	(42.302.941,00)	93,97
10	Belanja makanan dan minuman	11.332.155.177,00	9.879.073.500,00	(1.453.081.677,00)	87,18
11	Belanja pakaian dinas dan atributnya	589.015.410,00	586.524.410,00	(2.491.000,00)	99,58
12	Belanja pakaian kerja	86.150.000,00	85.850.000,00	(300.000,00)	99,65
13	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.181.032.340,00	1.163.605.340,00	(17.427.000,00)	98,52
14	Belanja perjalanan dinas	13.453.178.001,00	12.712.436.140,00	(740.741.861,00)	94,49
15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
16	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	575.800.000,00	503.853.026,00	(71.946.974,00)	87,50
17	Belanja Pemeliharaan	4.108.434.742,00	3.508.097.785,00	(600.336.957,00)	85,39
18	Belanja Jasa Konsultasi	295.634.000,00	288.654.000,00	(6.980.000,00)	97,64
19	Belanja barang dan jasa Dana BOS	14.793.194.916,00	13.226.989.838,00	(1.566.205.078,00)	-
	Jumlah	116.762.201.814,16	99.664.505.287,00	(17.097.696.527,16)	85,36

Belanja barang dan jasa Dana BOS dapat dijelaskan pada tabel di berikut :

Tabel 20. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2017

No	Uraian	SDN	SMPN	Jumlah
1	Belanja Bahan Pakai Habis	2.472.850.444,00	1.365.404.175,00	3.838.254.619,00
2	Belanja Bahan/Material	434.607.201,00	233.633.738,00	668.240.939,00
3	Belanja Jasa Kantor	2.000.102.449,00	1.411.683.114,00	3.411.785.563,00
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.787.189.196,00	927.924.446,00	2.715.113.642,00
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-	-
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	-	300.000,00
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.430.700,00	16.350.000,00	51.780.700,00
8	Belanja Makanan Dan Minuman	1.144.844.500,00	581.439.000,00	1.726.283.500,00



No	Uraian	SDN	SMPN	Jumlah
9	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.100.000,00		2.100.000,00
10	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.100.000,00	9.212.000,00	39.312.000,00
11	Belanja Perjalanan Dinas	33.600.000,00	1.400.000,00	35.000.000,00
12	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	112.450.500,00	66.778.500,00	179.229.000,00
13	Belanja Pemeliharaan	284.596.675,00	216.418.200,00	501.014.875,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	18.525.000,00	40.050.000,00	58.575.000,00
		8.356.696.665,00	4.870.293.173,00	13.226.989.838,00

Belanja Barang dan jasa BOS terealisasi sebesar Rp13.226.989.838,00 terdiri dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rp8.356.696.665,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebesar Rp4.870.293.173,00.

5.3.2.1.3 Belanja Hibah

Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp63.974.944.125,00 terealisasi sebesar Rp59.525.325.773,00 atau 93,04% dari anggaran. Belanja Hibah tersebut terbagi menjadi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah/BUMD, Belanja Hibah kepada Lembaga/Organisasi yang berupa uang dan Belanja Hibah berupa barang/jasa pada SKPD.

5.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp230.000.000,00 terealisasi sebesar Rp230.000.000,00 atau 100% dari anggaran.

Tabel 21. Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	230.000.000,00	230.000.000,00	-	100,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terdiri dari Belanja hibah kepada Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe sebesar Rp170.000.000,00 dan Korem Lilawangasa Lhokseumawe sebesar Rp60.000.000,00.



5.1.2.1.3.2 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah/BUMD

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah/BUMD sebesar Rp1.446.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.446.000.000,00 atau 100% dari anggaran.

Tabel 22. Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah/BUMD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Hibah kepada Pemerintah daerah/BUMD	1.446.000.000,00	1.446.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	1.446.000.000,00	1.446.000.000,00	-	100,00

Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah/BUMD diberikan kepada PDAM Tirta Mon Pase Lhokseumawe.

5.1.2.1.3.3 Belanja Hibah kepada Lembaga/Organisasi

Realisasi Belanja Hibah kepada Lembaga/Organisasi terealisasi sebesar Rp5.389.200.000,00 atau 72,82% sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp2.011.800.000,00 atau 27,18% dari anggaran sebesar Rp7.401.000.000,00. Rincian realisasi Belanja Hibah kepada Lembaga/Organisasi terdiri dari :

Tabel 23. Rincian Belanja Hibah PPKD Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Badan KESBANG POL dan LINMAS	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
3	Dinas Kesehatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.616.000.000,00	2.764.200.000,00	(1.851.800.000,00)	59,88
5	Dinas Sosial	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
6	Bagian Humas	205.000.000,00	155.000.000,00	(50.000.000,00)	75,61
7	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata	2.185.000.000,00	2.075.000.000,00	(110.000.000,00)	94,97
	Jumlah	7.401.000.000,00	5.389.200.000,00	(2.011.800.000,00)	72,82

sedangkan rincian Belanja Hibah Barang pada SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Rincian Belanja Hibah SKPD Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	2.684.327.317,00	2.655.680.425,00	(28.646.892,00)	98,93
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	43.425.569.450,00	41.720.846.670,00	(1.704.722.780,00)	96,07



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.835.880.480,00	2.758.056.300,00	(77.824.180,00)	97,26
4	Dinas Lingkungan Hidup	233.717.500,00	99.500.000,00	(134.217.500,00)	42,57
5	Dinas Sosial	284.850.394,00	186.398.697,00	(98.451.697,00)	65,44
6	Sekretariat Daerah	1.057.371.500,00	919.080.000,00	(138.291.500,00)	86,92
7	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	4.361.177.484,00	4.106.213.681,00	(254.963.803,00)	94,15
8	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	15.050.000,00	14.350.000,00	(700.000,00)	95,35
	Jumlah	54.897.944.125,00	52.460.125.773,00	(2.437.818.352,00)	95,56

5.3.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp35.892.792.327,00 dari anggaran sebesar Rp31.480.613.809,00. Belanja Bantuan Sosial terdiri dari Belanja Bantuan Sosial berupa uang yang dikelola oleh PPKD terealisasi sebesar Rp11.863.520.130,00 dari anggaran sebesar Rp13.877.446.978,00 dan Belanja Bantuan Sosial berupa Barang pada SKPD terealisasi sebesar Rp19.617.093.679,00 dari anggaran sebesar Rp22.015.345.349,00. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial terdiri dari :

Tabel 25. Belanja Bantuan Sosial yang Dikelola oleh PPKD Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	706.665.778,00	706.600.000,00	(65.778,00)	99,99
2	Bagian Pembangunan	0,00	0,00	0,00	-
3	Bagian Perekonomian	2.280.960.000,00	2.280.960.000,00	0,00	100,00
4	Dinas Sosial	5.022.535.200,00	4.718.610.130,00	(303.925.070,00)	93,95
5	Sekretariat Baitul Mal	5.867.286.000,00	4.157.350.000,00	(1.709.936.000,00)	70,86
	Jumlah	13.877.446.978,00	11.863.520.130,00	(2.013.926.848,00)	85,49

sedangkan rincian Belanja Bantuan Sosial Barang pada SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Rincian Belanja Bantuan Sosial SKPD Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	94.740.000,00	94.738.000,00	(2.000,00)	100,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	356.572.250,00	347.312.850,00	(9.259.400,00)	97,40



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%
4	Dinas Sosial	8.023.995.399,00	7.158.778.679,00	(865.216.720,00)	89,22
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	626.897.100,00	413.707.550,00	(213.189.550,00)	65,99
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	27.428.000,00	26.968.000,00	(460.000,00)	98,32
7	Sekretariat Daerah	89.660.000,00	89.508.000,00	(152.000,00)	99,83
8	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	1.175.473.500,00	709.806.250,00	(465.667.250,00)	60,38
9	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	263.000.000,00	261.406.250,00	(1.593.750,00)	99,39
10	Sekretariat Baitul Mal	4.899.671.200,00	4.864.468.500,00	(35.202.700,00)	99,28
11	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	6.443.507.900,00	5.635.999.600,00	(807.508.300,00)	87,47
	Jumlah	22.015.345.349,00	19.617.093.679,00	(2.398.251.670,00)	89,11

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp109.323.295.018,00 atau 95,43% dari anggaran sebesar Rp114.553.472.004,00 yang terdiri dari :

Tabel 27. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Belanja bantuan keuangan kepada Desa (ADG)	58.157.597.803,00	54.176.052.429,00	(3.981.545.374,00)	93,15
2	Belanja bantuan keuangan kepada Desa (Dana Desa/DD)	55.925.874.201,00	54.679.330.666,00	(1.246.543.535,00)	97,77
3	Belanja bantuan kepada partai politik	470.000.000,00	467.911.923,00	(2.088.077,00)	99,56
	Jumlah	114.553.472.004,00	109.323.295.018,00	(5.230.176.986,00)	95,43

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp109.323.295.018,00 digunakan untuk Dana Alokasi Desa berupa Alokasi Dana Gampong (ADG) sebesar Rp54.176.052.429,00 dan Dana Desa (DD) sebesar Rp54.679.330.666,00. Sedangkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2017 sebesar Rp467.911.923,00 dari anggaran sebesar Rp470.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 28. Rincian Belanja Alokasi Dana Gampong (ADG)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
	I. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Alokasi Dana Gampong/ADG)				
	<u>Kecamatan Banda Sakti</u>				
1	Kuta Blang	668.628.222,00	665.628.222,00	(3.000.000,00)	99,55
2	Tumpok-Teungoh	829.389.892,00	825.389.892,00	(4.000.000,00)	99,52
3	Simpang Empat	593.831.474,00	470.390.419,00	(123.441.055,00)	79,21
4	Kp.Jawa Lhokseumawe	739.508.978,00	736.508.978,00	(3.000.000,00)	99,59
5	Kota Lhokseumawe	509.695.418,00	509.695.418,00	0,00	100,00
6	Mon geudong	837.190.285,00	822.990.285,00	(14.200.000,00)	98,30
7	Keude Aceh	727.387.013,00	724.387.013,00	(3.000.000,00)	99,59
8	Pusong Lama	844.344.312,00	841.344.312,00	(3.000.000,00)	99,64
9	Hagu Teungoh	729.696.646,00	726.413.948,00	(3.282.698,00)	99,55
10	Uteun Bayi	766.942.424,00	744.144.165,00	(22.798.259,00)	97,03
11	Ujong Blang	1.327.634.241,00	1.227.076.707,00	(100.557.534,00)	92,43
12	Hagu Selatan	649.392.238,00	618.242.238,00	(31.150.000,00)	95,20
13	Pusong Baru	681.043.857,00	678.543.857,00	(2.500.000,00)	99,63
14	Ulee Jalan	830.181.819,00	717.347.960,00	(112.833.859,00)	86,41
15	Banda Masen	734.664.797,00	441.705.204,00	(292.959.593,00)	60,12
16	Lancang Garam	544.994.174,00	544.994.174,00	0,00	100,00
17	Kp. Jawa Baru	620.583.461,00	602.583.461,00	(18.000.000,00)	97,10
18	Hagu Barat Laut	661.790.453,00	658.790.453,00	(3.000.000,00)	99,55
	Jumlah	13.296.899.704,00	12.556.176.706,00	(740.722.998,00)	94,43
	<u>Kecamatan Muara Dua</u>			0,00	
1	Alue Awe	710.749.441,00	661.710.813,00	(49.038.628,00)	93,10
2	Blang Crum	706.106.658,00	620.654.835,00	(85.451.823,00)	87,90
3	Cut Mamplam	665.605.308,00	643.312.528,00	(22.292.780,00)	96,65
4	Meunasah Mee	680.853.435,00	669.153.435,00	(11.700.000,00)	98,28
5	Cot Girek Kandang	776.801.482,00	725.772.960,00	(51.028.522,00)	93,43
6	Keude Cunda	547.972.869,00	543.401.960,00	(4.570.909,00)	99,17
7	Uteunkot	895.626.377,00	863.576.377,00	(32.050.000,00)	96,42
8	Lhok Mon Puteh	679.552.687,00	679.552.687,00	0,00	100,00
9	Meunasah Mesjid	879.408.867,00	870.408.867,00	(9.000.000,00)	98,98
10	Meunasah Panggoi	810.305.204,00	638.011.400,00	(172.293.804,00)	78,74
11	Paya Bili	645.972.513,00	645.972.513,00	0,00	100,00
12	Meunasah Alue	963.284.445,00	962.111.960,00	(1.172.485,00)	99,88
13	Paya Punteuet	767.463.532,00	764.441.577,00	(3.021.955,00)	99,61
14	Blang Poroh	739.499.986,00	723.650.370,00	(15.849.616,00)	97,86
15	Meunasah Manyang	751.867.412,00	722.887.960,00	(28.979.452,00)	96,15
16	Meunasah Blang	695.170.728,00	678.268.014,00	(16.902.714,00)	97,57
17	Paloh Batee	680.125.386,00	679.687.960,00	(437.426,00)	99,94
	Jumlah	12.596.366.330,00	12.092.576.216,00	(503.790.114,00)	96,00
	<u>Kecamatan Muara Satu</u>				



Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Ujong Pacu	838.620.564,00	827.668.092,00	(10.952.472,00)	98,69
2	Padang Sakti	756.021.531,00	756.021.531,00	0,00	100,00
3	Cot Trieng	706.136.997,00	696.716.973,00	(9.420.024,00)	98,67
4	Blang Naleung Mameh	717.398.887,00	701.510.137,00	(15.888.750,00)	97,79
5	Paloh Punti	1.055.591.551,00	514.842.960,00	(540.748.591,00)	48,77
6	Batuphat Barat	1.221.130.740,00	1.150.730.740,00	(70.400.000,00)	94,23
7	Blang Pulo	1.078.865.883,00	1.073.555.883,00	(5.310.000,00)	99,51
8	Meuria Paloh	822.018.626,00	776.118.626,00	(45.900.000,00)	94,42
9	Batuphat Timur	998.765.373,00	998.765.373,00	0,00	100,00
10	Meunasah Dayah	949.112.707,00	928.112.707,00	(21.000.000,00)	97,79
11	Blang Panyang	817.833.725,00	288.752.960,00	(529.080.765,00)	35,31
	Jumlah	9.961.496.584,00	8.712.795.982,00	(1.248.700.602,00)	87,46
	<u>Kecamatan Blang Mangat</u>				
1	Teungoh	540.399.189,00	540.399.189,00	0,00	100,00
2	Kuala	608.066.184,00	551.763.060,00	(56.303.124,00)	90,74
3	Seuneubok	587.726.823,00	584.922.947,00	(2.803.876,00)	99,52
4	Baloy	537.141.677,00	500.441.176,00	(36.700.501,00)	93,17
5	Mesjid Punteuet	823.827.791,00	555.944.800,00	(267.882.991,00)	67,48
6	Jambo Mesjid	613.483.317,00	607.583.317,00	(5.900.000,00)	99,04
7	Rayeuk Kareung	745.583.538,00	728.573.538,00	(17.010.000,00)	97,72
8	Blang Weu Baroh	779.700.205,00	772.621.156,00	(7.079.049,00)	99,09
9	Mane Kareung	698.270.471,00	477.372.960,00	(220.897.511,00)	68,37
10	Blang Buloh	804.079.870,00	804.079.870,00	0,00	100,00
11	Jambo Timu	577.003.901,00	577.003.901,00	0,00	100,00
12	Jeulikat	879.463.753,00	865.140.979,00	(14.322.774,00)	98,37
13	Asan Kareung	631.846.435,00	627.701.140,00	(4.145.295,00)	99,34
14	Blang Punteuet	598.151.279,00	598.151.279,00	0,00	100,00
15	Blang Cut	627.913.829,00	623.913.829,00	(4.000.000,00)	99,36
16	Keude Punteuet	499.130.321,00	483.681.242,00	(15.449.079,00)	96,90
17	Tunong	587.237.216,00	480.853.359,00	(106.383.857,00)	81,88
18	Alue Liem	914.098.091,00	914.098.091,00	0,00	100,00
19	Ulee Blang Mane	642.436.367,00	428.672.960,00	(213.763.407,00)	66,73
20	Blang Teue	518.317.902,00	516.172.960,00	(2.144.942,00)	99,59
21	Kumbang Punteuet	532.628.908,00	223.622.960,00	(309.005.948,00)	41,98
22	Blang Weu Panjoe	668.284.858,00	463.745.552,00	(204.539.306,00)	69,39
	Jumlah	14.414.791.925,00	12.926.460.265,00	(1.488.331.660,00)	89,67
	Jumlah I	50.269.554.543,00	46.288.009.169,00	(3.981.545.374,00)	92,08
	II. Kurang Bayar Dana Alokasi Gampong Tahun 2016				
	<u>Kecamatan Banda Sakti:</u>				
1	Kuta Blang	91.280.000,00	91.280.000,00	0,00	100,00
2	Tumpok Teungoh	114.340.000,00	114.340.000,00	0,00	100,00
3	Simpang Empat	173.785.000,00	173.785.000,00	0,00	100,00
4	Kp. Jawa Lhokseumawe	101.250.000,00	101.250.000,00	0,00	100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
5	Kota Lhokseumawe	67.980.000,00	67.980.000,00	0,00	100,00
6	Mon Geudong	121.699.000,00	121.699.000,00	0,00	100,00
7	Keude Aceh	90.400.000,00	90.400.000,00	0,00	100,00
8	Pusong Lama	105.875.000,00	105.875.000,00	0,00	100,00
9	Hagu Teungoh	97.150.000,00	97.150.000,00	0,00	100,00
10	Uteun Bayi	91.868.650,00	91.868.650,00	0,00	100,00
11	Ujong Blang	247.002.000,00	247.002.000,00	0,00	100,00
12	Hagu selatan	182.061.000,00	182.061.000,00	0,00	100,00
13	Pusong Baru	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	100,00
14	Ulee Jalan	181.900.000,00	181.900.000,00	0,00	100,00
15	Banda Masen	90.200.000,00	90.200.000,00	0,00	100,00
16	Lancang Garam	77.850.000,00	77.850.000,00	0,00	100,00
17	Kp. Jawa Baru	133.650.000,00	133.650.000,00	0,00	100,00
18	Hagu Barat Laut	92.640.000,00	92.640.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	2.152.430.650,00	2.152.430.650,00	0,00	100,00
	<u>Kecamatan Muara Dua</u>				
1	Alue Awe	110.150.000,00	110.150.000,00	0,00	100,00
2	Blang Crum	447.684.583,00	447.684.583,00	0,00	100,00
3	Cut Mamplam	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	100,00
4	Meunasah Mee	118.016.538,00	118.016.538,00	0,00	100,00
5	Cot Girek Kandang	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	100,00
6	Keude Cunda	107.850.000,00	107.850.000,00	0,00	100,00
7	Uteunkot	138.386.000,00	138.386.000,00	0,00	100,00
8	Lhok Mon Puteh	161.055.000,00	161.055.000,00	0,00	100,00
9	Meunasah Mesjid	111.050.000,00	111.050.000,00	0,00	100,00
10	Meunasah Panggoi	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	100,00
11	Paya Bili	68.975.000,00	68.975.000,00	0,00	100,00
12	Meunasah Alue	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	100,00
13	Paya Punteuet	84.158.125,00	84.158.125,00	0,00	100,00
14	Blang Poroh	68.292.500,00	68.292.500,00	0,00	100,00
15	Meunasah Manyang	161.743.750,00	161.743.750,00	0,00	100,00
16	Meunasah Blang	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	100,00
17	Paloh Batee	82.695.000,00	82.695.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	2.160.996.496,00	2.160.996.496,00	0,00	100,00
	<u>Kecamatan Muara Satu</u>				
1	Ujong Pacu	122.850.000,00	122.850.000,00	0,00	100,00
2	Padang Sakti	115.750.000,00	115.750.000,00	0,00	100,00
3	Cot Trieng	156.824.024,00	156.824.024,00	0,00	100,00
4	Blang Naleung Mameh	105.913.750,00	105.913.750,00	0,00	100,00
5	Paloh Punti	113.450.000,00	113.450.000,00	0,00	100,00
6	Batuphat Barat	115.290.000,00	115.290.000,00	0,00	100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
7	Blang Pulo	102.214.000,00	102.214.000,00	0,00	100,00
8	Meuria Paloh	167.073.688,00	167.073.688,00	0,00	100,00
9	Batuphat Timur	164.311.250,00	164.311.250,00	0,00	100,00
10	Meunasah Dayah	165.310.000,00	165.310.000,00	0,00	100,00
11	Blang Panyang	100.050.000,00	100.050.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	1.429.036.712,00	1.429.036.712,00	0,00	100,00
	<u>Kecamatan Blang Mangat</u>				
1	Teungoh	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	100,00
2	Kuala	160.650.000,00	160.650.000,00	0,00	100,00
3	Seuneubok	72.370.000,00	72.370.000,00	0,00	100,00
4	Baloy	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	100,00
5	Mesjid Punteuet	84.300.000,00	84.300.000,00	0,00	100,00
6	Jambo Mesjid	87.750.000,00	87.750.000,00	0,00	100,00
7	Rayeuk Kareung	77.150.000,00	77.150.000,00	0,00	100,00
8	Blang Weu Baroh	84.890.000,00	84.890.000,00	0,00	100,00
9	Mane Kareung	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	100,00
10	Blang Buloh	84.095.000,00	84.095.000,00	0,00	100,00
11	Jambo Timu	70.550.000,00	70.550.000,00	0,00	100,00
12	Jeulikat	81.150.000,00	81.150.000,00	0,00	100,00
13	Asan Kareung	85.450.000,00	85.450.000,00	0,00	100,00
14	Blang Punteuet	76.950.000,00	76.950.000,00	0,00	100,00
15	Blang Cut	68.850.000,00	68.850.000,00	0,00	100,00
16	Keude Punteuet	252.586.750,00	252.586.750,00	0,00	100,00
17	Tunong	75.250.000,00	75.250.000,00	0,00	100,00
18	Alue Liem	82.660.000,00	82.660.000,00	0,00	100,00
19	Ulee Blang Mane	203.807.691,00	203.807.691,00	0,00	100,00
20	Blang Teue	140.303.606,00	140.303.606,00	0,00	100,00
21	Kumbang Punteuet	77.566.355,00	77.566.355,00	0,00	100,00
22	Blang Weu Panjoe	79.650.000,00	79.650.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	2.145.579.402,00	2.145.579.402,00	0,00	100,00
	Jumlah II	7.888.043.260,00	7.888.043.260,00	0,00	100,00
	Jumlah I dan II	58.157.597.803,00	54.176.052.429,00	(3.981.545.374,00)	93,15

Tabel 29. Rincian Belanja Dana Desa (DD)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
	<u>Kecamatan Banda Sakti</u>				
1	Kuta Blang	793.738.155,00	793.738.155,00	0,00	100,00
2	Tumpok Teungoh	880.835.474,00	880.835.474,00	0,00	100,00
3	Simpang Empat	786.749.838,00	472.049.903,00	(314.699.935,00)	60,00
4	Kp. Jawa Lhokseumawe	869.936.714,00	869.936.714,00	0,00	100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
5	Kota Lhokseumawe	763.077.553,00	763.077.553,00	0,00	100,00
6	Mon Geudong	849.486.271,00	849.486.271,00	0,00	100,00
7	Keude Aceh	809.791.825,00	809.791.825,00	0,00	100,00
8	Pusong Lama	837.852.549,00	837.852.549,00	0,00	100,00
9	Hagu Teungoh	845.577.268,00	507.346.361,00	(338.230.907,00)	60,00
10	Uteun Bayi	836.534.682,00	836.534.682,00	0,00	100,00
11	Ujong Blang	1.006.085.599,00	1.006.085.599,00	0,00	100,00
12	Hagu selatan	828.527.183,00	828.527.183,00	0,00	100,00
13	Pusong Baru	800.414.421,00	800.414.421,00	0,00	100,00
14	Ulee Jalan	839.263.732,00	503.558.239,00	(335.705.493,00)	60,00
15	Banda Masen	810.862.820,00	810.862.820,00	0,00	100,00
16	Lancang Garam	741.386.387,00	741.386.387,00	0,00	100,00
17	Kp. Jawa Baru	775.028.420,00	775.028.420,00	0,00	100,00
18	Hagu Barat Laut	802.172.793,00	802.172.793,00	0,00	100,00
19	Kurang Transfer Alokasi Dana Desa (DD) untuk Gp. Keude Aceh Kec. Banda Sakti	257.907.200,00	-	(257.907.200,00)	-
		15.135.228.884,00	13.888.685.349,00	(1.246.543.535,00)	91,76
	<u>Kecamatan Muara Dua</u>				
1	Alue Awe	804.599.461,00	804.599.461,00	0,00	100,00
2	Blang Crum	822.848.182,00	822.848.182,00	0,00	100,00
3	Cut Mamplam	785.505.503,00	785.505.503,00	0,00	100,00
4	Meunasah Mee	802.445.785,00	802.445.785,00	0,00	100,00
5	Cot Girek Kandang	809.929.505,00	809.929.505,00	0,00	100,00
6	Keude Cunda	768.614.120,00	768.614.120,00	0,00	100,00
7	Uteunkot	868.346.959,00	868.346.959,00	0,00	100,00
8	Lhok Mon Puteh	795.542.854,00	795.542.854,00	0,00	100,00
9	Meunasah Mesjid	841.485.566,00	841.485.566,00	0,00	100,00
10	Meunasah Panggoi	855.308.816,00	855.308.816,00	0,00	100,00
11	Paya Bili	797.909.613,00	797.909.613,00	0,00	100,00
12	Meunasah Alue	877.075.029,00	877.075.029,00	0,00	100,00
13	Paya Punteuet	828.607.905,00	828.607.905,00	0,00	100,00
14	Blang Poroh	836.054.436,00	836.054.436,00	0,00	100,00
15	Meunasah Manyang	830.913.968,00	830.913.968,00	0,00	100,00
16	Meunasah Blang	822.972.180,00	822.972.180,00	0,00	100,00
17	Paloh Batee	805.794.371,00	805.794.371,00	0,00	100,00
	Jumlah	13.953.954.253,00	13.953.954.253,00	0,00	100,00
	<u>Kecamatan Muara Satu</u>				
1	Batuphat Barat	936.981.646,00	936.981.646,00	0,00	100,00
2	Ujong Pacu	810.750.024,00	810.750.024,00	0,00	100,00
3	Blang Naleung Mameh	821.454.753,00	821.454.753,00	0,00	100,00
4	Batuphat Timur	877.267.784,00	877.267.784,00	0,00	100,00
5	Blang Pulo	910.711.741,00	910.711.741,00	0,00	100,00
6	Padang Sakti	811.135.492,00	811.135.492,00	0,00	100,00
7	Cot Trieng	806.233.473,00	806.233.473,00	0,00	100,00



*Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe*

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
8	Paloh Punti	905.650.570,00	905.650.570,00	0,00	100,00
9	Meunasah Dayah	870.508.723,00	870.508.723,00	0,00	100,00
10	Meuria Paloh	822.725.463,00	822.725.463,00	0,00	100,00
11	Blang Panyang	848.603.543,00	848.603.543,00	0,00	100,00
	Jumlah	9.422.023.212,00	9.422.023.212,00	0,00	100,00
	<u>Kecamatan Blang Mangat</u>				
1	Kuala	796.227.102,00	796.227.102,00	0,00	100,00
2	Blang Cut	792.127.512,00	792.127.512,00	0,00	100,00
3	Jambo Mesjid	789.945.287,00	789.945.287,00	0,00	100,00
4	Jambo Timu	775.942.030,00	775.942.030,00	0,00	100,00
5	Tunong	772.233.478,00	772.233.478,00	0,00	100,00
6	Blang Teue	766.252.444,00	766.252.444,00	0,00	100,00
7	Teungoh	775.517.318,00	775.517.318,00	0,00	100,00
8	Baloy	767.280.156,00	767.280.156,00	0,00	100,00
9	Mane Kareung	789.836.549,00	789.836.549,00	0,00	100,00
10	Asan Kareung	784.729.122,00	784.729.122,00	0,00	100,00
11	Blang Punteuet	766.830.479,00	766.830.479,00	0,00	100,00
12	Kumbang Punteuet	766.596.564,00	766.596.564,00	0,00	100,00
13	Mesjid Punteuet	840.779.937,00	840.779.937,00	0,00	100,00
14	Ulee Blang Mane	781.748.843,00	781.748.843,00	0,00	100,00
15	Keude Punteuet	749.019.105,00	749.019.105,00	0,00	100,00
16	Alue Liem	846.338.635,00	846.338.635,00	0,00	100,00
17	Blang Buloh	829.428.366,00	829.428.366,00	0,00	100,00
18	Blang Weu Panjoe	779.951.053,00	779.951.053,00	0,00	100,00
19	Jeulikat	841.634.811,00	841.634.811,00	0,00	100,00
20	Blang Weu Baroh	812.720.302,00	812.720.302,00	0,00	100,00
21	Seuneubok	782.229.165,00	782.229.165,00	0,00	100,00
22	Rayeuk Kareung	807.299.594,00	807.299.594,00	0,00	100,00
	Jumlah	17.414.667.852,00	17.414.667.852,00	0,00	100,00
	Total	55.925.874.201,00	54.679.330.666,00	(1.246.543.535,00)	97,77

Tabel 30. Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	470.000.000,00			
1	Partai Aceh		207.039.864,00		
2	Partai Golkar		34.593.804,00		
3	Partai Amanat Nasional (PAN)		42.340.149,00		
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)		39.104.334,00		
5	Partai NasDem		42.686.610,00		



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
6	Partai Hanura		10.714.143,00		
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		29.148.483,00		
8	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		20.637.309,00		
9	Partai Demokrat		41.647.227,00		
	Jumlah	470.000.000,00	467.911.923,00	(2.088.077,00)	99,56

5.3.2.2. Belanja Modal

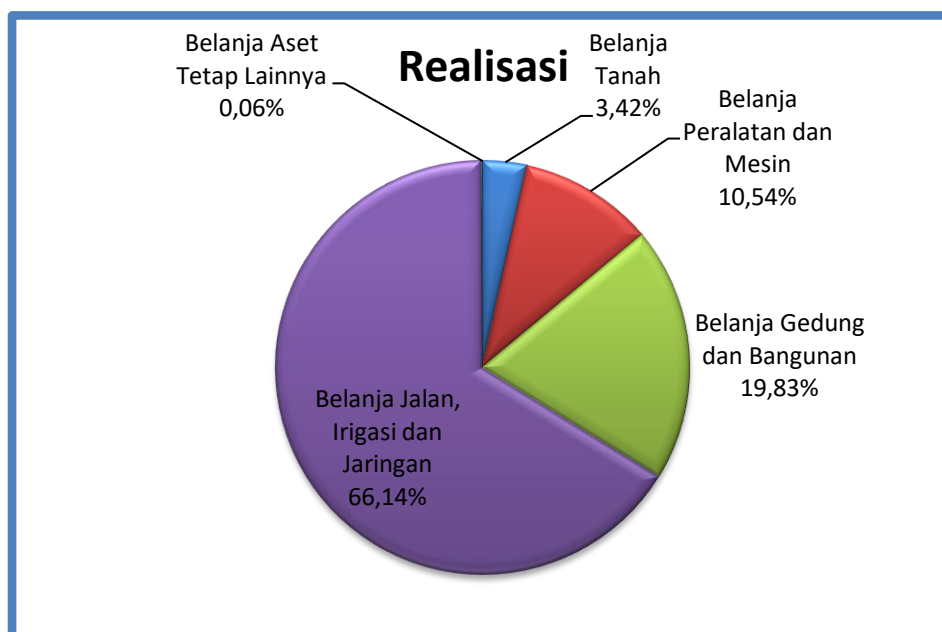
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp223.594.518.755,00 atau efisiensi sebesar Rp15.993.522.979,00 dari anggaran sebesar Rp239.588.041.734,00.

Tabel 31. Rincian Belanja Modal Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Belanja Tanah	8.296.630.995,00	7.657.161.155,00	639.469.840,00	92,29
2	Belanja Peralatan dan Mesin	24.380.217.149,00	23.572.905.862,00	807.311.287,00	96,69
3	Belanja Gedung dan Bangunan	46.955.964.270,00	44.348.598.500,00	2.607.365.770,00	94,45
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	159.753.219.820,00	147.877.598.738,00	11.875.621.082,00	92,57
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	202.009.500,00	138.254.500,00	63.755.000,00	68,44
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	239.588.041.734,00	223.594.518.755,00	15.993.522.979,00	93,32

Belanja Modal terealisasi sebesar 93,32% dari anggaran Belanja Modal sedangkan realisasi Belanja Modal dibandingkan dari total belanja dan transfer telah mencapai 25,69%. Berikut ini disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2017 :

Gambar 9. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017



5.3.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.657.161.155,00 atau 92,29% dari anggaran sebesar Rp8.296.630.995,00 lebih rendah sebesar Rp639.469.840,00 atau 7,70%. Belanja Modal Tanah Tahun 2017 terdiri dari :

Tabel 30. Rincian Belanja Modal Tanah Tahun2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan Tambak	10.055.500,00	9.970.000,00	(85.500,00)	99,15
2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	96.761.590,00	83.644.000,00	(13.117.590,00)	86,44
3	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.022.657.455,00	2.009.808.005,00	(12.849.450,00)	99,36
4	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	337.380.000,00	132.500.000,00	(204.880.000,00)	39,27
5	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	12.820.000,00	12.820.000,00	0,00	100,00
6	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	4.928.779.200,00	4.520.241.900,00	(408.537.300,00)	91,71
7	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	888.177.250,00	888.177.250,00	0,00	100,00
	Jumlah	8.296.630.995,00	7.657.161.155,00	(639.469.840,00)	92,29



5.3.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencapai sebesar Rp23.572.905.862,00 atau 96,69% dari anggaran sebesar Rp24.380.217.149,00. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari :

Tabel 31. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Belanja modal pengadaan alat-alat bantu	5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00
2	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	6.022.432.209,00	5.524.713.296,00	497.718.913,00	91,74
3	Belanja modal pengadaan alat bengkel tak bermesin	872.500,00	872.500,00	0,00	100,00
4	Belanja modal pengadaan alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan	483.499.586,00	475.905.904,00	7.593.682,00	98,43
5	Belanja modal pengadaan alat kantor	6.662.000.834,00	7.877.117.037,00	(1.215.116.203,00)	118,24
6	Belanja modal pengadaan alat rumah tangga	2.983.364.053,00	2.834.868.078,00	148.495.975,00	95,02
7	Belanja modal pengadaan komputer	2.912.094.579,00	2.539.188.881,00	372.905.698,00	87,19
8	Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat	65.772.150,00	60.172.150,00	5.600.000,00	91,49
9	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	172.353.050,00	155.912.800,00	16.440.250,00	90,46
10	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	25.000.000,00	24.925.000,00	75.000,00	99,70
11	Belanja modal pengadaan alat kedokteran	2.571.646.566,00	2.260.545.966,00	311.100.600,00	87,90
11	Belanja modal pengadaan unit-unit laboratorium	71.120.000,00	0,00	71.120.000,00	-
12	Belanja modal pengadaan alat peraga/praktek sekolah	2.186.335.872,00	1.614.093.000,00	572.242.872,00	73,83
13	Belanja modal pengadaan alat keamanan dan perlindungan	218.725.750,00	199.691.250,00	19.034.500,00	91,30
	Jumlah	24.380.217.149,00	23.572.905.862,00	807.311.287,00	96,69

Untuk belanja modal BOS di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tercatat dalam belanja modal pengadaan alat kantor lainnya. Rincian belanja modal BOS menurut RKAS gabungan masing-masing sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :



Belanja Modal Dana BOS dapat dijelaskan pada tabel di berikut :

Tabel 32. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2017

No	Uraian	SDN	SMPN	Jumlah
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	194.432.000,00	114.590.527,00	309.022.527,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	214.823.000,00	150.210.000,00	365.033.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	182.467.000,00	122.670.000,00	305.137.000,00
4	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat/Lemari	674.653.500,00	332.625.000,00	1.007.278.500,00
5	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	71.180.000,00	24.320.000,00	95.500.000,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	-	8.960.000,00	8.960.000,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	5.400.000,00	123.998.500,00	129.398.500,00
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.373.675,00	45.585.700,00	82.959.375,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.869.172.960,00	728.644.100,00	2.597.817.060,00
10	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	182.379.400,00	918.000,00	183.297.400,00
11	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	31.635.000,00	3.270.000,00	34.905.000,00
		3.463.516.535,00	1.655.791.827,00	5.119.308.362,00

Secara keseluruhan Belanja Modal Dana BOS terealisasi sebesar Rp5.119.308.362,00, terdiri dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rp3.463.516.535,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebesar Rp1.655.791.827,00.

5.3.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp44.348.598.500,00 atau 94,45% dari anggaran sebesar Rp46.955.964.270,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari :

Tabel 32.Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor	15.043.059.656,00	13.476.211.834,00	(1.566.847.822,00)	89,58
2	Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat ibadah	590.330.698,00	585.185.650,00	(5.145.048,00)	99,13



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
3	Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat pertemuan	4.182.062.500,00	4.069.005.700,00	(113.056.800,00)	97,30
4	Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan	8.299.905.068,00	8.150.092.965,00	(149.812.103,00)	98,20
5	Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat olah raga	993.112.654,00	985.561.976,00	(7.550.678,00)	99,24
6	Belanja modal pengadaan bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar	10.436.260.608,00	10.019.741.314,00	(416.519.294,00)	96,01
7	Belanja modal pengadaan bangunan gedung untuk pos jaga	36.360.000,00	36.359.000,00	(1.000,00)	100,00
8	Belanja modal pengadaan bangunan gedung garasi/pool	124.149.250,00	123.955.250,00	(194.000,00)	99,84
9	Belanja modal pengadaan bangunan gedung pabrik	135.042.500,00	134.962.500,00	(80.000,00)	99,94
10	Belanja modal pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandar	1.516.426.000,00	1.290.463.700,00	(225.962.300,00)	85,10
11	Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya	3.653.232.726,00	3.541.524.501,00	(111.708.225,00)	96,94
12	Belanja modal pengadaan bangunan flat/rumah susun	90.000.000,00	89.860.000,00	(140.000,00)	99,84
13	Belanja modal pengadaan bangunan bersejarah	1.286.093.700,00	1.278.234.200,00	(7.859.500,00)	99,39
14	Belanja Modal Pengadaan bangunan tugu/tanda batas	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	100,00
15	Belanja modal pengadaan bangunan rambu tidak bersuar	563.478.910,00	560.989.910,00	(2.489.000,00)	99,56
	Jumlah	46.955.964.270,00	44.348.598.500,00	(2.607.365.770,00)	94,45

5.3.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp147.877.598.738,00 atau 92,57% dari anggaran sebesar Rp159.753.219.820,00. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari :

Tabel 33. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Belanja modal pengadaan jalan	111.708.658.683,00	109.409.789.423,00	(2.298.869.260,00)	97,94
2	Belanja modal pengadaan jembatan	10.612.137.500,00	10.430.540.500,00	(181.597.000,00)	98,29



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
3	Belanja modal pengadaan jaringan air irigasi	85.201.600,00	84.840.000,00	(361.600,00)	99,58
4	Belanja modal pengadaan bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana	26.876.977.150,00	18.288.715.865,00	(8.588.261.285,00)	68,05
5	Belanja modal pengadaan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	60.000.000,00	57.000.000,00	(3.000.000,00)	95,00
6	Belanja modal pengadaan bangunan air bersih/baku	235.893.000,00	146.952.500,00	(88.940.500,00)	62,30
7	Belanja modal pengadaan bangunan air kotor	5.612.224.200,00	5.233.609.250,00	(378.614.950,00)	93,25
8	Belanja modal pengadaan bangunan air	210.523.400,00	60.373.400,00	(150.150.000,00)	28,68
9	Belanja modal pengadaan instalasi air minum/air bersih	3.872.006.287,00	3.709.871.000,00	(162.135.287,00)	95,81
10	Belanja modal pengadaan instalasi air kotor	403.500.000,00	384.815.000,00	(18.685.000,00)	95,37
11	Belanja modal pengadaan instalasi pembangkit listrik	29.510.000,00	29.503.800,00	(6.200,00)	99,98
12	Belanja modal pengadaan instalasi gardu listrik	25.788.000,00	25.788.000,00	0,00	100,00
13	Belanja modal pengadaan jaringan listrik	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00
14	Belanja modal pengadaan jaringan telepon	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	-
	Jumlah	159.753.219.820,00	147.877.598.738,00	(11.875.621.082,00)	92,57

5.3.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp138.254.500,00 atau 68,44% dari anggaran sebesar Rp202.009.500,00. Belanja Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

Tabel 34. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Belanja modal pengadaan buku / kepustakaan	7.280.000,00	5.000.000,00	(2.280.000,00)	68,68
2	Belanja modal pengadaan barang bercorak kebudayaan	176.590.000,00	115.340.000,00	(61.250.000,00)	65,32
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
4	Belanja modal pengadaan hewan / ternak dan tanaman	16.139.500,00	15.914.500,00	(225.000,00)	98,61
	Jumlah	202.009.500,00	138.254.500,00	(63.755.000,00)	68,44

5.3.2.3. Belanja Tak Terduga

Anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi Rp206.399.000,00. Rincian realisasi belanja tak terduga adalah sebagai berikut :

1. Bantuan kepada masyarakat korban bencana kebakaran, angin puting beliung, tanah longsor dan besaran bantuan logistik serta tim reaksi cepat penanggulangan bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 337 Tahun 2017 sebesar Rp. 100.146.000,00. Terdapat pengembalian dana bantuan (Contra pos) yaitu setoran pengembalian uang sisa pembayaran bantuan kepada masyarakat musibah kebakaran di gampong Pusong Lama an. Irwansyah sebesar Rp. 3.000.000,00 dari dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017 tanggal setoran 11 Agustus 2017 terhadap dana penyaluran SP2D Nomor 0248/TL/LS/2017.
2. Bantuan kepada masyarakat korban bencana dan besaran bantuan logistik serta bantuan tim reaksi cepat penanggulangan bencana Kota Lhokseumawe, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawee Nomor 528 Tahun 2017 sebesar Rp. 109.253.000,00.

5.3.2.4. Belanja Transfer

Realisasi Belanja transfer terealisasi sebesar Rp928.342.379,00 atau 27,33% dari anggaran sebesar Rp3.396.630.000,00. Belanja Transfer terdiri dari :

Tabel 35. Rincian Belanja Transfer Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	2.886.250.000,00	788.849.008,00	2.097.400.992,00	27,33
2	Transferi Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa	510.380.000,00	139.493.371,00	370.886.629,00	27,33
	Jumlah	3.396.630.000,00	928.342.379,00	2.468.287.621,00	27,33



5.1.2.4.1 Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa

Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp788.849.008,00 atau 27,33% dari anggaran sebesar Rp2.886.250.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 36. Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
	<u>Kecamatan Banda Sakti</u>				
1	Kuta Blang	112.098.777,39	56.049.388,00	(56.049.389,39)	50,00
2	Tumpok-Teungoh	59.469.096,01	29.734.548,00	(29.734.548,01)	50,00
3	Simpang Empat	97.979.258,77	-	(97.979.258,77)	-
4	Kp.Jawa Lhokseumawe	79.401.302,17	39.700.651,00	(39.700.651,17)	50,00
5	Kota Lhokseumawe	97.804.745,75	48.902.372,00	(48.902.373,75)	50,00
6	Mon geudong	58.053.240,18	29.026.620,00	(29.026.620,18)	50,00
7	Keude Aceh	42.788.270,70	21.394.135,00	(21.394.135,70)	50,00
8	Pusong Lama	29.785.955,60	-	(29.785.955,60)	-
9	Hagu Teungoh	72.793.561,39	36.396.780,00	(36.396.781,39)	50,00
10	Uteun Bayi	44.844.230,64	22.422.115,00	(22.422.115,64)	50,00
11	Ujong Blang	35.140.236,78	17.570.118,00	(17.570.118,78)	50,00
12	Hagu Selatan	45.502.731,37	-	(45.502.731,37)	-
13	Pusong Baru	34.048.770,73	17.024.385,00	(17.024.385,73)	50,00
14	Ulee Jalan	29.185.466,63	-	(29.185.466,63)	-
15	Banda Masen	35.436.254,01	-	(35.436.254,01)	-
16	Lancang Garam	56.918.307,56	28.459.153,00	(28.459.154,56)	50,00
17	Kp. Jawa Baru	50.651.501,28	-	(50.651.501,28)	-
18	Hagu Barat Laut	35.940.222,21	17.970.111,00	(17.970.111,21)	50,00
	Jumlah	1.017.841.929,17	364.650.376,00	(653.191.553,17)	35,83
	<u>Kecamatan Muara Dua</u>				
1	Alue Awe	37.972.486,00	18.986.243,00	(18.986.243,00)	50,00
2	Blang Crum	32.236.907,00	-	(32.236.907,00)	-
3	Cut Mamplam	31.863.653,00	-	(31.863.653,00)	-
4	Meunasah Mee	35.455.189,00	-	(35.455.189,00)	-
5	Cot Girek Kandang	35.940.018,00	-	(35.940.018,00)	-
6	Keude Cunda	43.061.066,00	-	(43.061.066,00)	-
7	Uteunkot	82.608.216,00	-	(82.608.216,00)	-
8	Lhok Mon Puteh	27.177.797,00	-	(27.177.797,00)	-
9	Meunasah Mesjid	55.665.723,00	27.832.861,00	(27.832.862,00)	50,00
10	Meunasah Panggoi	61.203.431,00	-	(61.203.431,00)	-
11	Paya Bili	26.214.997,00	-	(26.214.997,00)	-
12	Meunasah Alue	30.785.087,00	-	(30.785.087,00)	-
13	Paya Punteuet	33.894.542,00	-	(33.894.542,00)	-
14	Blang Poroh	27.195.896,00	-	(27.195.896,00)	-



Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
15	Meunasah Manyang	28.904.414,00	14.452.207,00	(14.452.207,00)	50,00
16	Meunasah Blang	29.554.612,00	-	(29.554.612,00)	-
17	Paloh Batee	26.579.627,00	-	(26.579.627,00)	-
	Jumlah	646.313.661,00	61.271.311,00	(585.042.350,00)	9,48
	<u>Kecamatan Muara Satu</u>				
1	Batuphat Barat	30.767.068,26	15.383.534,00	(15.383.534,26)	50,00
2	Ujong Pacu	31.420.899,47	-	(31.420.899,47)	-
3	Blang Naleung Mameh	259.175.575,76	129.587.787,00	(129.587.788,76)	50,00
4	Batuphat Timur	39.511.058,81	-	(39.511.058,81)	-
5	Blang Pulo	36.101.841,48	18.050.920,00	(18.050.921,48)	50,00
6	Padang Sakti	33.845.392,52	16.922.696,00	(16.922.696,52)	50,00
7	Cot Trieng	26.723.527,00	13.361.763,00	(13.361.764,00)	50,00
8	Paloh Punti	26.923.390,60	-	(26.923.390,60)	-
9	Meunasah Dayah	26.446.874,48	13.223.437,00	(13.223.437,48)	50,00
10	Meuria Paloh	32.365.004,70	16.182.502,00	(16.182.502,70)	50,00
11	Blang Panyang	35.642.362,43	-	(35.642.362,43)	-
	Jumlah	578.922.995,51	222.712.639,00	(356.210.356,51)	38,47
	<u>Kecamatan Blang Mangat</u>				
1	Kuala	27.955.365,55	13.977.682,00	(13.977.683,55)	50,00
2	Blang Cut	28.417.998,12	-	(28.417.998,12)	-
3	Jambo Mesjid	27.415.569,34	13.707.784,00	(13.707.785,34)	50,00
4	Jambo Timu	27.811.397,17	-	(27.811.397,17)	-
5	Tunong	27.935.794,03	-	(27.935.794,03)	-
6	Blang Teue	26.430.733,07	13.215.366,00	(13.215.367,07)	50,00
7	Teungoh	27.177.333,51	13.588.666,00	(13.588.667,51)	50,00
8	Baloy	28.130.248,77	-	(28.130.248,77)	-
9	Mane Kareung	28.755.939,88	-	(28.755.939,88)	-
10	Asan Kareung	27.491.914,97	13.745.957,00	(13.745.957,97)	50,00
11	Blang Punteuet	29.206.169,55	14.603.084,00	(14.603.085,55)	50,00
12	Kumbang Punteuet	27.645.572,08	-	(27.645.572,08)	-
13	Mesjid Punteuet	38.612.070,38	-	(38.612.070,38)	-
14	Ulee Blang Mane	35.686.734,80	-	(35.686.734,80)	-
15	Keude Punteuet	27.227.517,74	-	(27.227.517,74)	-
16	Alue Liem	34.899.971,07	-	(34.899.971,07)	-
17	Blang Buloh	28.350.801,22	14.175.400,00	(14.175.401,22)	50,00
18	Blang Weu Panjoe	29.889.678,11	-	(29.889.678,11)	-
19	Jeulikat	32.175.565,86	16.087.782,00	(16.087.783,86)	50,00
20	Blang Weu Baroh	27.729.115,57	-	(27.729.115,57)	-
21	Seuneubok	26.007.404,90	13.003.702,00	(13.003.702,90)	50,00
22	Rayeuk Kareung	28.218.518,63	14.109.259,00	(14.109.259,63)	50,00
	Jumlah	643.171.414,32	140.214.682,00	(502.956.732,32)	21,80
	Total	2.886.250.000,00	788.849.008,00	(2.097.400.992,00)	27,33



5.1.2.4.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa

Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp139.493.371,00 atau 27,33% dari anggaran sebesar Rp510.380.000,00.

Tabel 37. Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
	Kecamatan Banda Sakti				
1	Kuta Blang	19.822.598,00	9.911.299,00	(9.911.299,00)	50,00
2	Tumpok-Teungoh	10.516.011,00	5.258.005,00	(5.258.006,00)	50,00
3	Simpang Empat	17.325.822,00	-	(17.325.822,00)	-
4	Kp.Jawa Lhokseumawe	14.040.654,00	7.020.327,00	(7.020.327,00)	50,00
5	Kota Lhokseumawe	17.294.963,00	8.647.481,00	(8.647.482,00)	50,00
6	Mon geudong	10.265.643,00	5.132.821,00	(5.132.822,00)	50,00
7	Keude Aceh	7.566.315,00	3.783.157,00	(3.783.158,00)	50,00
8	Pusong Lama	5.267.096,00	-	(5.267.096,00)	-
9	Hagu Teungoh	12.872.197,00	6.436.098,00	(6.436.099,00)	50,00
10	Uteun Bayi	7.929.874,00	3.964.937,00	(3.964.937,00)	50,00
11	Ujong Blang	6.213.902,00	3.106.951,00	(3.106.951,00)	50,00
12	Hagu Selatan	8.046.318,00	-	(8.046.318,00)	-
13	Pusong Baru	6.020.896,00	3.010.448,00	(3.010.448,00)	50,00
14	Ulee Jalan	5.160.911,00	-	(5.160.911,00)	-
15	Banda Masen	6.266.247,00	-	(6.266.247,00)	-
16	Lancang Garam	10.064.951,00	5.032.475,00	(5.032.476,00)	50,00
17	Kp. Jawa Baru	8.956.782,00	-	(8.956.782,00)	-
18	Hagu Barat Laut	6.355.364,00	3.177.682,00	(3.177.682,00)	50,00
	Jumlah	179.986.544,00	64.481.681,00	(115.504.863,00)	35,83
	Kecamatan Muara Dua				
1	Alue Awe	6.714.730,00	3.357.365,00	(3.357.365,00)	50,00
2	Blang Crum	5.700.501,00	-	(5.700.501,00)	-
3	Cut Mamplam	5.634.498,00	-	(5.634.498,00)	-
4	Meunasah Mee	6.269.595,00	-	(6.269.595,00)	-
5	Cot Girek Kandang	6.355.328,00	-	(6.355.328,00)	-
6	Keude Cunda	7.614.554,00	-	(7.614.554,00)	-
7	Uteunkot	14.607.737,00	-	(14.607.737,00)	-
8	Lhok Mon Puteh	4.805.891,00	-	(4.805.891,00)	-
9	Meunasah Mesjid	9.843.455,00	4.921.727,00	(4.921.728,00)	50,00
10	Meunasah Panggoi	10.822.696,00	-	(10.822.696,00)	-
11	Paya Bili	4.635.638,00	-	(4.635.638,00)	-
12	Meunasah Alue	5.443.774,00	-	(5.443.774,00)	-
13	Paya Punteuet	5.993.624,00	-	(5.993.624,00)	-
14	Blang Poroh	4.809.092,00	-	(4.809.092,00)	-
15	Meunasah Manyang	5.111.212,00	2.555.606,00	(2.555.606,00)	50,00
16	Meunasah Blang	5.226.187,00	-	(5.226.187,00)	-



Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang)(Rp)	%
17	Paloh Batee	4.700.116,00	-	(4.700.116,00)	-
	Jumlah	114.288.628,00	10.834.698,00	(103.453.930,00)	9,48
	<u>Kecamatan Muara Satu</u>				
1	Batuphat Barat	5.440.588,00	2.720.294,00	(2.720.294,00)	50,00
2	Ujong Pacu	5.556.206,00	-	(5.556.206,00)	-
3	Blang Naleung Mameh	45.830.413,00	22.915.206,00	(22.915.207,00)	50,00
4	Batuphat Timur	6.986.801,00	-	(6.986.801,00)	-
5	Blang Pulo	6.383.944,00	3.191.972,00	(3.191.972,00)	50,00
6	Padang Sakti	5.984.933,00	2.992.466,00	(2.992.467,00)	50,00
7	Cot Trieng	4.725.562,00	2.362.781,00	(2.362.781,00)	50,00
8	Paloh Punti	4.760.904,00	-	(4.760.904,00)	-
9	Meunasah Dayah	4.676.641,00	2.338.320,00	(2.338.321,00)	50,00
10	Meuria Paloh	5.723.153,00	2.861.576,00	(2.861.577,00)	50,00
11	Blang Panyang	6.302.693,00	-	(6.302.693,00)	-
	Jumlah	102.371.838,00	39.382.615,00	62.989.223,00	38,47
	<u>Kecamatan Blang Mangat</u>				
1	Kuala	4.943.390,00	2.471.695,00	(2.471.695,00)	50,00
2	Blang Cut	5.025.198,00	-	(5.025.198,00)	-
3	Jambo Mesjid	4.847.937,00	2.423.968,00	(2.423.969,00)	50,00
4	Jambo Timu	4.917.932,00	-	(4.917.932,00)	-
5	Tunong	4.939.929,00	-	(4.939.929,00)	-
6	Blang Teue	4.673.787,00	2.336.893,00	(2.336.894,00)	50,00
7	Teungoh	4.805.809,00	2.402.904,00	(2.402.905,00)	50,00
8	Baloy	4.974.315,00	-	(4.974.315,00)	-
9	Mane Kareung	5.084.957,00	-	(5.084.957,00)	-
10	Asan Kareung	4.861.437,00	2.430.718,00	(2.430.719,00)	50,00
11	Blang Punteuet	5.164.572,00	2.582.286,00	(2.582.286,00)	50,00
12	Kumbang Punteuet	4.888.609,00	-	(4.888.609,00)	-
13	Mesjid Punteuet	6.827.831,00	-	(6.827.831,00)	-
14	Ulee Blang Mane	6.310.540,00	-	(6.310.540,00)	-
15	Keude Punteuet	4.814.684,00	-	(4.814.684,00)	-
16	Alue Liem	6.171.415,00	-	(6.171.415,00)	-
17	Blang Buloh	5.013.316,00	2.506.658,00	(2.506.658,00)	50,00
18	Blang Weu Panjoe	5.285.437,00	-	(5.285.437,00)	-
19	Jeulikat	5.689.655,00	2.844.827,00	(2.844.828,00)	50,00
20	Blang Weu Baroh	4.903.382,00	-	(4.903.382,00)	-
21	Seuneubok	4.598.929,00	2.299.464,00	(2.299.465,00)	50,00
22	Rayeuk Kareung	4.989.929,00	2.494.964,00	(2.494.965,00)	50,00
	Jumlah	113.732.990,00	24.794.377,00	(88.938.613,00)	21,80
	Total	510.380.000,00	139.493.371,00	(244.908.183,00)	27,33

5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi sebesar Rp24.780.603.121,23 atau 100% dari anggaran Rp24.780.603.121,23. Rincian penerimaan daerah sebagai berikut :

Tabel 38. Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	24.780.603.121,23	24.780.603.121,23	100,00
	Jumlah	24.780.603.121,23	24.780.603.121,23	100,00

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagai berikut :

Tabel 39. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Jumlah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PDAM Tirta Ie Beusare Rata.

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar 55.333.411.782,55 merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto.



5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL Tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi SAL Akhir, dari Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan sebesar Rp24.780.603.121,23 merupakan penggunaan SILPA Tahun 2016 pada tahun 2017.

5.2.2 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp55.333.411.782,55 merupakan selisih antara :

Surplus/ Defisit Anggaran	31.552.808.661,32
Pembiayaan Netto	23.780.603.121,23
	<u>55.333.411.782,55</u>

5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan - LO

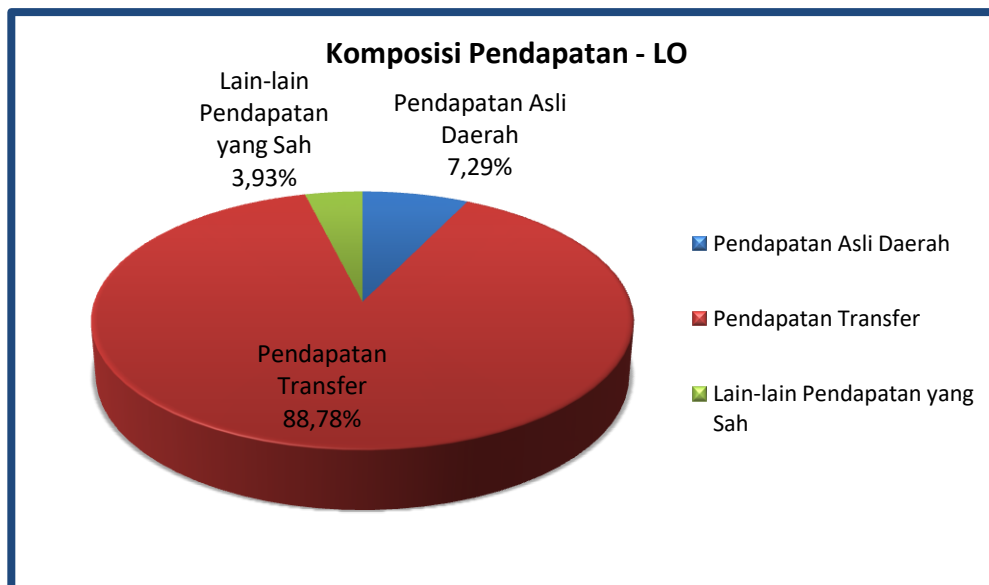
Pendapatan - LO Kota Lhokseumawe adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp915.352.626.636,05 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 40. Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan – LO Tahun 2017

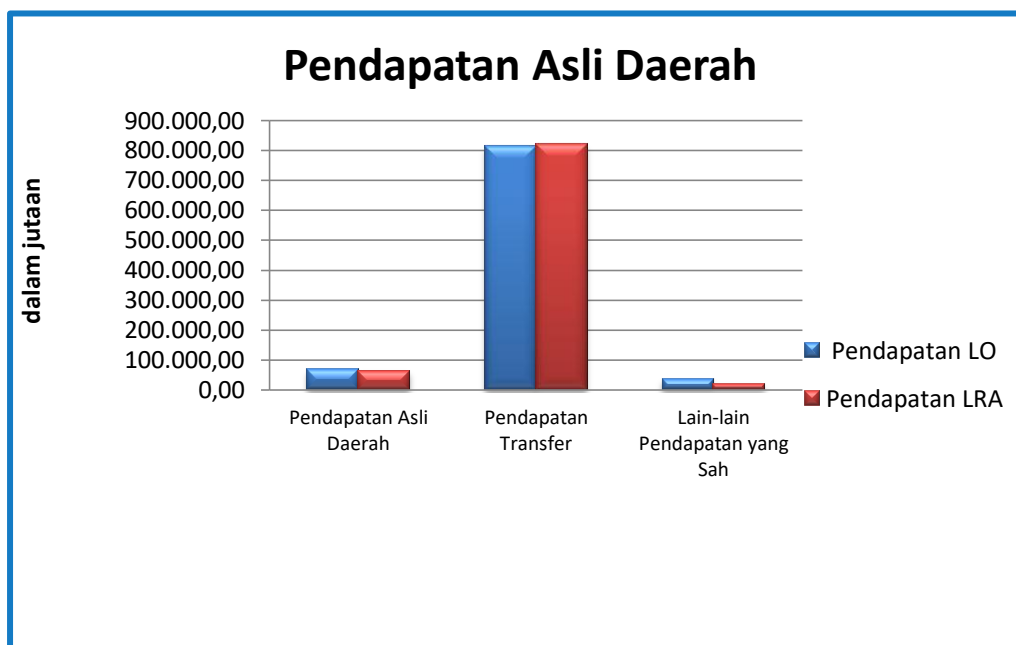
No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pendapatan Asli Daerah	66.705.280.707,42	62.979.495.103,85	3.725.785.603,57
2	Pendapatan Transfer	812.641.718.851,63	818.187.180.793,47	(5.545.461.941,84)
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	36.005.627.077,00	20.547.760.000,00	15.457.867.077,00
	Jumlah	915.352.626.636,05	901.714.435.897,32	13.638.190.738,73

Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kota Lhokseumawe sebagaimana tergambar pada diagram berikut :

Gambar 10. Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kota Lhokseumawe Tahun 2017



Gambar 11. Perbandingan Realisasi Pendapatan – LO dan Realisasi Pendapatan – LRA Kota Lhokseumawe Tahun 2017



5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

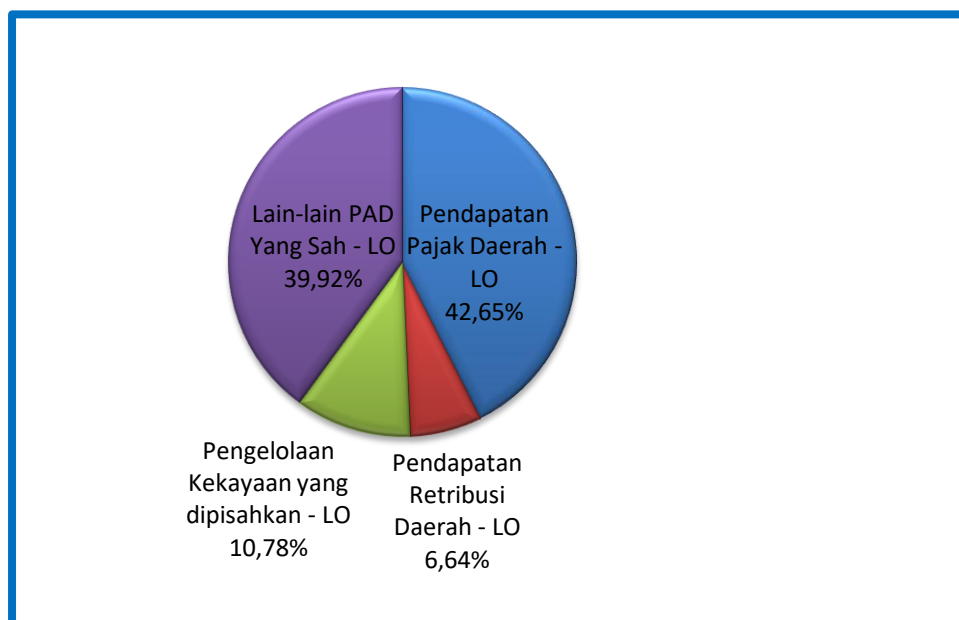
Pendapatan Asli Daerah – LO merupakan jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp66.705.280.707,42 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 41. Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	28.451.828.738,14	27.839.764.484,00	612.064.254,14
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4.432.550.763,49	4.050.483.522,00	382.067.241,49
3	Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan - LO	7.190.100.909,31	5.093.717.479,31	2.096.383.430,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	26.630.800.296,48	25.995.529.618,54	635.270.677,94
	Jumlah	66.705.280.707,42	62.979.495.103,85	3.725.785.603,57

Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO pada Kota Lhokseumawe sebagaimana tergambar pada diagram berikut :

Gambar 12. Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2017



5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Jumlah pendapatan pajak daerah – LO untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp28.451.828.738,14. Adapun perbandingan antara pendapatan pajak daerah – LO dan pendapatan pajak daerah – LRA sebagai berikut

Tabel 42. Perbedaan Pajak Daerah– LO dan LRA Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pajak Hotel - LO	308.400.100,00	251.570.700,00	56.829.400,00
2	Pajak Restoran - LO	2.733.828.989,00	2.703.864.639,00	29.964.350,00
3	Pajak Hiburan - LO	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
4	Pajak Reklame - LO	663.355.110,14	767.766.745,00	(104.411.634,86)
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	13.667.475.032,00	15.574.198.671,00	(1.906.723.639,00)
6	Pajak Parkir - LO	33.513.300,00	8.913.300,00	24.600.000,00
7	Pajak Air Tanah - LO	1.618.896,00	1.618.896,00	0,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	1.166.304.574,00	1.166.304.574,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	5.560.476.896,00	3.048.671.118,00	2.511.805.778,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan - LO	4.306.055.841,00	4.306.055.841,00	0,00
	Jumlah	28.451.828.738,14	27.839.764.484,00	612.064.254,14

Penjelasan perbedaan saldo Pajak Daerah – LO dan Pajak Daerah – LRA sebagai berikut :

1. Selisih Pajak Hotel sebesar Rp56.829.400,00 dikarenakan terdapat piutang baru sebesar Rp63.529.400,00 dan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp6.700.000,00.
2. Selisih Pajak Restoran sebesar Rp29.964.350,00 dikarenakan terdapat piutang baru sebesar Rp38.729.350.000,00 dan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp8.765.000,00.
3. Selisih Pajak Reklame sebesar (Rp104.411.634,86) dikarenakan terdapat Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya yang jatuh tempo sebesar Rp241.913.986,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka yang diterima tahun 2017 sebesar Rp346.325.620,86,00.
4. Selisih Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.906.723.639 dikarenakan terdapat piutang baru untuk tahun 2017.

5. Selisih Pajak Parkir sebesar Rp24.600.000,00 dikarenakan piutang baru sebesar Rp24.840.000,00 dan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp240.000,00.
6. Selisih Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp2.511.805.778,42,00 dikarenakan terdapat piutang baru sebesar Rp3.498.039.055,00 dan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp779.250.263,00 serta terdapat pendapatan denda sebesar Rp206.983.014,00 yang dipendapatan LO dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp4.432.550.763,49 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 43. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Retribusi Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah – LO	540.196.000,00	530.736.000,00	9.460.000,00
2	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	741.242.000,00	642.278.000,00	98.964.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	465.500.000,00	423.835.000,00	41.665.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	106.577.500,00	106.577.500,00	0,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	1.004.894.671,00	564.190.000,00	440.704.671,00
7	Retribusi Terminal - LO	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
8	Retribusi Izin Perikanan - LO	0,00	0,00	0,00
9	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	552.853.750,00	552.853.750,00	0,00
10	Retribusi Izin Gangguan - LO	1.008.974.342,49	1.217.700.772,00	(208.726.429,51)
11	Retribusi Izin Trayek - LO	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00
	Jumlah	4.432.550.763,49	4.050.483.522,00	382.067.241,49

Perbedaan saldo pendapatan retribusi daerah – LO dan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih Pendapatan Retribusi Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah – LO dengan LRA sebesar Rp9.460.000,00 dikarenakan terdapat piutang



baru sebesar Rp17.400.000,00 dan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp7.940.000,00.

2. Selisih Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO dengan LRA sebesar Rp98.964.000,00 dikarenakan terdapat piutang baru sebesar Rp143.964.000,00 dan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp45.000.000,00.
3. Selisih Retribusi Pelayanan Pasar – LO dengan LRA sebesar Rp41.665.000,00 dikarenakan terdapat piutang baru sebesar Rp53.665.000,00 dan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp12.000.000,00.
4. Selisih Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO dengan LRA sebesar Rp440.704.671,00 dikarenakan terdapat piutang baru sebesar 447.570.000,00 dan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp45.970.000,00 serta adanya Pendapatan Diterima Dimuka yang jatuh tempo sebesar Rp64.054.671,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2017 sebesar Rp24.950.000,00.
5. Selisih Retribusi Izin Gangguan – LO dengan LRA sebesar Rp208.726.429,51 dikarenakan terdapat piutang baru sebesar Rp46.307.800,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka yang jatuh tempo sebesar Rp1.263.932.387,91 serta pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp6.513.123,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2017 sebesar Rp1.512.453.494,42,00.

5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp7.190.100.909,31 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 44. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan – LO

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO	5.093.717.479,31	5.093.717.479,31	0,00
2	Bagian Laba PDPL	2.096.383.430,00	0,00	2.096.383.430,00
	Jumlah	7.190.100.909,31	5.093.717.479,31	2.096.383.430,00

Bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Aceh sebesar Rp5.093.717.479,31 dan Bagian Laba Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) sebesar Rp2.096.383.430,00, terdapat selisih Bagian Laba PDPL antara LO dan LRA dikarenakan



pendapatan PDPL yang dicatat sebagai penambah Ekuitas bukan pembagian deviden yang diterima tunai.

5.3.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah – LO

Saldo Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp26.630.800.296,48 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 45. Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dan
LRA Tahun 2017

No	Kelompok Pendapatan	LO	LRA	Selisih
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	-
2	Penerimaan Jasa Giro	261.114.331,93	261.114.331,93	-
3	Pendapatan Bunga Deposito	4.583.928.464,53	4.583.928.464,53	-
4	Pendapatan Lain-Lain Dari Penerimaan Asli Daerah	3.863.798.138,02	3.236.707.183,08	627.090.954,94
5	Lain-Lain Penerimaan Dari Denda Pajak	208.432.037,00	207.017.314,00	1.414.723,00
6	Pendapatan Zakat/Infaq	7.167.082.575,00	7.167.082.575,00	-
7	Dana Kapitasi JKN	10.546.444.750,00	10.546.444.750,00	-
	Jumlah	26.630.800.296,48	26.002.294.618,54	628.505.677,94

1. Selisih Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO sebesar Rp627.090.954,94 merupakan pendapatan dari denda pajak dan pendapatan penyisihan piutang yang telah dibebankan dibayar kembali oleh wajib pajak dan wajib retribusi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 46. Rincian Pendapatan Penyisihan Piutang

Uraian	Jumlah
Pendapatan Penyisihan Izin Gangguan (HO)	325.656,15
Pendapatan Penyisihan Pajak Hotel	335.000,00
Pendapatan Penyisihan Pajak Restoran	540.500,00
Pendapatan Penyisihan Pajak Parkir	12.000,00
Pendapatan Penyisihan PPJ PLN	95.336.181,95
Pendapatan Penyisihan PBB	524.294.116,84
Pendapatan Penyisihan Retribusi Parkir	2.250.000,00
Pendapatan Penyisihan Retribusi Sampah	397.000,00
Pendapatan Penyisihan Menara telekomunikasi	0,00
Pendapatan Penyisihan Retribusi Pasar	600.000,00
Pendapatan Penyisihan Retribusi Kekayaan Daerah	3.000.500,00
Jumlah	627.090.954,94

2. Selisih Rp1.414.723,00 dikarenakan adanya pengakuan piutang denda pajak tahun berjalan Rp804.020,00 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB) dan Rp610.703,00 pendapatan denda pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum diterima oleh Kas Daerah.

5.3.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Jumlah pendapatan transfer – LO sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp812.641.718.851,63 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 47. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	644.213.912.781,00	644.213.912.781,00	0,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	150.851.536.719,00	150.851.536.719,00	0,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO	17.576.269.351,63	23.121.731.293,47	(5.545.461.941,84)
	Jumlah	812.641.718.851,63	818.187.180.793,47	(5.545.461.941,84)

5.3.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO

Pendapatan transfer Pusat – Dana Perimbangan – LO terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak – LO, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LO, Dana Alokasi Umum (DAU) – LO, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 48. Rincian pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO
Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
I	Bagi Hasil Pajak - LO	45.470.527.507,00	45.470.527.507,00	0,00
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO	16.856.557.628,00	16.856.557.628,00	0,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	28.346.309.220,00	28.346.309.220,00	0,00
3	Bagi Hasil Cukai Tembakau	267.660.659,00	267.660.659,00	0,00
II	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	3.795.459.091,00	3.795.459.091,00	0,00
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	2.618.473,00	2.618.473,00	0,00



No	Uraian	LO	LRA	Selisih
2	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	6.790.804,00	6.790.804,00	
3	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	0,00	0,00	0,00
4	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	252.492.373,00	252.492.373,00	0,00
5	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	525.572.127,00	525.572.127,00	0,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	418.087.910,00	418.087.910,00	0,00
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	2.200.005.093,00	2.200.005.093,00	0,00
8	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	12.461.862,00	12.461.862,00	0,00
9	Bagi Hasil dari Perkebunan	377.430.449,00	377.430.449,00	
III	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	459.628.037.000,00	459.628.037.000,00	0,00
IV	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	135.319.889.183,00	135.319.889.183,00	0,00
	Jumlah	644.213.912.781,00	644.213.912.781,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan jumlah antara pendapatan tranfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO dan pendapatan tranfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LRA.

5.3.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO

Komponen Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO terdiri dari Dana Otonomi Khusus – LO, Dana Desa – LO dan Dana Insentif Daerah – LO dengan nilai sebagai berikut :

Tabel 49. Rincian pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO
Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
I	Dana Otonomi Khusus - LO	87.941.476.679,00	87.941.476.679,00	0,00
1	Dana Otonomi Khusus - LO	87.941.476.679,00	87.941.476.679,00	0,00
II	Dana Penyesuaian - LO	62.910.060.040,00	62.910.060.040,00	0,00
1	Dana Desa - LO	55.410.060.040,00	55.410.060.040,00	0,00
2	DID	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
	Jumlah	150.851.536.719,00	150.851.536.719,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan nilai antara pendapatan tranfer Pemerintah Pusat lainnya – LO dan pendapatan tranfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA.

5.3.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Jumlah pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp17.576.269.351,63. Perbandingan antara pendapatan transfer Pemerintah Provinsi – LO dan pendapatan tranfer Pemerintah Provinsi – LRA sebagai berikut :

Tabel 50. Rincian pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO
Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO	17.576.269.351,63	23.121.731.293,47	(5.545.461.941,84)
	Jumlah	17.576.269.351,63	23.121.731.293,47	(5.545.461.941,84)

Perbedaan antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi – LO dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi – LRA sebesar Rp5.545.461.941,84 disebabkan karena terdapat piutang yang timbul tahun 2017 sebesar Rp3.031.581.700,84 dan penerimaan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp8.577.043.642,68.

5.3.1.2.4 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO

Jumlah Pendapatan Hibah Pemerintah – LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp36.005.627.077,00,00. Rincian pendapatan hibah adalah sebagai berikut :

Tabel 51. Rincian Pendapatan Hibah

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	20.547.760.000,00	20.547.760.000,00	0,00
2	Pendapatan Hibah Barang yang diserahkan kepada masyarakat (BPBD)	69.458.315,00	0,00	69.458.315,00
3	Pendapatan Hibah Barang yang diserahkan kepada masyarakat (DPPAPKB)	448.420.580,00	0,00	448.420.580,00
4	Pendapatan Hibah Personal Komputer (Dinas PK)	1.604.150.400,00	0,00	1.604.150.400,00
5	Pendapatan Hibah Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Dinas PK)	3.498.013.000,00	0,00	3.498.013.000,00
6	Pendapatan Hibah Persediaan Bahan Obat-obatan (Dinkes)	442.008.832,00	0,00	442.008.832,00
7	Pendapatan Hibah (KDP Disperindagkop)	7.772.250.950,00	0,00	7.772.250.950,00

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
8	Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk komunitas MAPEL	177.565.000,00	0,00	177.565.000,00
9	Penyertaan modal kepada BUMD	1.446.000.000,00	0,00	1.446.000.000,00
	Jumlah	36.005.627.077,00	20.547.760.000,00	15.457.867.077,00

Dana hibah tersebut merupakan hibah berupa barang kelengkapan medis dari Pemerintah Provinsi pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp448.420.580,00, Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp20.547.760.000,00 dan bantuan sosial dari pemerintah sebesar Rp5.102.163.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Personal Komputer dan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, bantuan obat-obatan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp442.008.832,00, Pendapatan hibah barang diserahkan berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp69.458.315,00, Pendapatan Hibah Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp7.772.250.950,00, Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk Komunitas Mata Pelajaran sebesar Rp177.565.000,00 dan Penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp1.446.000.000,00.

5.3.2. Beban Daerah

5.3.2.1. Beban Operasi

Jumlah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp714.140.812.534,17, berikut jenis beban dan komposisinya.

Tabel 52. Beban Operasi Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Pegawai	277.770.283.848,00	290.092.323.645,00	(12.322.039.797,00)
2	Beban Persediaan	80.156.575.233,03	89.446.767.451,00	(9.290.192.217,97)
3	Beban Jasa	120.401.791.298,93	121.427.491.933,00	(1.025.700.634,07)
4	Beban Pemeliharaan	2.471.329.865,00	3.508.097.785,00	(1.036.767.920,00)
5	Beban Perjalanan Dinas	12.778.616.140,00	12.712.436.140,00	66.180.000,00
6	Beban Hibah	399.264.535,40	57.849.325.773,00	(57.450.061.237,60)
7	Beban Bantuan Sosial	11.863.520.130,00	11.863.520.130,00	0,00
8	Beban Penyusutan	93.508.083.993,42	0,00	93.508.083.993,42
9	Beban Penyisihan Piutang	3.405.642.280,80	0,00	3.405.642.280,80
10	Beban Bantuan Keuangan	102.423.888.136,59	109.323.295.018,00	(6.899.406.881,41)



No	Uraian	LO	LRA	Selisih
11	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	788.849.008,00	788.849.008,00	0,00
12	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	139.493.371,00	139.493.371,00	0,00
13	Beban Lain-lain	8.033.474.694,00	0,00	8.033.474.694,00
	Jumlah	714.140.812.534,17	697.151.600.254,00	16.989.212.280,17

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp277.770.283.848,00. Perbandingan beban pegawai dan belanja pegawai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 53. Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	249.927.300.374,00	262.249.340.171,00	12.322.039.797,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	24.476.074.000,00	24.476.074.000,00	0,00
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	2.196.900.000,00	2.196.900.000,00	0,00
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.159.769.474,00	1.159.769.474,00	0,00
5	Uang Lembur	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00
	Jumlah	277.770.283.848,00	290.092.323.645,00	12.322.039.797,00

Selisih Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp12.322.039.797,00 dikarenakan terdapat kewajiban yang timbul tahun 2017 sebesar Rp2.531.189.811,00 yang terdiri dari Askes sebesar Rp2.246.239.130,00, JKK/JKN sebesar Rp284.950.681,00 serta pembayaran kewajiban tahun sebelumnya sebesar Rp14.853.229.608,00, yang terdiri dari dana sertifikasi sebesar Rp14.383.805,756,00, Iuran Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja Rp149.923.852,00 serta Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp319.500.000,00.

5.3.2.1.2 Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp80.156.575.233,03. Rincian beban persediaan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :



Tabel 54. Beban Persediaan Tahun 2017

No	No.rek	Uraian	Persediaan Awal	Belanja	Persediaan Akhir	Penyesuaian	Beban Persediaan
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5-6+7
1	9.1.2.1.1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	52.090.750	2.915.016.607	117.749.065,00	(143.078.585)	2.706.279.707
2	9.1.2.1.3	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.317.700	270.520.110	13.793.976,00	(10.612.325)	256.431.509
3	9.1.2.1.4	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		68.636.000		(324.000)	68.312.000
4	9.1.2.1.5	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.201.350	758.175.495	7.835.800,00	(47.844.375)	703.696.670
5	9.1.2.1.6	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	257.500	1.410.147.675	-	(32.117.970)	1.378.287.205
6	9.1.2.1.9	Beban Dokumentasi Kegiatan		125.743.000		(23.984.000)	101.759.000
7	9.1.2.1.10	Beban Hadiah dan Sertifikat		599.336.000		(95.111.000)	504.225.000
8	9.1.2.1.12	Beban Belanja Pembuatan Cendera Mata (Plat dan Vandel)		247.367.400		(44.412.400)	202.955.000
9	9.1.2.1.13	Beban Pengadaan Bendera		5.150.000		-	5.150.000
10	9.1.2.1.14	Beban Barang Pecah Belah / Dapur		43.200.000		-	43.200.000
11	9.1.2.1.15	Beban Tas		765.223.450		(14.353.650)	750.869.800
12	9.1.2.1.16	Beban Dekorasi		179.820.000		(5.350.000)	174.470.000
13	9.1.2.1.17	Beban Bahan Perbekalan Kesehatan		1.033.703.698		(126.828.765)	906.874.933
14	9.1.2.2.1	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	193.000	38.279.000	-	(7.709.000)	30.763.000
15	9.1.2.2.2	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman		66.580.000		(66.580.000)	-
16	9.1.2.2.4	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	2.209.795.524	2.451.148.681	2.762.069.143,00	172.432.832	2.071.307.894
17	9.1.2.2.5	Beban Persediaan Bahan Kimia	2.000.000	238.638.000	-	(37.455.000)	203.183.000
18	9.1.2.2.6	Beban Persediaan Makanan Pokok		94.828.800		-	94.828.800
19	9.1.2.2.7	Bahan Publikasi (Baliho, Spanduk, Billboard dan Umbul-umbul)		962.705.300		(124.990.000)	837.715.300
20	9.1.2.2.8	Beban Bahan Perlengkapan		468.582.600		(224.657.600)	243.925.000
21	9.1.2.2.9	Beban Alat Praktik/Peraga dan Simulasi		41.161.100		(19.896.800)	21.264.300
22	9.1.2.2.10	Beban Bahan Pangan/Pertanian		352.767.650		(9.079.300)	343.688.350
23	9.1.2.2.11	Beban Bahan/Bibit Perikanan		8.760.000		(8.760.000)	-
24	9.1.2.2.12	Beban Persediaan Makanan Tambahan		405.258.900		(30.529.200)	374.729.700
25	9.1.2.2.13	Beban Bahan Specimen		11.060.000	-	(2.765.000)	8.295.000
26	9.1.2.6.1	Beban Cetak	34.338.885	3.002.109.833	116.894.750,00	(316.989.878)	2.602.564.090
27	9.1.2.6.2	Beban Penggandaan	-	805.628.700	-	(73.722.450)	731.906.250
28	9.1.2.20	Beban Barang Yang Akan Diserahkan	14.966.145.200	72.077.219.452	1.520.275.426,00	(20.733.195.501)	64.789.893.725
Jumlah			17.276.339.909,00	89.446.767.451,00	4.538.618.160,00	(22.027.913.966,97)	80.156.575.233,03



Tabel 55. Penjelasan Kolom Penyesuaian

No.rek	Uraian	Penyesuaian	Penjelasan Kolom Penyesuaian Beban Persediaan			
			Kewajiban	Hibah	Pembayaran Kewajiban	Jumlah
1	2	3	4	5	7	8=4+5+6+7
9.1.2.1.1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	(143.078.585,00)	-	14.136.000,00	(157.214.585,00)	(143.078.585,00)
9.1.2.1.3	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	(10.612.325,00)	-		(10.612.325,00)	(10.612.325,00)
9.1.2.1.4	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	(324.000,00)	-		(324.000,00)	(324.000,00)
9.1.2.1.5	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	(47.844.375,00)	-		(47.844.375,00)	(47.844.375,00)
9.1.2.1.6	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	(32.117.970,00)	-		(32.117.970,00)	(32.117.970,00)
9.1.2.1.9	Beban Dokumentasi Kegiatan	(23.984.000,00)	-		(23.984.000,00)	(23.984.000,00)
9.1.2.1.10	Beban Hadiah dan Sertifikat	(95.111.000,00)	-		(95.111.000,00)	(95.111.000,00)
9.1.2.1.12	Beban Belanja Pembuatan Cendera Mata (Plat dan Vandel)	(44.412.400,00)	-		(44.412.400,00)	(44.412.400,00)
9.1.2.1.13	Beban Pengadaan Bendera	-	-		-	-
9.1.2.1.14	Beban Barang Pecah Belah / Dapur	-	-		-	-
9.1.2.1.15	Beban Tas	(14.353.650,00)	-		(14.353.650,00)	(14.353.650,00)
9.1.2.1.16	Beban Dekorasi	(5.350.000,00)	-		(5.350.000,00)	(5.350.000,00)
9.1.2.1.17	Beban Bahan Perbekalan Kesehatan	(126.828.765,00)	-		(126.828.765,00)	(126.828.765,00)
9.1.2.2.1	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	(7.709.000,00)	-		(7.709.000,00)	(7.709.000,00)
9.1.2.2.2	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	(66.580.000,00)	-		(66.580.000,00)	(66.580.000,00)
9.1.2.2.4	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	172.432.832,00	-	442.008.832,00	(269.576.000,00)	172.432.832,00
9.1.2.2.5	Beban Persediaan Bahan Kimia	(37.455.000,00)	-		(37.455.000,00)	(37.455.000,00)
9.1.2.2.6	Beban Persediaan Makanan Pokok	-	-	-		-
9.1.2.2.7	Bahan Publikasi (Baliho, Spanduk, Billboard dan Umbul-umbul)	(124.990.000,00)	-		(124.990.000,00)	(124.990.000,00)
9.1.2.2.8	Beban Bahan Perlengkapan	(224.657.600,00)	-	-	(224.657.600,00)	(224.657.600,00)
9.1.2.2.9	Beban Alat Praktik/Peraga dan Simulasi	(19.896.800,00)	-		(19.896.800,00)	(19.896.800,00)
9.1.2.2.10	Beban Bahan Pangan/Pertanian	(9.079.300,00)	-		(9.079.300,00)	(9.079.300,00)
9.1.2.2.11	Beban Bahan/Bibit Perikanan	(8.760.000,00)	-		(8.760.000,00)	(8.760.000,00)
9.1.2.2.12	Beban Persediaan Makanan Tambahan	(30.529.200,00)	-		(30.529.200,00)	(30.529.200,00)
9.1.2.2.13	Beban Bahan Specimen	(2.765.000,00)	-		(2.765.000,00)	(2.765.000,00)
9.1.2.6.1	Beban Cetak	(316.989.878,00)	-		(316.989.878,00)	(316.989.878,00)
9.1.2.6.2	Beban Persediaan	(73.722.450,00)			(73.722.450,00)	(73.722.450,00)
9.1.2.20	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	(20.733.195.500,97)	-	517.878.895,00	(21.251.074.395,97)	(20.733.195.500,97)
Jumlah		(22.027.913.966,97)	-	974.023.727,00	(23.001.937.693,97)	(22.027.913.966,97)

5.3.2.1.3 Beban Jasa

Beban jasa merupakan jumlah beban jasa periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp120.401.791.298,77. Perbandingan beban jasa dan belanja jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 56. Perbandingan Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Jasa Kantor	32.688.771.926,00	30.443.828.700,00	2.244.943.226,00
2	Beban Premi Asuransi	1.078.861.147,81	1.109.492.867,00	(30.631.719,19)
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	5.474.690.095,00	5.630.701.895,00	(156.011.800,00)
4	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.158.938.387,12	2.161.832.728,00	(2.894.340,88)
5	Beban Sewa Sarana Mobilitas	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00
6	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	551.097.059,00	659.017.059,00	(107.920.000,00)
7	Beban Makanan dan Minuman	9.826.259.500,00	9.879.073.500,00	(52.814.000,00)
8	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	443.968.410,00	586.524.410,00	(142.556.000,00)
9	Belanja Pakaian Kerja	8.750.000,00	85.850.000,00	(77.100.000,00)
10	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	923.883.340,00	1.163.605.340,00	(239.722.000,00)
11	Beban Jasa Konsultasi	217.020.000,00	288.654.000,00	(71.634.000,00)
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
13	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	503.853.026,00	503.853.026,00	0,00
14	Beban Honorarium Non Pegawai	2.490.451.500,00	2.536.751.500,00	(46.300.000,00)
15	Beban Honorarium PNS	9.715.055.070,00	9.673.630.070,00	41.425.000,00
16	Honorarium Non PNS	38.556.740.200,00	40.941.225.200,00	(2.384.485.000,00)
17	Belanja honorarium pengelola dana BOS	2.201.461.800,00	2.201.461.800,00	0,00
18	Belanja barang dana BOS	13.226.989.838,00	13.226.989.838,00	0,00
	Jumlah	120.401.791.298,93	121.427.491.933,00	(1.025.700.634,07)

Selisih antara Beban Jasa laporan LO dan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Selisih beban jasa kantor sebesar Rp2.244.943.226,00 dikarenakan terdapat kewajiban yang timbul pada tahun 2017 sebesar Rp3.416.071.662,00 dan pembayaran kewajiban tahun yang lalu sebesar Rp1.171.128.436,00.
2. Selisih Beban Premi Asuransi sebesar Rp(30.631.719,19), dikarenakan beban dibayar dimuka tahun 2016 yang menjadi beban tahun 2017 sebesar Rp179.919.153,65 serta beban dibayar dimuka tahun 2017 sebesar Rp210.550.872,84.



3. Selisih Beban Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar (Rp156.011.800,00) dikarenakan pembayaran kewajiban tahun yang lalu sebesar Rp156.011.800,00.
4. Selisih Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar (Rp2.894.341,00) dikarenakan terdapat beban dibayar dimuka yang jatuh tempo pada tahun 2017 sebesar Rp98.167.302,95 dan beban dibayar dimuka tahun 2017 sebesar Rp65.561.643,83, serta pembayaran kewajiban tahun yang lalu sebesar Rp35.500.000,00.
5. Selisih Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar (Rp107.920.000,00) dikarenakan pembayaran kewajiban tahun yang lalu sebesar Rp107.920.000,00.
6. Selisih Beban Makanan dan Minuman sebesar (Rp108.638.000,00) dikarenakan pembayaran kewajiban tahun yang lalu sebesar Rp108.638.000,00.
7. Selisih Beban Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar (Rp142.556.000,00) dikarenakan pembayaran kewajiban tahun yang lalu sebesar Rp142.556.000,00.
8. Selisih Beban Pakaian Kerja sebesar (Rp77.100.000,00) dikarenakan pembayaran kewajiban tahun yang lalu sebesar Rp77.100.000,00.
9. Selisih Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu sebesar (Rp239.722.000,00) dikarenakan pembayaran kewajiban tahun yang lalu sebesar Rp239.722.000,00.
10. Selisih Beban Jasa Konsultasi sebesar (Rp71.634.000,00) dikarenakan pembayaran kewajiban tahun yang lalu sebesar Rp71.634.000,00.
11. Selisih Beban Honorarium Non Pegawai sebesar (Rp46.300.000,00) dikarenakan pembayaran kewajiban tahun yang lalu sebesar Rp46.300.000,00.
12. Selisih Honorarium Non PNS sebesar (Rp2.384.485.000,00) dikarenakan pembayaran kewajiban tahun yang lalu sebesar Rp2.384.485.000,00.

Tabel 57. Rekapitulasi Beban Jasa Per SKPD Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	SELISIH
1	Dinas Pendidikan	27.398.391.443,00	28.370.377.580,00	(971.986.137,00)
2	Dinas Kesehatan	13.931.353.047,00	14.285.387.682,00	(354.034.635,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.078.387.730,00	1.122.395.737,00	(44.008.007,00)
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	702.382.520,79	731.491.668,00	(29.109.147,21)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	4.713.443.379,00	5.222.345.913,00	(508.902.534,00)
6	Dinas Sosial	609.176.336,73	611.585.061,00	(2.408.724,27)
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1.086.770.725,00	1.101.014.609,00	(14.243.884,00)



No	Uraian	LO	LRA	SELISIH
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.465.313.012,06	1.479.798.139,00	(14.485.126,94)
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	1.149.326.472,00	1.273.302.284,00	(123.975.812,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	23.398.540.594,00	20.900.623.227,00	2.497.917.367,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	834.441.291,00	872.097.652,00	(37.656.361,00)
12	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	972.128.373,00	1.062.865.494,00	(90.737.121,00)
13	Dinas Perhubungan	1.356.963.540,19	1.418.010.751,00	(61.047.210,81)
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	323.803.556,07	343.908.741,00	(20.105.184,93)
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	683.999.051,00	767.625.536,00	(83.626.485,00)
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	646.095.567,00	734.717.475,00	(88.621.908,00)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	354.262.153,00	365.319.839,00	(11.057.686,00)
18	Sekretariat Daerah	11.212.409.977,00	11.733.570.841,00	(521.160.864,00)
19	Sekretariat DPRK Lhokseumawe	6.077.876.045,00	6.280.790.480,00	(202.914.435,00)
20	Kecamatan Banda Sakti	552.463.066,00	573.753.065,00	(21.289.999,00)
21	Kecamatan Blang Mangat	550.447.771,00	567.332.384,00	(16.884.613,00)
22	Kecamatan Muara Satu	534.220.396,00	558.609.461,00	(24.389.065,00)
23	Kecamatan Muara Dua	473.572.029,00	490.126.759,00	(16.554.730,00)
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.208.044.590,00	2.260.878.350,00	(52.833.760,00)
25	Inspektorat	2.426.309.825,00	2.473.715.887,00	(47.406.062,00)
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.737.362.505,81	5.830.920.798,00	(93.558.292,19)
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	805.235.129,14	818.497.565,00	(13.262.435,86)
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	578.701.716,00	591.254.678,00	(12.552.962,00)
29	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	5.698.733.003,14	5.693.965.862,00	4.767.141,14
30	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	1.419.636.300,00	1.443.785.300,00	(24.149.000,00)
31	Sekretariat Baitul Mal	595.746.871,00	605.478.441,00	(9.731.570,00)
32	Sekretariat Majelis Adat Aceh	429.587.084,00	435.145.974,00	(5.558.890,00)
33	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	396.666.200,00	406.798.700,00	(10.132.500,00)
	Jumlah	120.401.791.298,93	121.427.491.933,00	(1.025.700.634,07)

5.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan jumlah beban pemeliharaan atas aset pemerintah daerah Kota Lhokseumawe yang tidak dikapitalisasi menjadi aset untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.471.329.865,00. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 58. Beban Pemeliharaan Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Pemeliharaan Tanah	5.832.500,00	181.859.420,00	(176.026.920,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.049.064.065,00	1.162.377.465,00	(113.313.400,00)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	724.003.800,00	1.180.640.300,00	(456.636.500,00)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	692.429.500,00	983.220.600,00	(290.791.100,00)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.471.329.865,00	3.508.097.785,00	(1.036.767.920,00)

Selisih antara beban pemeliharaan LO dan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih Beban Pemeliharaan Tanah sebesar (Rp176.026.920,00) dikarenakan terdapat pembayaran kewajiban tahun sebelumnya sebesar Rp176.026.920,00.
2. Selisih Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp(113.313.400,00) dikarenakan terdapat pembayaran kewajiban tahun yang lalu sebesar Rp113.313.400,00
3. Selisih Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Rp456.636.500,00) dikarenakan pembayaran kewajiban tahun yang lalu sebesar Rp456.636.500,00.
4. Selisih Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp290.791.100,00) dikarenakan pembayaran kewajiban tahun lalu sebesar Rp290.791.100,00.

Tabel 59. Rekapitulasi Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.127.000,00	155.721.600,00	(118.594.600,00)
2	Dinas Kesehatan	607.439.200,00	624.202.400,00	(16.763.200,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	190.598.500,00	434.884.400,00	(244.285.900,00)
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.405.000,00	7.405.000,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	11.792.000,00	11.792.000,00	0,00
6	Dinas Sosial	7.939.000,00	7.939.000,00	0,00
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35.977.865,00	35.977.865,00	0,00
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	167.174.000,00	350.675.920,00	(183.501.920,00)



No	Uraian	LO	LRA	Selisih
10	Dinas Lingkungan Hidup	181.419.300,00	320.296.500,00	(138.877.200,00)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	58.100.000,00	80.400.000,00	(22.300.000,00)
12	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5.000.000,00	9.980.000,00	(4.980.000,00)
13	Dinas Perhubungan	97.972.000,00	134.476.600,00	(36.504.600,00)
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	7.825.000,00	14.825.000,00	(7.000.000,00)
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	51.837.500,00	51.837.500,00	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.865.000,00	20.865.000,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	457.603.500,00	575.757.000,00	(118.153.500,00)
19	Sekretariat DPRK Lhokseumawe	241.555.500,00	288.689.100,00	(47.133.600,00)
20	Kecamatan Banda Sakti	7.035.000,00	7.035.000,00	0,00
21	Kecamatan Blang Mangat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
22	Kecamatan Muara Satu	6.000.000,00	15.917.600,00	(9.917.600,00)
23	Kecamatan Muara Dua	6.000.000,00	21.934.000,00	(15.934.000,00)
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.390.000,00	42.661.800,00	(35.271.800,00)
25	Inspektorat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	70.050.000,00	80.200.000,00	(10.150.000,00)
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	122.104.500,00	149.504.500,00	(27.400.000,00)
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	19.780.000,00	19.780.000,00	0,00
29	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
30	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
31	Sekretariat Baitul Mal	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00
32	Sekretariat Majelis Adat Aceh	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
33	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Jumlah	2.471.329.865,00	3.508.097.785,00	(1.036.767.920,00)

5.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan jumlah beban perjalanan dinas pegawai periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp12.778.616.140,00 yang terdiri dari beban perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah. Rincian perjalanan dinas adalah sebagai berikut :



Tabel 60. Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas
Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	712.154.988,00	645.974.988,00	66.180.000,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	12.066.461.152,00	12.066.461.152,00	0,00
	Jumlah	12.778.616.140,00	12.712.436.140,00	66.180.000,00

Adapun rincian beban perjalanan dinas masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 61. Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Dinas Pendidikan	250.333.500,00	184.153.500,00	66.180.000,00
2	Dinas Kesehatan	216.766.762,00	216.766.762,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	149.444.600,00	149.444.600,00	0,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	133.400.600,00	133.400.600,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	123.394.150,00	123.394.150,00	0,00
6	Dinas Sosial	111.724.244,00	111.724.244,00	0,00
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	237.673.772,00	237.673.772,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	261.638.844,00	261.638.844,00	0,00
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	59.759.000,00	59.759.000,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	107.981.762,00	107.981.762,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	109.228.300,00	109.228.300,00	0,00
12	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	191.757.202,00	191.757.202,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	93.290.260,00	93.290.260,00	0,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	142.281.250,00	142.281.250,00	0,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	233.265.978,00	233.265.978,00	0,00
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	175.666.650,00	175.666.650,00	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74.821.036,00	74.821.036,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	3.024.661.756,00	3.024.661.756,00	0,00



No	Uraian	LO	LRA	Selisih
19	Sekretariat DPRK Lhokseumawe	3.330.452.300,00	3.330.452.300,00	0,00
20	Kecamatan Banda Sakti	49.999.800,00	49.999.800,00	0,00
21	Kecamatan Blang Mangat	39.101.450,00	39.101.450,00	0,00
22	Kecamatan Muara Satu	27.261.750,00	27.261.750,00	0,00
23	Kecamatan Muara Dua	57.621.650,00	57.621.650,00	0,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	79.361.872,00	79.361.872,00	0,00
25	Inspektorat	851.010.639,00	851.010.639,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	762.760.544,00	762.760.544,00	0,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.430.927.435,00	1.430.927.435,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	212.942.240,00	212.942.240,00	0,00
29	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	112.320.450,00	112.320.450,00	0,00
30	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	37.981.231,00	37.981.231,00	0,00
31	Sekretariat Baitul Mal	29.933.513,00	29.933.513,00	0,00
32	Sekretariat Majelis Adat Aceh	29.851.600,00	29.851.600,00	0,00
33	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	Jumlah	12.778.616.140,00	12.712.436.140,00	66.180.000,00

Terdapat selisih antara Beban Perjalanan Dinas – LO dan Belanja Perjalanan Dinas – LRA sebesar Rp66.180.000,00 disebabkan karena adanya bantuan dana hibah dari Kementerian Pendidikan Nasional kepada Komunitas Mata Pelajaran Sekolah.

5.3.2.1.6 Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban atas hibah pemerintah daerah yang disalurkan dalam bentuk tunai untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang dilaksanakan oleh PPKD, SKPD serta Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah dan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp399.264.535,40. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 62. Beban Hibah Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Bebah Hibah PPKD	5.389.200.000,00	5.389.200.000,00	0,00
2	Beban Hibah Perusahaan Daerah	1.446.000.000,00	1.446.000.000,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
4	Beban Hibah SKPD	(6.665.835.464,60)	52.460.125.773,00	(59.125.961.237,60)
	Jumlah	399.364.535,40	59.525.325.773,00	(59.125.961.237,60)

Adapun penjelasan masing-masing beban hibah sebagai berikut :

Tabel 63. Beban Hibah pada PPKD Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Badan KESBANG POL dan LINMAS	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.764.200.000,00	2.764.200.000,00	0,00
4	Dinas Sosial	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5	Bagian Humas	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
6	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata	2.075.000.000,00	2.075.000.000,00	0,00
	Jumlah	5.389.200.000,00	5.389.200.000,00	-

Tabel 64. Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Hibah Perusahaan Daerah	1.446.000.000,00	1.446.000.000,00	0,00
	Jumlah	1.446.000.000,00	1.446.000.000,00	0,00

Tabel 65. Beban Hibah pada Pemerintah Pusat Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
	Jumlah	230.000.000,00	230.000.000,00	-

Sedangkan untuk beban hibah pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh SKPD berupa barang untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar (Rp6.665.835.464,60) terdiri dari :

Tabel 66. Beban Hibah pada SKPD Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.655.680.425,00	(2.655.680.425,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(6.532.264.767,60)	41.720.846.670,00	(48.253.111.437,60)
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	2.758.056.300,00	(2.758.056.300,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	99.500.000,00	(99.500.000,00)
5	Dinas Sosial	(101.278.697,00)	186.398.697,00	(287.677.394,00)
6	Sekretariat Daerah	0,00	919.080.000,00	(919.080.000,00)
7	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	(17.942.000,00)	4.106.213.681,00	(4.124.155.681,00)
8	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	(14.350.000,00)	14.350.000,00	(28.700.000,00)
	Jumlah	(6.665.835.464,60)	52.460.125.773,00	(59.125.961.237,60)

5.3.2.1.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban atas bantuan sosial pemerintah daerah dalam bentuk tunai untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp11.863.520.130,00 yang dilaksanakan oleh PPKD. Tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial.

Tabel 67. Beban Bantuan Sosial Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	706.600.000,00	706.600.000,00	0,00
2	Bagian Pembangunan	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Perekonomian	2.280.960.000,00	2.280.960.000,00	0,00
4	Dinas Sosial	4.718.610.130,00	4.718.610.130,00	0,00
5	Sekretariat Baitul Mal	4.157.350.000,00	4.157.350.000,00	0,00
	Jumlah	11.863.520.130,00	11.863.520.130,00	-

5.3.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp93.507.435.653,42. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat dibawah ini :



Tabel 68. Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD Tahun 2017

No	Uraian	Beban Penyusutan dan Amortisasi
1	Dinas Pendidikan	7.006.777.166,00
2	Dinas Kesehatan	3.699.597.784,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	61.137.574.022,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	230.936.374,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	254.474.423,00
6	Dinas Sosial	184.927.541,00
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	476.888.743,14
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	312.993.080,00
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	1.859.216.908,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.217.198.442,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	325.988.877,00
12	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	224.637.066,00
13	Dinas Perhubungan	1.084.243.997,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	211.782.813,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	856.019.338,00
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	315.819.507,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	201.928.136,00
18	Sekretariat Daerah	3.073.095.579,00
19	Sekretariat DPRK Lhokseumawe	1.357.914.391,00
20	Kecamatan Banda Sakti	138.677.814,00
21	Kecamatan Blang Mangat	93.956.002,00
22	Kecamatan Muara Satu	111.243.383,00
23	Kecamatan Muara Dua	95.316.179,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	509.454.866,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	499.198.108,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.004.375.520,28
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	0,00
28	Inspektorat	147.997.161,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	229.288.286,00
30	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	2.272.149.665,00
31	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	73.371.196
32	Sekretariat Baitul Mal	71.739.435
33	Sekretariat Majelis Adat Aceh	122.435.585,00
34	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	106.866.606,00
	Jumlah	93.508.083.993,42

5.3.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.405.642.280,80. Rincian Beban Penyisihan Piutang tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 69. Mutasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2017

No	Uraian	Beban Penyisihan Piutang
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.555.403.893,85
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	538.175.089,75
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	312.063.297,20
	Jumlah	3.405.642.280,80

5.3.2.1.10 Beban Lain-lain

Beban lain-lain merupakan beban tahun berjalan yang berasal dari belanja modal yang tidak diakui sebagai aset berdasar kebijakan akuntansi (*asset comptable*) dan kerugian dari investasi non permanen dan investasi permanen. Beban lain-lain untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp8.033.474.694,00. Rincian beban lain-lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 70. Beban Lain-lain

No	Uraian	Beban Lain-lain
1	Aset Ekstracomptable Peralatan Mesin	975.975.283,00
2	Aset Ekstracomptable Gedung dan Bangunan	441.506.581,00
3	Aset Ekstracomptable Aset Tetap Lainnya	3.212.426.730,00
4	Aset Extracomptable KDP	44.930.000,00
5	Kerugian Investasi	3.358.636.100,00
	Jumlah	8.033.474.694,00

5.3.2.1.11 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan merupakan beban atas bantuan keuangan kepada pemerintahan desa serta bantuan keuangan kepada partai politik untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp102.423.888.136,59. Rincian beban bantuan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 71. Beban Bantuan Keuangan Tahun 2017

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Bantuan Kepada Partai Politik	467.911.923,00	467.911.923,00	-
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	101.955.976.213,59	108.855.383.095,00	(6.899.406.881,41)
	Jumlah	102.423.888.136,59	109.323.295.018,00	(6.899.406.881,41)

Selisih antara Beban Bantuan Keuangan – LO dengan Belanja Bantuan Keuangan terjadi karena adanya utang beban bantuan keuangan kepada pemerintahan desa tahun 2017 sebesar Rp9.448.811.098,00 dan adanya pembayaran kewajiban tahun yang lalu sebesar Rp7.888.043.260,00 serta koreksi pembayaran kewajiban tahun berjalan sebesar Rp8.460.174.719,41.

5.3.2.1.12 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp708.849.008,00 sedangkan belanja transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar Rp708.849.008,00.

5.3.2.1.13 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp139.493.371,00 dan Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp139.493.371,00.

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal tahun 2017 sebesar Rp1.229.914.306.661,30 merupakan saldo ekuitas tahun 2016.



5.3.2. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan ekuitas dari Surplus/Defisit Laporan Operasional sebesar Rp201.005.415.101,88 merupakan selisih antara :

Pendapatan LO	915.352.626.636,05
Beban LO	714.140.812.534,17
Surplus (Defisit)	201.211.814.101,88
Pos Luar Biasa	(206.399.000,00)
	201.005.415.101,88

5.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan adalah sebesar Rp47.732.488.081,70.

Tabel 72. Dampak kumulatif perubahan kebijakan

No	Uraian	Jumlah
	Lain-lain	
1	Koreksi selisih revaluasi aset tetap	205.591.507,00
2	Koreksi ekuitas lainnya	47.526.896.574,70
	Jumlah Lain-lain	47.732.488.081,70

Rincian koreksi selisih revaluasi aset tetap dan koreksi ekuitas lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 73. Koreksi selisih revaluasi aset tetap

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	806.001,00
2	Koreksi Akumulasi Penyusutan Komputer	15.485.506,00
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Studio	300.000,00
4	Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	189.000.000,00
	Jumlah Lain-lain	205.591.507,00

Tabel 74. Koreksi ekuitas lainnya

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi Akm Penyusutan akibat perubahan kebijakan	288.707.739,00
2	Koreksi Aset Lancar	(82.558.900,00)



3	Koreksi Laba Dithahan PDAM	(506.523.664,00)
4	Koreksi Aset Tetap	37.905.579.737,41
5	Koreksi Aset Lainnya	122.262.000,00
6	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka (jatuh tempo)	547.059.866,50
7	Koreksi utang akibat validasi	7.488.006.992,31
8	Koreksi pendapatan	(421.522.663,94)
9	Koreksi beban	2.185.885.467,42
	Jumlah Lain-lain	47.526.896.574,70

5.3.4. Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir sebesar Rp1.478.652.209.844,88 merupakan saldo ekuitas awal sebesar Rp1.229.914.306.661,34 ditambah dengan surplus/defisit laporan operasional sebesar Rp 201.005.415.101,88 ditambah dengan lain-lain dampak kumulatif perubahan kebijakan sebesar Rp47.732.488.081,70.

5.5 Penjelasan Pos-pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan posisi Neraca tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut.

5.5.1 Aset

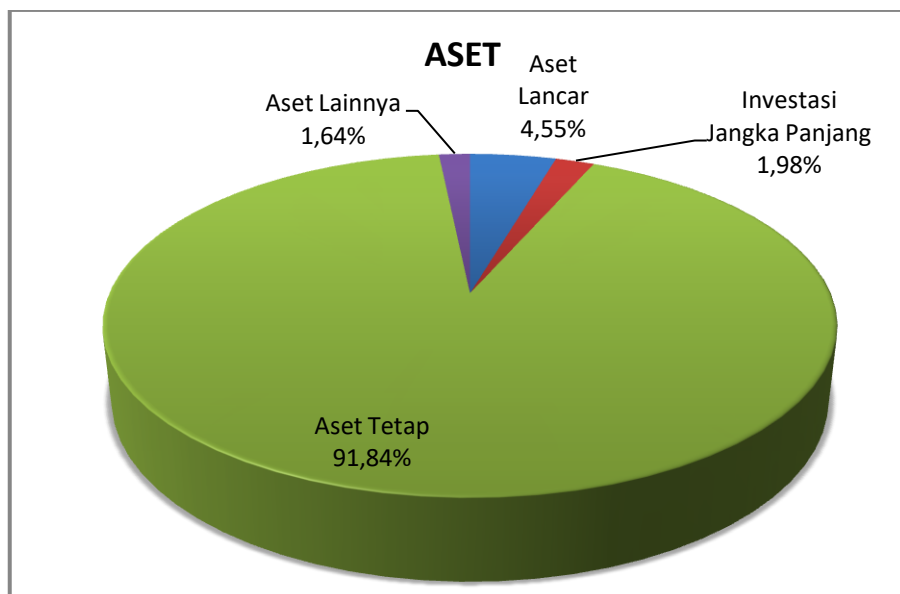
Saldo Aset per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.572.886.387.731,75 dan tahun 2016 sebesar Rp1.478.721.970.563,59 disajikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 75. Rincian Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	Uraian	2017	2016
1	Aset Lancar	71.454.452.844,71	61.132.392.909,96
2	Investasi Jangka Panjang	32.137.605.063,00	31.460.381.397,00
3	Aset Tetap	1.443.566.365.751,74	1.361.939.179.519,33
4	Aset Lainnya	25.727.964.072,30	24.190.016.737,30
	Jumlah	1.572.886.387.731,75	1.478.721.970.563,59

Berdasarkan rincian pada Tabel 71 di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp94.164.417.168,16. Berikut adalah komposisi Aset Kota Lhokseumawe.

Gambar 11. Perbandingan Komposisi Aset per 31 Desember 2017



5.5.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp71.454.452.844,71, untuk tahun 2016 sebesar Rp61.132.392.909,96, terjadi peningkatan sebesar Rp10.322.059.934,75, komposisi aset lancar dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 76. Rincian Aset Lancar Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	Uraian	2017	2016
1	Kas dan Setara Kas	55.346.327.230,55	24.848.296.572,23
2	Piutang	11.293.394.937,49	18.729.669.972,13
3	Persediaan	4.538.618.160,00	17.276.339.909,00
4	Beban Dibayar Dimuka	276.112.516,67	278.086.456,60
	Jumlah	71.454.452.844,71	61.132.392.909,96



5.5.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp55.346.327.230,55. Untuk tahun 2016 sebesar Rp24.848.296.572,23, terjadi peningkatan saldo kas dan setara kas sebesar Rp30.498.030.658,32 dibandingkan dengan tahun lalu. Rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 77. Rincian Jumlah Kas dan Setara Kas

No	Uraian	2017	2016
1	Kas di Kas Daerah	50.324.035.747,55	20.023.475.235,23
2	Kas di Bendahara Penerimaan	6.765.000,00	1.100.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.859.258,00	23.004.600,00
4	Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	54.853.003,00
5	Kas di Bendahara JKN	5.008.667.225,00	4.745.863.734,00
	Jumlah	55.346.327.230,55	24.848.296.572,23

5.5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp50.324.035.747,55 sedangkan Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2016 adalah Rp20.023.475.235,23.

5.5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6.765.000,00. Hasil Opname Kas Inspektorat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp6.765.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari tahun 2018.

5.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp6.859.258,00 yang terdiri dari sisa kas pada Dinas Sosial sebesar Rp6.784.258,00, dan Rp75.000,00 pada Kantor Camat Blang Mangat (merupakan pajak pusat yang belum disetor). Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada Bulan Januari 2017.

5.5.1.1.1.4 Kas di Bendahara JKN

Saldo Kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.996.044.274,00 yang terdapat pada 6 (enam) Puskesmas. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 78. Rincian Kas di Bendahara JKN

No	Uraian	2017	2016
1	Puskesmas Muara Satu	507.675.553,00	576.322.246,00
2	Puskesmas Muara Dua	1.309.538.110,00	1.294.393.911,00
3	Puskesmas Banda Sakti	1.601.478.169,00	1.447.068.144,00
4	Puskesmas Blang Mangat	967.456.317,00	701.878.540,00
5	Puskesmas Blang Cut	58.097.859,00	130.728.478,00
6	Puskesmas Mon Geudong	551.798.266,00	595.472.415,00
	Jumlah	4.996.044.274,00	4.745.863.734,00

Kas di Bendahara JKN tersebut merupakan saldo yang terdapat pada rekening di Bank BNI dan Bank BRI setelah di rekonsiliasi.

5.5.1.1.2 Piutang

Piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp11.293.394.937,49. Untuk tahun 2016 piutang sebesar Rp18.729.669.972,13, terdapat penurunan piutang sebesar Rp7.436.275.034,64. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 79. Rincian Piutang

No	Uraian	2017	2016
1	Piutang Pendapatan	30.197.631.410,84	34.228.264.164,68
2	Piutang Lainnya	825.681.880,00	825.681.880,00
3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(19.729.918.353,35)	(16.324.276.072,55)
	Jumlah	11.293.394.937,49	18.729.669.972,13

5.5.1.1.2.1 Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan per 31 Desember 2017 sebesar Rp30.197.631.410,84

Tabel 80. Rincian Piutang Pendapatan

No	Uraian	2017	2016
1	Piutang Pajak Daerah	24.896.797.859,00	23.973.338.956,00
2	Piutang Retribusi Daerah	2.269.251.851,00	1.677.881.566,00
3	Piutang Dana Bagi Hasil dari Pusat	3.031.581.700,84	8.577.043.642,68
	Jumlah	30.197.631.410,84	34.228.264.164,68

5.5.1.1.2.1.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp24.896.797.859,00 dan untuk tahun 2016 sebesar Rp23.973.338.956,00, terjadi kenaikan piutang pajak sebesar Rp923.458.903,00, hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi kewajibannya. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 81. Rincian Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	2017	2016
1	Piutang Pajak Hotel	569.819.400,00	512.990.000,00
2	Piutang Pajak Restoran	74.507.850,00	44.543.500,00
3	Piutang Pajak Parkir	42.840.000,00	18.240.000,00
4	Pajak Hiburan	0,00	0,00
5	Pajak Air Bawah Tanah	0,00	0,00
6	Piutang PPJ Non PLN	2.294.828.936,00	4.201.552.575,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan	21.914.801.673,00	19.196.012.881,00
	Jumlah	24.896.797.859,00	23.973.338.956,00

5.5.1.1.2.1.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp2.269.365.243,00,00. Untuk tahun 2016 Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp1.677.881.566,00, terjadi kenaikan piutang retribusi daerah sebesar Rp591.483.677,00. Rincian piutang retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 82. Rincian Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	2017	2016
1	Piutang Retribusi Los/Kios	1.280.530.000,00	878.930.000,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	374.345.000,00	332.680.000,00
3	Piutang Retribusi Parkir	304.914.000,00	205.950.000,00
4	Piutang Retribusi Menara	206.231.051,00	206.231.051,00
5	Izin Gangguan (HO) (KP2T)	46.307.800,00	6.626.515,00
6	Retribusi Sampah	56.924.000,00	47.464.000,00
	Jumlah	2.269.251.851,00	1.677.881.566,00

5.5.1.1.2.1.3 Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang dana bagi hasil per 31 Desember tahun 2017 adalah sebesar Rp3.031.581.700,84 tahun 2016 sebesar Rp8.577.043.642,68, terjadi penurunan piutang sebesar Rp5.545.461.941,84. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 83. Rincian Piutang Dana Bagi Hasil

No	Uraian	2017	2016
1	Piutang Dana Bagi Hasil dari Pusat	3.031.581.700,84	8.577.043.642,68
	Jumlah	3.031.581.700,84	8.577.043.642,68

5.5.1.1.2.2 Piutang Lainnya

Piutang lain-lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp825.681.880,00. Untuk tahun 2016 sebesar Rp825.681.880,00, tidak terjadi penurunan piutang karena tahun 2017 BPR Sabee Meusampe tidak menyeter pengembalian piutang. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 84. Rincian Piutang Lain-lain

No	Uraian	2017	2016
1	Piutang dari jaminan uang muka rekanan pada Dinas Pekerjaan Umum	45.523.637,00	45.523.637,00
2	BPR Sabee Meusampe	780.158.243,00	780.158.243,00
	Jumlah	825.681.880,00	825.681.880,00

5.5.1.1.2.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp19.729.918.353,35. Untuk tahun 2016 nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp16.324.276.072,55. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 85. Nilai Penyisihan Piutang

No	Uraian	2017	2016
	Pajak Daerah	18.144.798.703,85	15.589.394.810,00
1	Pajak Hotel	417.030.470,00	304.287.000,00
2	Pajak Restoran	25.696.967,50	15.328.250,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00
4	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	1.986.212.180,50	1.091.193.427,50
5	Pajak Parkir	3.042.000,00	912.000,00
6	Pajak Air Tanah	0,00	0,00
7	Pajak Bumi Bangunan	15.712.817.085,85	14.177.674.132,50
	RETRIBUSI DAERAH	1.149.516.891,00	611.341.801,25
1	Los / Kios	603.529.500,00	348.288.750,00
2	Pasar	208.723.250,00	89.523.000,00
3	Parkir	100.473.200,00	57.635.000,00
4	Izin Gangguan (HO)	2.315.390,00	331.325,75
5	Retribusi Sampah	28.244.500,00	12.448.200,00
6	Menara	206.231.051,00	103.115.525,50



Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	Uraian	2017	2016
	PIUTANG TRANSFER	0,00	0,00
1	Piutang Transfer	0,00	0,00
	PIUTANG LAINNYA	435.602.758,50	123.539.461,30
1	Piutang Jaminan Uang Muka	45.523.637,00	45.523.637,00
2	BPR Sabee Meusampe	390.079.121,50	78.015.824,30
	Jumlah	19.729.918.353,35	16.324.276.072,55

Tabel 86. Perhitungan Penyisihan Piutang

NO	JENIS PAJAK	SALDO AWAL PIUTANG (SEBELUM PENYISIHAN)	PENYISIHAN PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
			≤ 1 Tahun	> 1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun		
			5%	10%	50%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PAJAK DAERAH	24.896.797.859,00	181.256.890,25	222.991.536,60	1.301.194.411,00	16.439.355.866,00	18.144.798.703,85	6.751.999.155,15
1	Pajak Hotel	569.819.400,00	3.176.470,00	3.604.000,00	60.000.000,00	350.250.000,00	417.030.470,00	152.788.930,00
2	Pajak Restoran	74.507.850,00	1.936.467,50	944.500,00	3.517.500,00	19.298.500,00	25.696.967,50	48.810.882,50
3	Pajak Hiburan		-	-	-	-	-	-
4	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	2.294.828.936,00	-	-	308.616.755,50	1.677.595.425,00	1.986.212.180,50	308.616.755,50
5	Pajak Parkir	42.840.000,00	1.242.000,00	1.800.000,00	-	-	3.042.000,00	39.798.000,00
6	Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-	-	-
7	Pajak Bumi Bangunan	21.914.801.673,00	174.901.952,75	216.643.036,60	929.060.155,50	14.392.211.941,00	15.712.817.085,85	6.201.984.587,15
	RETRIBUSI DAERAH	2.269.251.851,00	35.445.340,00	19.552.500,00	270.301.000,00	824.218.051,00	1.149.516.891,00	1.119.734.960,00
1	Los / Kios	1.280.530.000,00	22.378.500,00	10.108.500,00	160.832.500,00	410.210.000,00	603.529.500,00	677.000.500,00
2	Pasar	374.345.000,00	2.683.250,00	3.950.000,00	79.090.000,00	123.000.000,00	208.723.250,00	165.621.750,00
3	Parkir	304.914.000,00	7.198.200,00	4.750.000,00	24.925.000,00	63.600.000,00	100.473.200,00	204.440.800,00
4	Ijin Gangguan (HO)	46.307.800,00	2.315.390,00	-	-	-	2.315.390,00	43.992.410,00
5	Retribusi BLHK	56.924.000,00	870.000,00	744.000,00	5.453.500,00	21.177.000,00	28.244.500,00	28.679.500,00
6	Menara	206.231.051,00	-	-	-	206.231.051,00	206.231.051,00	-
	PIUTANG TRANSFER	3.031.581.700,84	-	-	-	-	-	3.031.581.700,84
1	Piutang Transfer	3.031.581.700,84	-	-	-	-	-	3.031.581.700,84
	PIUTANG LAINNYA	825.681.880,00	-	-	390.079.121,50	45.523.637,00	435.602.758,50	390.079.121,50
1	Piutang Lainnya	45.523.637,00	-	-	-	45.523.637,00	45.523.637,00	-
2	Bpr Sabee Meusampe	780.158.243,00	-	-	390.079.121,50	-	390.079.121,50	390.079.121,50
		31.023.313.290,84	216.702.230,25	242.544.036,60	1.961.574.532,50	17.309.097.554,00	19.729.918.353,35	11.293.394.937,49



5.5.1.1.2.4 Beban di Bayar Dimuka

Akun Beban di Bayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2017 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2017 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe. Saldo Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp276.112.516,67. Untuk tahun 2016 sebesar Rp278.086.456,60. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 87. Rincian Beban Di Bayar Dimuka

No	Uraian	2017	2016
	<u>Sewa Kantor/Gudang:</u>		
1	Dinas Sosial	25.753.424,66	30.356.164,39
2	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	0,00	18.698.630,14
3	Badan Kesatuan Bangsa Politik	12.931.506,85	5.245.901,64
4	Dinas Perhubungan	0,00	30.178.082,19
5	Inspektorat	9.342.465,75	9.316.939,89
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.383.561,64	4.371.584,70
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	13.150.684,93	0,00
	Jumlah Sewa Kantor/Gudang	65.561.643,83	98.167.302,95
	<u>Asuransi Kendaraan:</u>		
1	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	210.550.872,84	179.919.153,65
	Jumlah Asuransi Kendaraan	210.550.872,84	179.919.153,65
	Jumlah	276.112.516,67	278.086.456,60

Tabel 88. Perhitungan Beban Sewa di Bayar Dimuka

No	SKPK	No. Kontrak / Tanggal	Jenis Sewa	SP2D		Jangka Waktu				Tarif	Masa Manfaat dalam 2017		Manfaat 2018	Alokasi 2017
				Nomor	Nilai	Mulai	Berakhir	Lama						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10=(6/9)	11=(7-8)		12=(10x11)	13=(6-12)
1	BADAN KESBANGPOL	Nomor:200/01/17 01/03/2017	Gedung Kantor	0079/L/LS/2017	80.000.000,00	01/03/17	28/02/18	365	Hari	219.178,08	59	Hari	12.931.506,85	67.068.493,15
2	DINAS SOSIAL	Nomor: 066/01/2017 13 Feb 2017	Gedung Kantor	0159/L/LS/2017	80.000.000,00	14/03/17	03/03/18	365	Hari	219.178,08	62	Hari	13.589.041,10	66.410.958,90
3	DINAS SOSIAL	Nomor: 066/02/2017 13 Mar 207	Gedung Kantor	0199/L/LS/2017	40.000.000,00	20/04/17	21/04/18	365	Hari	109.589,04	111	Hari	12.164.383,56	27.835.616,44
4	BADAN PEMB.PEREMPUN, PAPPKB	Nomor: 900/01/2017 02 Feb 2017	Gedung Kantor	0106/L/LS/2017	50.000.000,00	01/02/17	01/02/18	365	Hari	136.986,30	32	Hari	4.383.561,64	45.616.438,36
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Nomor: 001/2017 03 Mar 2017	Gedung Kantor	0238/L/LS/2017	80.000.000,00	01/03/17	01/03/18	365	Hari	219.178,08	60	Hari	13.150.684,93	66.849.315,07
6	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Nomor: 845.1/001/2017 03 Apr 2017	Gedung Kantor	0186/L/LS/2017	80.000.000,00	01/01/17	31/12/17	365	Hari	219.178,08	0	Hari	-	80.000.000,00
7	SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKESEUMAWE	Nomor: 027/03/2017 02 Jan 2017	Rumah Walikota	1580/L/LS/2017	134.500.000,00	01/01/17	31/12/17	365	Hari	368.493,15	0	Hari	-	134.500.000,00



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe**

No	SKPK	No. Kontrak / Tanggal	Jenis Sewa	SP2D		Jangka Waktu				Tarif	Masa Manfaat dalam 2017		Manfaat 2018	Alokasi 2017
				Nomor	Nilai	Mulai	Berakhir	Lama						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10=(6/9)	11=(7-8)		12=(10x11)	13=(6-12)
8	SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE	Nomor: 027/001/2017 02 Jan 2017	Rumah Wakil Walikota	1705/L/LS/ 2017	63.000.000,00	02/01/17	30/06/18	181	Hari	348.066,30	0	Hari	-	63.000.000,00
9	SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE	Nomor: 027/004/20167 02 Jan 2017	Rumah Wakil Walikota	4674/L/LS/ 2017	63.000.000,00	01/07/17	31/12/17	181	Hari	348.066,30	0	Hari	-	63.000.000,00
10	SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE	Nomor: 027/004/20167 02 Jan2017	Rumah Sekretari s Daerah	1581/L/LS/ 2017	60.000.000,00	01/01/17	31/12/17	181	Hari	331.491,71	0	Hari	-	60.000.000,00
11	INSPEKTORAT	Nomor: 027/90/2017 06 Jan 2017	Gedung Kantor	0049/L/LS/ 2017	110.000.000,00	01/02/17	31/01/17	365	Hari	301.369,86	31	Hari	9.342.465,75	100.657.534,25
12	DINAS SYARIAT ISLAM	Nomor: 845.1/001/201 7 03 Feb2017	Gedung Kantor	0050/L/LS/ 2017	45.000.000,00	01/01/17	31/12/17	365	Hari	123.287,67	0	Hari	-	45.000.000,00
13	CATATAN SIPIL	Nomor: ist/01/2017 21 April 2017	Gedung Kantor	0304/L/LS/ 2017	44.550.000,00	01/01/17	31/12/17	365	Hari	122.054,79	0	Hari	-	44.550.000,00
14	DINAS SYARIAT ISLAM	Nomor: 845.1/018/201 7 11 Okt 2017	Gedung Asrama PPTQ	5399/L/LS/ 2017	9.000.000,00	01/10/17	30/12/17	91	Hari	98.901,10	0	Hari	-	9.000.000,00
Jumlah					939.050.000,00								65.561.643,84	873.488.356,16

Tabel 89. Perhitungan Asuransi di Bayar Dimuka

No	Jenis Asuransi	No. Polis	No. SSK	Nilai Premi			Nilai per Hari	SP2D		Jangka Waktu		Masa Manfaat			
				Nilai Per Unit	Materai + polis	Total		Nomor	Nilai	Mulai	Berakhir	Jlh Hari Diman- faatkan	Jlh Hari Belum Di- manfaat- kan	Nilai Di- manfaatkan	Nilai Belum Diman- faatkan
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8			9	10	11	12	13 (8x11)	14 (8x12)
1	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2105170 0038	640/ 019/ 2017	4.944.367	2.000	4.946.367	13.551,69	3816/L/LS/ 2017	47.442.300,09	24 Mei 2017	24 Mei 2018	221	144	2.994.923,61	1.951.443,44
2	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2105170 0038	640/ 019/ 2017	3.687.392	2.000	3.689.392	10.107,92	3816/L/LS/ 2017		24 Mei 2017	24 Mei 2018	221	144	2.233.850,81	1.455.540,80
3	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2105170 0038	640/ 019/ 2017	3.887.864	2.000	3.889.864	10.657,16	3816/L/LS/ 2017		24 Mei 2017	24 Mei 2018	221	144	2.355.232,97	1.534.631,44
4	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2105170 0038	640/ 019/ 2017	4.019.200	2.000	4.021.200	11.016,99	3816/L/LS/ 2017		24 Mei 2017	24 Mei 2018	221	144	2.434.753,97	1.586.446,03
5	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2105170 0038	640/ 019/ 2017	3.894.750	2.000	3.896.750	10.676,03	3816/L/LS/ 2017		24 Mei 2017	24 Mei 2018	221	144	2.359.402,05	1.537.347,95
6	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2105170 0038	640/ 019/ 2017	4.021.575	2.000	4.023.575	11.023,49	3816/L/LS/ 2017		24 Mei 2017	24 Mei 2018	221	144	2.436.191,99	1.587.383,01
7	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2105170 0038	640/ 019/ 2017	4.529.925	2.000	4.531.925	12.416,23	3816/L/LS/ 2017		24 Mei 2017	24 Mei 2018	221	144	2.743.987,48	1.787.937,54
8	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2105170 0038	640/ 019/ 2017	4.554.240	2.000	4.556.240	12.482,85	3816/L/LS/ 2017		24 Mei 2017	24 Mei 2018	221	144	2.758.709,70	1.797.530,30
9	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2105170 0038	640/ 019/ 2017	4.554.240	2.000	4.556.240	12.482,85	3816/L/LS/ 2017		24 Mei 2017	24 Mei 2018	221	144	2.758.709,70	1.797.530,30
10	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2105170 0038	640/ 019/ 2017	4.909.600	2.000	4.911.600	13.456,44	3816/L/LS/ 2017		24 Mei 2017	24 Mei 2018	221	144	2.973.872,88	1.937.727,12
11	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2105170 0038	640/ 019/ 2017	4.417.147	2.000	4.419.147	12.107,25	3816/L/LS/ 2017		24 Mei 2017	24 Mei 2018	221	144	2.675.702,70	1.743.444,30



Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	Jenis Asuransi	No. Polis	No. SSK	Nilai Premi			Nilai per Hari	SP2D		Jangka Waktu		Masa Manfaat			
				Nilai Per Unit	Materai + polis	Total		Nomor	Nilai	Mulai	Berakhir	Jlh Hari Dimanfaatkan	Jlh Hari Belum Dimanfaatkan	Nilai Dimanfaatkan	Nilai Belum Dimanfaatkan
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8			9	10	11	12	13 (8x11)	14 (8x12)
12	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2106170 0017	640/ 021/ 2017	6.421.104	2.445	6.423.549	17.598,76	3817/L/LS/ 2017	47.446.487,00	5 Juni 2017	5 Juni 2018	209	156	3.678.141,76	2.745.407,24
13	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2106170 0017	640/ 021/ 2017	5.808.202	2.445	5.810.647	15.919,58	3817/L/LS/ 2017		5 Juni 2017	5 Juni 2018	209	156	3.327.192,39	2.483.454,61
14	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2106170 0017	640/ 021/ 2017	5.195.538	2.445	5.197.983	14.241,05	3817/L/LS/ 2017		5 Juni 2017	5 Juni 2018	209	156	2.976.379,31	2.221.603,69
15	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2106170 0017	640/ 021/ 2017	4.555.048	2.445	4.557.493	12.486,28	3817/L/LS/ 2017		5 Juni 2017	5 Juni 2018	209	156	2.609.632,98	1.947.860,02
16	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2106170 0017	640/ 021/ 2017	6.573.560	2.444	6.576.004	18.016,45	3817/L/LS/ 2017		5 Juni 2017	5 Juni 2018	209	156	3.765.437,91	2.810.566,09
17	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2106170 0017	640/ 021/ 2017	5.284.410	2.444	5.286.854	14.484,53	3817/L/LS/ 2017		5 Juni 2017	5 Juni 2018	209	156	3.027.267,08	2.259.586,92
18	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2106170 0017	640/ 021/ 2017	3.641.100	2.444	3.643.544	9.982,31	3817/L/LS/ 2017		5 Juni 2017	5 Juni 2018	209	156	2.086.303,28	1.557.240,72
19	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2106170 0017	640/ 021/ 2017	5.036.175	2.444	5.038.619	13.804,44	3817/L/LS/ 2017		5 Juni 2017	5 Juni 2018	209	156	2.885.127,04	2.153.491,96
20	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2106170 0017	640/ 021/ 2017	4.909.350	2.444	4.911.794	13.456,97	3817/L/LS/ 2017		5 Juni 2017	5 Juni 2018	209	156	2.812.506,70	2.099.287,30
21	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2107000 18	640/ 023/ 2017	5.118.616	3.143	5.121.759	14.032,22	4128/L/LS/ 2017	39.564.876,85	4 Juli 2017	4 Juli 2018	180	185	2.525.798,87	2.595.959,94
22	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2107000 18	640/ 023/ 2017	4.909.350	3.143	4.912.493	13.458,88	4128/L/LS/ 2017		4 Juli 2017	4 Juli 2018	180	185	2.422.599,29	2.489.893,71
23	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2107000 18	640/ 023/ 2017	5.118.616	3.143	5.121.759	14.032,22	4128/L/LS/ 2017		4 Juli 2017	4 Juli 2018	180	185	2.525.798,87	2.595.959,94
24	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2107000 18	640/ 023/ 2017	7.743.919	3.143	7.747.062	21.224,83	4128/L/LS/ 2017		4 Juli 2017	4 Juli 2018	180	185	3.820.468,91	3.926.593,05
25	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2107000 18	640/ 023/ 2017	5.310.598	3.143	5.313.741	14.558,19	4128/L/LS/ 2017		4 Juli 2017	4 Juli 2018	180	185	2.620.474,77	2.693.265,74
26	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2107000 18	640/ 023/ 2017	5.118.616	3.143	5.121.759	14.032,22	4128/L/LS/ 2017		4 Juli 2017	4 Juli 2018	180	185	2.525.798,87	2.595.959,94
27	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2107000 18	640/ 023/ 2017	6.223.163	3.142	6.226.305	17.058,37	4128/L/LS/ 2017		4 Juli 2017	4 Juli 2018	180	185	3.070.506,55	3.155.798,40
28	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2107170 0031	640/ 025/ 2017	5.036.175	3.143	5.039.318	13.806,35	4729/L/LS/ 2017	33.079.642,00	28 Juli 2017	28 Juli 2018	156	209	2.153.790,71	2.885.527,29
29	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2107170 0031	640/ 025/ 2017	5.036.175	3.143	5.039.318	13.806,35	4729/L/LS/ 2017		28 Juli 2017	28 Juli 2018	156	209	2.153.790,71	2.885.527,29
30	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2107170 0031	640/ 025/ 2017	4.402.050	3.143	4.405.193	12.069,02	4729/L/LS/ 2017		28 Juli 2017	28 Juli 2018	156	209	1.882.767,42	2.522.425,58
31	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2107170 0031	640/ 025/ 2017	4.402.050	3.143	4.405.193	12.069,02	4729/L/LS/ 2017		28 Juli 2017	28 Juli 2018	156	209	1.882.767,42	2.522.425,58
32	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2107170 0031	640/ 025/ 2017	5.041.761	3.143	5.044.904	13.821,65	4729/L/LS/ 2017		28 Juli 2017	28 Juli 2018	156	209	2.156.178,15	2.888.725,85
33	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2107170 0031	640/ 025/ 2017	5.041.761	3.143	5.044.904	13.821,65	4729/L/LS/ 2017		28 Juli 2017	28 Juli 2018	156	209	2.156.178,15	2.888.725,85
34	PT. Jasaraharja Putera	1080202 2107170 0031	640/ 025/ 2017	4.097.670	3.142	4.100.812	11.235,10	4729/L/LS/ 2017		28 Juli 2017	28 Juli 2018	156	209	1.752.675,81	2.348.136,19



*Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe*

No	Jenis Asuransi	No. Polis	No. SSK	Nilai Premi			Nilai per Hari	SP2D		Jangka Waktu		Masa Manfaat			
				Nilai Per Unit	Materai + polis	Total		Nomor	Nilai	Mulai	Berakhir	Jlh Hari Dimanfaatkan	Jlh Hari Belum Dimanfaatkan	Nilai Dimanfaatkan	Nilai Belum Dimanfaatkan
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8			9	10	11	12	13 (8x11)	14 (8x12)
35	PT. Jasaraharja Putera	108020221111700014	640/035/2017	13.106.145	22.000	13.128.145	35.967,52	6433/L/LS/2017	13.128.145,00	14 November 2017	14 November 2018	47	318	1.690.473,47	11.437.671,53
1	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500001	640/014/2017	5.048.858	5.290	5.054.148	13.846,98	3665/L/LS/2017	39.925.000,00	21 April 2017	21 April 2018	254	111	3.517.132,78	1.537.014,72
2	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500001	640/014/2017	4.996.125	5.290	5.001.415	13.702,51	3665/L/LS/2017		21 April 2017	21 April 2018	254	111	3.480.436,74	1.520.978,26
3	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500001	640/014/2017	4.644.286	5.290	4.649.576	12.738,56	3665/L/LS/2017		21 April 2017	21 April 2018	254	111	3.235.595,18	1.413.980,57
4	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500001	640/014/2017	4.644.286	5.290	4.649.576	12.738,56	3665/L/LS/2017		21 April 2017	21 April 2018	254	111	3.235.595,18	1.413.980,57
5	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500001	640/014/2017	5.613.063	5.290	5.618.353	15.392,75	3665/L/LS/2017		21 April 2017	21 April 2018	254	111	3.909.757,63	1.708.594,87
6	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500001	640/014/2017	4.661.500	5.290	4.666.790	12.785,73	3665/L/LS/2017		21 April 2017	21 April 2018	254	111	3.247.574,41	1.419.215,59
7	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500001	640/014/2017	4.661.500	5.290	4.666.790	12.785,73	3665/L/LS/2017		21 April 2017	21 April 2018	254	111	3.247.574,41	1.419.215,59
8	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500001	640/014/2017	5.613.063	5.290	5.618.353	15.392,75	3665/L/LS/2017		21 April 2017	21 April 2018	254	111	3.909.757,98	1.708.595,02
9	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500003	640/015/2017	4.759.706	4.294	4.764.000	13.052,06	3666/L/LS/2017	47.640.000,00	25 April 2017	25 April 2018	250	115	3.263.014,03	1.500.986,45
10	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500003	640/015/2017	4.759.706	4.294	4.764.000	13.052,05	3666/L/LS/2017		25 April 2017	25 April 2018	250	115	3.263.013,70	1.500.986,30
11	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500003	640/015/2017	4.759.706	4.294	4.764.000	13.052,05	3666/L/LS/2017		25 April 2017	25 April 2018	250	115	3.263.013,70	1.500.986,30
12	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500003	640/015/2017	4.759.706	4.294	4.764.000	13.052,05	3666/L/LS/2017		25 April 2017	25 April 2018	250	115	3.263.013,70	1.500.986,30
13	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500003	640/015/2017	4.759.706	4.294	4.764.000	13.052,05	3666/L/LS/2017		25 April 2017	25 April 2018	250	115	3.263.013,70	1.500.986,30
14	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500003	640/015/2017	4.759.706	4.294	4.764.000	13.052,05	3666/L/LS/2017		25 April 2017	25 April 2018	250	115	3.263.013,70	1.500.986,30
15	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500003	640/015/2017	4.759.706	4.294	4.764.000	13.052,05	3666/L/LS/2017		25 April 2017	25 April 2018	250	115	3.263.013,70	1.500.986,30
16	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500003	640/015/2017	4.759.706	4.294	4.764.000	13.052,05	3666/L/LS/2017		25 April 2017	25 April 2018	250	115	3.263.013,70	1.500.986,30
17	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500003	640/015/2017	4.759.706	4.294	4.764.000	13.052,05	3666/L/LS/2017		25 April 2017	25 April 2018	250	115	3.263.013,70	1.500.986,30
18	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500003	640/015/2017	4.759.706	4.294	4.764.000	13.052,05	3666/L/LS/2017		25 April 2017	25 April 2018	250	115	3.263.013,70	1.500.986,30
19	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500004	640/010/2017	4.640.766	4.285	4.645.051	12.726,17	3668/L/LS/2017	49.880.000,00	27 April 2017	27 April 2018	248	117	3.156.089,45	1.488.961,55
20	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500004	640/010/2017	4.640.766	4.285	4.645.051	12.726,17	3668/L/LS/2017		27 April 2017	27 April 2018	248	117	3.156.089,45	1.488.961,55
21	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500004	640/010/2017	5.019.997	4.285	5.024.282	13.765,15	3668/L/LS/2017		27 April 2017	27 April 2018	248	117	3.413.758,39	1.610.523,11
22	PT. Asuransi Parolamas	P101080202170500004	640/010/2017	4.861.157	4.285	4.865.442	13.329,98	3668/L/LS/2017		27 April 2017	27 April 2018	248	117	3.305.834,22	1.559.607,28



Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	Jenis Asuransi	No. Polis	No. SSK	Nilai Premi			Nilai per Hari	SP2D		Jangka Waktu		Masa Manfaat			
				Nilai Per Unit	Materai + polis	Total		Nomor	Nilai	Mulai	Berakhir	Jlh Hari Dimanfaatkan	Jlh Hari Belum Dimanfaatkan	Nilai Dimanfaatkan	Nilai Belum Dimanfaatkan
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8			9	10	11	12	13 (8x11)	14 (8x12)
23	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500004	640/ 010/ 2017	6.485.400	4.285	6.489.685	17.779,96			27 April 2017	27 April 2018	248	117	4.409.429,81	2.080.255,19
24	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500004	640/ 010/ 2017	5.126.221	4.285	5.130.506	14.056,18	3668/L/LS/ 2017		27 April 2017	27 April 2018	248	117	3.485.932,67	1.644.573,08
25	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500004	640/ 010/ 2017	4.759.706	4.285	4.763.991	13.052,03	3668/L/LS/ 2017		27 April 2017	27 April 2018	248	117	3.236.903,80	1.527.087,68
26	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500004	640/ 010/ 2017	4.725.511	4.286	4.729.797	12.958,35	3668/L/LS/ 2017		27 April 2017	27 April 2018	248	117	3.213.670,12	1.516.126,63
27	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500004	640/ 010/ 2017	4.817.918	4.286	4.822.204	13.211,52	3668/L/LS/ 2017		27 April 2017	27 April 2018	248	117	3.276.456,23	1.545.747,50
28	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500004	640/ 010/ 2017	4.759.706	4.286	4.763.992	13.052,03	3668/L/LS/ 2017		27 April 2017	27 April 2018	248	117	3.236.904,48	1.527.088,00
29	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500007	640/ 012/ 2017	5.258.000	14.000	5.272.000	14.443,84	3777/L/LS/ 2017	15.816.000,00	8 Mei 2017	8 Mei 2018	237	128	3.423.189,04	1.848.810,96
30	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500007	640/ 012/ 2017	5.258.000	14.000	5.272.000	14.443,84	3777/L/LS/ 2017		8 Mei 2017	8 Mei 2018	237	128	3.423.189,04	1.848.810,96
31	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500007	640/ 012/ 2017	5.258.000	14.000	5.272.000	14.443,84	3777/L/LS/ 2017		8 Mei 2017	8 Mei 2018	237	128	3.423.189,04	1.848.810,96
32	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500006	640/ 013/ 2017	5.150.540	6.128	5.156.668	14.127,86	3778/L/LS/2 017	36.007.999,56	19 Mei 2017	19 Mei 2018	226	139	3.192.895,54	1.963.772,04
33	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500006	640/ 013/ 2017	5.150.540	6.128	5.156.668	14.127,86	3778/L/LS/2 017		19 Mei 2017	19 Mei 2018	226	139	3.192.895,54	1.963.772,04
34	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500006	640/ 013/ 2017	5.150.540	6.128	5.156.668	14.127,86	3778/L/LS/2 017		19 Mei 2017	19 Mei 2018	226	139	3.192.895,54	1.963.772,04
35	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500006	640/ 013/ 2017	5.150.540	6.128	5.156.668	14.127,86	3778/L/LS/2 017		19 Mei 2017	19 Mei 2018	226	139	3.192.895,54	1.963.772,04
36	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500006	640/ 013/ 2017	5.150.540	6.128	5.156.668	14.127,86	3778/L/LS/2 017		19 Mei 2017	19 Mei 2018	226	139	3.192.895,54	1.963.772,04
37	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500006	640/ 013/ 2017	5.150.540	6.128	5.156.668	14.127,86	3778/L/LS/2 017		19 Mei 2017	19 Mei 2018	226	139	3.192.895,54	1.963.772,04
38	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 500006	640/ 013/ 2017	5.061.867	6.127	5.067.994	13.884,92	3778/L/LS/2 017		19 Mei 2017	19 Mei 2018	226	139	3.137.990,86	1.930.003,22
39	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 800002	640/ 026/ 2017	8.803.648	8.594	8.812.242	24.143,13	4733/L/LS/ 2017	29.666.999,60	12 Juni 2017	12 Juni 2018	202	163	4.876.912,23	3.935.330,17
40	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 800002	640/ 026/ 2017	5.245.083	8.594	5.253.677	14.393,64	4733/L/LS/ 2017		12 Juni 2017	12 Juni 2018	202	163	2.907.514,62	2.346.162,78
41	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 800002	640/ 026/ 2017	4.529.040	8.594	4.537.634	12.431,88	4733/L/LS/ 2017		12 Juni 2017	12 Juni 2018	202	163	2.511.238,76	2.026.395,64
42	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 800002	640/ 026/ 2017	5.385.840	8.594	5.394.434	14.779,27	4733/L/LS/ 2017		12 Juni 2017	12 Juni 2018	202	163	2.985.413,01	2.409.021,39
43	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 800002	640/ 026/ 2017	5.660.420	8.591	5.669.011	15.531,54	4733/L/LS/ 2017		12 Juni 2017	12 Juni 2018	202	163	3.137.370,47	2.531.640,53
44	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 800003	640/ 027/ 2017	4.331.028	10.722	4.341.750	11.895,21	4734/L/LS/ 2017	17.367.000,00	2 Agustus 2017	2 Agustus 2018	151	214	1.796.176,03	2.545.573,97
45	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 800003	640/ 027/ 2017	4.331.028	10.722	4.341.750	11.895,21	4734/L/LS/ 2017		2 Agustus 2017	2 Agustus 2018	151	214	1.796.176,03	2.545.573,97



*Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe*

No	Jenis Asuransi	No. Polis	No. SSK	Nilai Premi			Nilai per Hari	SP2D		Jangka Waktu		Masa Manfaat			
				Nilai Per Unit	Materai + polis	Total		Nomor	Nilai	Mulai	Berakhir	Jlh Hari Dimanfaatkan	Jlh Hari Belum Dimanfaatkan	Nilai Dimanfaatkan	Nilai Belum Dimanfaatkan
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8			9	10	11	12	13 (8x11)	14 (8x12)
46	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 800003	640/ 027/ 2017	4.331.028	10.722	4.341.750	11.895,21	4734/L/LS/ 2017		2 Agustus 2017	2 Agustus 2018	151	214	1.796.176,03	2.545.573,97
47	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202170 800003	640/ 027/ 2017	4.331.028	10.722	4.341.750	11.895,21	4734/L/LS/ 2017		2 Agustus 2017	2 Agustus 2018	151	214	1.796.176,03	2.545.573,97
48	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202171 100002	640/ 034/ 2017	4.712.670	42.330	4.755.000	13.027,40	6010/L/LS/ 2017	4.755.000,00	24 Agustus 2017	24 Agustus 2018	129	236	1.680.534,25	3.074.465,75
49	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202171 200001	640/ 051/ 2017	5.465.600	6.114	5.471.714	14.991,00	7374/L/LS/ 2017	44.209.000,00	23 September 2017	23 September 2018	99	266	1.484.108,73	3.987.605,27
50	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202171 200001	640/ 015/ 2017	5.465.600	6.114	5.471.714	14.991,00	7374/L/LS/ 2017		23 September 2017	23 September 2018	99	266	1.484.108,73	3.987.605,27
51	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202171 200001	640/ 015/ 2017	6.647.000	6.114	6.653.114	18.227,71	7374/L/LS/ 2017		23 September 2017	23 September 2018	99	266	1.804.543,25	4.848.570,75
52	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202171 200001	640/ 015/ 2017	6.647.000	6.115	6.653.115	18.227,71	7374/L/LS/ 2017		23 September 2017	23 September 2018	99	266	1.804.543,52	4.848.571,48
53	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202171 200001	640/ 015/ 2017	6.647.000	6.115	6.653.115	18.227,71	7374/L/LS/ 2017		23 September 2017	23 September 2018	99	266	1.804.543,52	4.848.571,48
54	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202171 200001	640/ 015/ 2017	6.647.000	6.114	6.653.114	18.227,71	7374/L/LS/ 2017		23 September 2017	23 September 2018	99	266	1.804.543,25	4.848.570,75
55	PT. Asuransi Parolamas	P10108 0202171 200001	640/ 015/ 2017	6.647.000	6.114	6.653.114	18.227,71	7374/L/LS/ 2017		23 September 2017	23 September 2018	99	266	1.804.543,25	4.848.570,75
TOTAL						465.928.450,10			465.928.450,10					255.377.577,43	210.550.872,84

5.5.1.1.2.5 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.538.618.160,00. Untuk tahun 2016 sebesar 17.276.339.909,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 90. Rincian Persediaan per Jenis Persediaan

No	Uraian	2017	2016
1	Alat Tulis Kantor	117.749.065,00	52.090.750,00
2	Alat Kebersihan	7.835.800,00	1.201.350,00
3	Alat Listrik	13.793.976,00	10.317.700,00
4	Bahan Baku Bangunan	0,00	193.000,00
5	Obat-Obatan	2.762.069.143,00	2.163.931.240,00
6	Alat Kelengkapan Medis	0,00	45.864.284,00
7	Bahan Kimia	0,00	2.000.000,00
8	Plakat/cinderamata	0,00	0,00
9	Bahan Bakar	0,00	257.500,00
10	Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat	1.520.275.426,00	14.966.145.200,00



No	Uraian	2017	2016
11	Bibit	0,00	0,00
12	Cetak/Penggandaan	0,00	34.338.885,00
13	Cetak	116.894.750,00	0,00
14	Penggandaan	0,00	0,00
	Jumlah	4.538.618.160,00	17.276.339.909,00

Tabel 91. Rincian Persediaan Per SKPD

No	Uraian	2017	2016
1	Dinas Pendidikan	889.575,00	1.025.325,00
2	Dinas Kesehatan	2.803.785.019,00	2.187.440.115,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	933.987.050,00	14.333.700.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	334.200,00	165.825,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	1.558.000,00	192.000,00
6	Dinas Sosial	165.333.950,00	150.757.700,00
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	227.100,00	505.450,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	265.127.611,00	46.096.784,00
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	45.913.600,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	91.000,00	32.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	194.864.750,00	27.735.000,00
12	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	0,00	457.025,00
13	Dinas Perhubungan	13.780.180,00	41.680.185,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	282.960,00	0,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	24.588.600,00	103.400,00
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	635.750,00	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	273.000,00	322.000,00
18	Sekretariat Daerah	60.773.200,00	433.419.000,00
19	Sekretariat DPRK Lhokseumawe	441.300,00	2.843.550,00
20	Kecamatan Banda Sakti	0,00	0,00
21	Kecamatan Blang Mangat	0,00	187.400,00
22	Kecamatan Muara Satu	0,00	830.200,00
23	Kecamatan Muara Dua	0,00	0,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69.458.315,00	0,00
25	Inspektorat	330.800,00	141.500,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	439.700,00	221.000,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	372.500,00	664.700,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	911.300,00	872.000,00



No	Uraian	2017	2016
29	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	0,00	0,00
30	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	132.300,00	542.950,00
31	Sekretariat Baitul Mal	0,00	194.200,00
32	Sekretariat Majelis Adat Aceh	0,00	297.000,00
33	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	0,00	0,00
	Jumlah	4.538.618.160,00	17.276.339.909,00

Pada tahun 2017 terdapat persediaan yang telah usang berupa obat-obatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp208.066.508,00, persediaan tersebut telah dikeluarkan dari daftar persediaan dan telah dibebankan sebagai beban persediaan tahun 2017, rincian persediaan obat-obatan yang telah usang pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 92. Persediaan Obat-obatan Yang Telah Usang pada Dinas Kesehatan
Tahun 2017

No	NAMA OBAT	KUANTITAS	JUMLAH
	Obat cair	6103	31.611.208,00
1	Amoksisilin sirup kering 125 mg/ml - 60 ml	220 paket	422.400,00
2	Aqua proinjeksi steril, bebas pirogen - 20 ml	3.558 paket	20.992.200,00
3	Fitomenadion (vit k1) injeksi 10 mg/ml - 1 ml	430 paket	740.890,00
4	Eritromisin Sirup kering 200 ml/5ml	217 paket	1.755.530,00
5	Fenobarbital injeksi i.m/i.v 50 mg/ml	990 paket	2.239.500,00
6	Haloperidol Inj 50 mg/ml	232 paket	4.183.344,00
7	Kotrimoksazole suspensi	375 paket	861.750,00
8	Povidon iodida lar 10%-30 ml	63 paket	160.714,00
9	Zink drops	18 paket	254.880,00
	Obat Padat	269026	62.875.590,00
1	Amlodipine 10 mg	6.570 kaplet	1.386.750,00
2	Diazepam tab 2 mg	6.500 kaplet	2.827.000,00
3	Klorpromazin tab 100 mg	120.500 kaplet	17.878.400,00
4	obat antituberkulosis (OAT) kat. 1 dewasa	1 paket	359.990,00
5	Furosemid 40 mg	11600 paket	974.400,00
6	Obat anti malaria (Dehydro Artemisi 40 mg + pipeaqium 320 mg (DHP)	3 paket	96.300,00
7	Retional (vitamin A) kapsul 200.000 IU	50 kapsul	22.950,00
8	Resperidone tab 2 mg	6900 tablet	9.832.500,00
9	Aminofillin 200 mg	3500 tablet	301.000,00
10	Kotrimoksazole dewasa	9800 tablet\	1.489.600,00
11	Efedri HCI tab 25 mg	4700 tablet	892.200,00
13	Doksisiklin kapsul 100 mg	67600 kapsul	20.144.800,00
14	Gliseril guaiakolat tab 100 mg	21600 kapsul	2.959.200,00
15	Haloperidol tab 5 mg	300 kapsul	31.500,00



No	NAMA OBAT	KUANTITAS	JUMLAH
16	Kalsium laktat (kalk) tab 500 mg	5000 kapsul	375.000,00
17	Retinol (vitamin A) kapsul 100.000 IU	400 kapsul	104.000,00
18	Salbutamol tab 2 mg	200 kapsul	13.600,00
19	Nald 23	2 kaplet	946.000,00
20	Glimepiride tab 1 mg	1000 kapsul	272.000,00
21	Zink	2800 tablet	1.968.400,00
	Obat Get/Salep	65	214.767,00
1	Kloramfenikol salap kulit	65	214.767,00
	Obat Serbuk/Tepung	6500	1.774.800,00
2	Garam oralit untuk 200 ml	6500	1.774.800,00
	Obat lainnya	3156	111.590.143,00
1	Artemeter injeksi	4	97.536,00
2	Furosemide	2300	193.200,00
3	Reagensia Ziehl Nelsen	392	108.388.000,00
4	Abbocath no.20	89	1.335.000,00
5	Albendazol	60	27.060,00
6	Supra Tulle	6	106.200,00
7	Stesolid, Diazepam Larutan Rektal 5 mg/2,5 ml	3	38.247,00
8	Alat suntik sekali pakai 1 ml	290	348.000,00
9	Etil klorida spray	5	933.000,00
10	Kasa Parafin	7	123.900,00
	Jumlah		208.066.508,00

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi non permanen berupa penyaluran dana bergulir bagi usaha mikro dan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, yaitu terdiri dari penyertaan modal pada Bank Aceh, PDAM Le Beusare Rata dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL).

5.5.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Merupakan investasi dalam bentuk dana bergulir untuk usaha mikro yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang disalurkan kepada Koperasi. Dana PEM yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebesar Rp3.000.000.000,00 yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2007 kepada 43 koperasi. Dari 43 koperasi penerima dana PEM, sebanyak 41 koperasi telah menyatakan tidak dapat mengembalikan dana bergulir tersebut karena anggota koperasi



penerima telah membuat surat pernyataan bahwa tidak dapat mengembalikan dana bergulir.

Berikut daftar penerima dana bergulir sesuai Keputusan SK Walikota Nomor 518/226/2017 tanggal 30 Nopember 2007:

Tabel 93. Tabel Penerima Dana Bergulir Program PEM

No	Nama Koperasi	Badan Hukum		Alamat		Jumlah	Keterangan
		Nomor	Tanggal	Desa	kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kop. Niaga "Global Mandiri"	16/BH/PPK.1.17/V/2007	06/06/2007	Kota Lhokseumawe	Banda Sakti	50.000.000	17-05-2012/. 16/BH/PPK.1.17/V/2007/. "MACET"
2	Kopwan. "Maharani"	21/BH/PPK.1.14/VII/2006	10/07/2006	Kuta Blang	Banda Sakti	50.000.000	5-02-2015/. 21/BH/PPK.1.14/VII/2016/. "MACET"
3	Kopwan. "Mawar Merah"	29/BH/PPK.1.17/VII/2007	10/07/2007	Tumpok Teungoh	Banda Sakti	100.000.000	17-05-2012/. 29/BH/PPK.1.17/VII/2007/. "MACET"
4	Kop.Niaga "Pusaka Aceh"	12/BH/PPK.1.17.IV/2007	27/04/2007	Hagu selatan	Banda Sakti	50.000.000	18-06-2012/. 12/BH/PPK.1.17/IV/2007/. "MACET"
5	Kop. Niaga "Karunia Alam"	03/BH/PPK.1.14/II/2007	22/01/2007	Batuphat Timur	Muara satu	100.000.000	16-05-2012/. 03/BH/PPK.1.17/I/2007/. 22- 01-2007 "MACET"
6	Kop. Industri "Jeumpa Karya"	03/BH/KDK.1.3/II/2001	08/02/2001	Batuphat Barat	Muara satu	100.000.000	30-04-2012/. 03/BH/KDK.1.3/II/2001/. 08- 02-2001 "MACET"
7	Kopwan "Hidayah"	06/BH/PPK.1.17/III/2007	26/03/2007	Mns. Mesjid	Muara Dua	50.000.000	04-06-2012/. 06/BH/PPK.1.17.III/2007. "MACET"
8	Kopwan "Bunga Melati"	08/BH/PPK.1.17/III/2007	28/03/2007	Mns. Mesjid	Muara Dua	100.000.000	05-02-2012/. 08/BH/PPK.1.17/III/2007/. "MACET"
9	Kop. Nelayan "Pante Meuraksa"	58/BH/KDK.1.3/IV/1999	27/04/1999	Jambo Mesjid	Blang Mangat	100.000.000	16-05-2012/. 58/BH/KDK.1.3/IV/1999/. "MACET"
10	Kop. Perikanan "Sahmita Djaja"	05/BH/PPK.1.14/II/2007	26/02/2007	Gp. Tunong	Blang Mangat	100.000.000	14-05-2012/. 05/BH/PPK.1.14/II/2007/. "MACET"
11	Kop. Pertanian "Maju Bersama"	21/BH/PPK.1.17/VII/2007	03/07/2007	Rayeuk Kareung	Blang Mangat	100.000.000	15-05-2012/. 21/BH/PPK.1.17/VII/2007/. "MACET"
12	Kop. Pedagang kecil "Cinta Wisata"	18/BH/PPK.1.17/VI/2007	14/06/2007	Mon Geudong	Banda Sakti	50.000.000	15-05-2012/. 18/BH/PPK.1.17/VI/2007/. "MACET"
13	KSU. "Aneuk Bangsa"	20/BH/PPK.1.17/VII/2007	03/07/2007	Tumpok Teungoh	Banda Sakti	100.000.000	03-04-2012/. 20/BH/PPK.1.17/VII/2007/. 03- 07-2007/. "MACET"
14	Kop. Perikanan "Behtra Bahari"	26/BH/PPK.1.17/VII/2007	04/07/2007	Ujong Blang	Banda Sakti	50.000.000	16-05-2012/. 26/BH/PPK.1.17/VII/2007/. "MACET"
15	Kop. Industri "Syuhada"	24/BH/PPK.1.17/VII/2007	03/07/2007	Uteun Bayi	Banda Sakti	100.000.000	17-05-2012/. 24/BH/PPK.1.17/VII/2007/. "MACET"
16	Kop. Peternakan "Putra Bangsa"	11/BH.PPK.1.17/IV/2007	19/04/2007	Cunda	Muara Dua	100.000.000	16-05-2012/. 11/BH/PPK.1.17/VI/2007. "MACET"
17	Kop. Industri "Rakan Pase"	27/BH/PPK.1.17/VII/2007	05/07/2007	Tp. Teungoh	Banda Sakti	50.000.000	14-05-2012/. 27/BH/PPK.1.17/VII/2007/. "MACET"
18	Kop. Industri "Beurata"	27/BH/PPK.1.14/XI/2006	24/11/2006	Mesjid Cunda	Muara Dua	50.000.000	11-05-2012/. 2146/BH/XII/1990/. "MACET"
19	Kop. Mebel "Sang Seunesab"	14/BH/PPK.1.17/V/2007	23/05/2007	Uteun Bayi	Banda Sakti	50.000.000	01-06-2012/. 14/BH/PPK.1.17/V/2007/. "MACET"
20	Kop. Industri "Asoe Bumoe"	02/BH/PPK.1.14/I/2007	12/01/2007	Mns. Manyang kandang	Muara Dua	100.000.000	06-02-2015/. 02/BH/PPK.1.14/I/2007/. "MACET"



*Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe*

No	Nama Koperasi	Badan Hukum		Alamat		Jumlah	Keterangan
21	Kop. Industri "Gunung Alimon"	10/BH/PPK.1.17/IV/2007	12/04/2007	Blang Panyang	Muara Satu	50.000.000	10-05-2012/. 10/BH/PPK.1.17/IV/2007/. 12-04-2007/. "MACET"
22	Kop. Perikanan "Hareukat Aneuk Pante"	07/BH/PPK.1.14/X/2005	18/10/2005	Ujong Blang	Banda Sakti	50.000.000	15-05-2012/. 07/BH/PPK.1.14/X/2005/. 18-10-2005/. "MACET"
23	Kopwan "Rahmatullah"	26/BH/KDK.1.3/V/2000	15/05/2000	Batuphat Barat	Muara Satu	100.000.000	15-02-2015/. 26/BH/KDK.1.3/V/2015/. "MACET"
24	Kop. Bengkel "Sumber teknik service"	20/BH/PPK.1.14/VI/2006	30/06/2006	Uteunkot	Muara Dua	50.000.000	10-05-2012/. 18/BH/1.17/VI/2008/. "MACET"
25	Kop. Industri "Jasa Syuhada"	19/BH/PPK.1.17/VI/2007	22/06/2007	Uteunkot	Muara Dua	50.000.000	16-05-2012/. 19/BH/PPK.1.17/VI/2007/. "MACET"
26	Kop. Perikanan "Tong engkot"	07/BH/PPK.1.17/III/2007	27/03/2007	Pusong Baru	Banda Sakti	100.000.000	17-05-2012/. 07/BH/PPK.1.17/III/2007/. "MACET"
27	Kop. Perikanan "Seumadu Rancong"	25/BH/PPK.1.14/XI/2006	15/11/2006	Rancong	Muara Satu	100.000.000	15-06-2012/. 25/BH/PPK.1.14/XI/2006/. "MACET"
28	Koppas "Primajaya"	28/BH/PPK.1.17/VII/2007	06/07/2007	Kel. Kota Lhokseumawe	Banda Sakti	50.000.000	10-04-2012/. 28/BH/PPK.1.17/VII/2007/. "MACET"
29	Kop. Perikanan "Masda"	30/BH/PPK.1.17/VII/2007	13/07/2007	Hagu Teungoh	Banda Sakti	50.000.000	16-05-2012/. 30/BH/PPK.1.17/VII/2007/. 13-07-2007/. "MACET"
30	Kop. Transportasi "Lautan Niaga"	13/BH/PPK.1.17/IV/2007	30/04/2007	Ujong Blang	Banda Sakti	50.000.000	16-05-2012/. 13/BH/PPK.1.17/IV/2007/. "MACET"
31	Kop. Konsumsi "Sapue Kheun"	13/BH/PPK.1.14/III/2006	01/03/2006	Hagu Selatan	Banda Sakti	50.000.000	21-05-2002/. 13/BH/PPK.1.14/III/2006/. 01-06-2006/. "MACET"
32	Kop. Pedagang kecil "Karya Sepakat"	31/BH/PPK.1.17/VII/2007	06/08/2007	Tp. Teungoh	Banda Sakti	50.000.000	18-05-2012/. 31/BH/PPK.1.17/VII/2007/. "MACET"
33	Kop. Niaga "Rakyat Mandiri"	23/BH/PPK.1.17/VII/2007	03/07/2007	Pusong Baru	Banda Sakti	50.000.000	16-05-2012/. 23/BH/PPK.1.17/VII/2007/. "MACET"
34	Koppontren "Baitul Mal"	17/BH/PPK.1.17/V/2007	30/05/2007	Alue Awe	Muara Dua	50.000.000	12-04-2012/. 17/BH/PPK.1.17/V/2007/. "MACET"
35	KSU. "Multi Guna"	07/BH/DK.1/3/1/V/2003	17/05/2003	Jl. Merdeka No. 53 Mon Geudong	Banda Sakti	50.000.000	06.02.2015/. 07/BH/DK.1/3/1/V/2003/. "MACET"
36	Kopwan "Cut Nur Asikin"	09/BH/PPK.1.17/III/2007	28/03/2007	Pusong Baru	Banda Sakti	100.000.000	17-05-2012/. 09/BH/PPK.1.17/2007/. "MACET"
37	Koppas "Cakra Donya"	04/BH/PAD/Kwk.1/I/1998	26/01/1998	Jl. Merdeka Barat Cunda	Muara Dua	100.000.000	19-05-2012/. 04/BH/PAD/KWK.1/I/1998/. "MACET"
38	Kopinkra "Kriya Sakti"	57/BH/KDK.1.3/XI/2000	13/11/2000	SMK Negeri 4 Lhokseumawe	Banda Sakti	50.000.000	
39	Kop. "PrimKopabri - 17"	15/BH/PPK.1.17/V/2007	24/05/2007	Simpang IV	Banda Sakti	50.000.000	05-02-2015/. 15/BH/PPK.1.17/V/2007/. "MACET"
40	KPRI "Tiga Serangkai"	04/BH/PPK.1.14/X/2004	20/10/2004	DisperindagKop Lhokseumawe	Banda Sakti	100.000.000	
41	KPN "Setdako"	22/BH/PPK.1.17/VII/2007	03/07/2007	Setdako Lhokseumawe	Banda Sakti	50.000.000	27-12-2012/. 22/BH/PPK.1.17.VII/2007/. "MACET"
42	KPRI "Pengayoman"	02/BH/PAD/PPK.1.14/XII/2006	02/12/2006	Lembaga Pemasyarakatan	Banda Sakti	50.000.000	06-02-2015/. 02/BH/PAD/PPK.1.14/XII/2006 "MACET"
43	KPRI "Guru Al-Ikhlas"	25/BH/KDK.1.3/XI/1998	13/11/1998	SMK Negeri 3 Lhokseumawe	Banda Sakti	50.000.000	06-02-2015/. 25/BH/KDK.1.3/XI/1998/. "MACET"
JUMLAH						3.000.000.000	

Menurut laporan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dana bergulir yang masih lancar adalah sebesar Rp124.500.000,00 yang terdapat pada KPRI Tiga Serangkai dan Kopinkra Kriya Sakti, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94. Rincian Investasi Non Permanen

No	Uraian	2017	2016
1	Kopinkra Kriya Sakti	50.000.000,00	50.000.000,00
2	KPRI Tiga Serangkai	74.500.000,00	74.500.000,00
	Jumlah	124.500.000,00	124.500.000,00

5.5.1.2.2 Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lhokseumawe setelah per 31 Desember 2017 sebesar Rp32.013.105.063,00 dan tahun 2016 sebesar Rp31.335.881.397,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 95. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	Uraian	2017	2016
1	PT Bank Aceh	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00
2	PDAM Ie Beusaree Rata	6.250.467.802,00	7.669.627.566,00
3	PDPL	9.262.637.261,00	7.166.253.831,00
	Jumlah	32.013.105.063,00	31.335.881.397,00

1. Bank Aceh

Rincian penyertaan modal pada PT Bank Aceh adalah sebagai berikut:

- Saham seri A.No.0071619853 – 0071869582 Rp2.500.000.000,00
 - Saham seri A.No.0004954483– 0005004482 Rp5.000.000.000,00
 - Saham seri A.No.0019359583 – 0019459582 Rp1.000.000.000,00
 - Saham seri A.No.0049044583 – 0049544582 Rp5.000.000.000,00
 - Saham seri A.No.0088083138 – 0088383137 Rp3.000.000.000,00
- Jumlah Rp16.500.000.000,00

2. PDAM Ie Beusaree Rata

Nilai investasi pada PDAM Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe disajikan menggunakan metode ekuitas karena hak kepemilikan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar 100%.



Laporan Perubahan Ekuitas PDAM Ie Beusaree untuk periode 31 Desember 2017 disajikan sebesar Rp6.250.467.802,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 96. Perubahan Ekuitas PDAM Ie Beusaree Rata

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Penyertaan Modal 2011	375.000.000,00	
2	Penyertaan Modal 2012	5.000.000.000,00	
3	Penyertaan Modal 2013	1.500.000.000,00	Hibah (Rekomendasi BPK harus masuk ke penyertaan modal)
4	Penyertaan Modal 2014	4.000.000.000,00	
5	Penyertaan Modal 2015	4.000.000.000,00	
6	Hibah 2015 (Bantuan Provinsi Aceh)	359.622.579,00	Hibah berupa barang
7	Laba (Rugi) ditahan sampai dengan 2014	(2.314.511.160,00)	
8	Koreksi Laba (Rugi) Ditahan 2015	6.570.000,00	
9	Rugi tahun 2015	(3.541.076.582,00)	
10	Hibah 2016 (Bantuan Provinsi Aceh)	78.690.000,00	Hibah berupa barang
11	Koreksi Laba (Rugi) Ditahan 2016	1.044.866.036,00	
12	Rugi tahun berjalan	(2.839.533.307,00)	
13	Penyertaan Modal 2017	1.000.000.000,00	
14	Hibah	1.446.000.000,00	Hibah berupa uang
15	Koreksi Laba (Rugi) Ditahan 2017	(506.523.664,00)	
16	Rugi tahun berjalan	(3.358.636.100,00)	
Jumlah		6.250.467.802,00	

3. Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe

Nilai investasi pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) disajikan menggunakan metode ekuitas karena hak kepemilikan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar 100%.

Untuk tahun 2017, PDPL Kota Lhokseumawe dipercaya oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mengelola usaha rumah sakit (PT. RS Arun Lhokseumawe) dan usaha gas (Gas Kota Lhokseumawe).

Berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, secara keseluruhan perusahaan ini mendapat laba bersih sebesar Rp2.096.383.430,00 yang merupakan Laba Ditahan Tahun 2017 sebesar Rp1.766.754.449,00 dan Pajak Yang Ditangguhkan sebesar Rp329.628.981,00. Untuk masing-masing perusahaan yaitu Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe mendapat laba bersih sebesar Rp438.894.023,00, Perusahaan Gas Kota mengalami

kerugian sebesar Rp378.148.771,00 dan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe mendapat laba bersih sebesar Rp1.706.009.197,00.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember 2017 setelah penggabungan disajikan sebesar Rp9.262.637.261,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 97. Perubahan Ekuitas PDPL

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Penyertaan Modal 2013	5.000.000.000,00	
2	Rugi tahun s.d 2014	(1.814.864.147,00)	
3	Rugi tahun 2015	(219.680.151,00)	
4	Laba Tahun 2016	4.200.798.129,00	
5	Laba Tahun berjalan	2.096.383.430,00	
Jumlah		9.262.637.261,00	

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.443.566.365.751,74 dan tahun 2016 sebesar Rp1.361.939.179.519,33, terjadi peningkatan aset tetap sebesar Rp81.627.186.232,41 peningkatan nilai aset tetap dikarenakan penambahan aset dari belanja modal dan hibah. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 98. Aset Tetap Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	Uraian	2017	2016
1	Tanah	324.516.491.272,00	309.193.367.372,00
2	Peralatan Mesin	216.465.780.048,11	196.508.484.151,12
3	Gedung dan Bangunan	515.073.792.207,60	453.523.470.376,18
4	Jalan,Irigasi,dan Jaringan	846.958.620.515,00	790.286.903.071,00
5	Aktiva Tetap Lainnya	12.802.223.765,00	14.060.203.965,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	23.257.341.075,00	3.288.672.900,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(495.507.883.130,97)	(404.921.922.315,97)
	Jumlah	1.443.566.365.751,74	1.361.939.179.519,33

Tabel 99. Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan Belanja Modal 2017	Reklasifikasi/Mutasi	Saldo Akhir Tahun 2017
1	Tanah	309.193.367.372,00	7.657.161.155,00	7.665.962.745,00	324.516.491.272,00
2	Peralatan Mesin	196.508.484.151,12	23.545.313.357,00	(3.588.017.460,00)	216.465.780.048,11
3	Gedung dan Bangunan	453.523.470.376,18	44.348.598.500,00	17.201.723.331,42	515.073.792.207,60
4	Jalan,Irigasi,dan Jaringan	790.286.903.071,00	147.877.598.738,00	(91.205.881.294,00)	846.958.620.515,00
5	Aktiva Tetap Lainnya	14.060.203.965,00	138.254.500,00	(1.396.234.700,00)	12.802.223.765,00



No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan Belanja Modal 2017	Reklasifikasi/Mutasi	Saldo Akhir Tahun 2017
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.288.672.900,00	0,00	19.968.668.175,00	23.257.341.075,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(404.921.922.315,97)	0,00	(90.585.960.815,00)	(495.507.883.130,97)
	Jumlah	1.361.939.179.519,33	223.566.926.250,00	(141.939.740.017,58)	1.443.566.365.751,74

Mutasi aset tetap tahun 2017 berdasarkan kelompok jenis aset dapat dilihat pada tabel mutasi aset tetap per jenis kelompok aset. Penjelasan mutasi aset tetap tanah sebagai berikut. :

Tabel 100. Mutasi Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal	309.193.367.372,00
2	<u>Mutasi Tambah</u>	18.152.871.155,00
	- Belanja Modal 2017	7.657.161.155,00
	- Aset Tanah yang belum tercatat dari Kabupaten Aceh Utara (Dinas Perhubungan)	10.405.950.000,00
	- Dana Bos yang dicatat di kib A (Dinas PK)	910.000,00
	- Mutasi dari perhubungan ke setdako	88.600.000,00
	- Koreksi Validasi Utang 2016 (DKPP)	250.000,00
3	<u>Mutasi Kurang</u>	2.829.747.254,00
	- Reklas ke kib C (PK)	859.999.360,00
	- Reklas ke kib D (PK)	1.546.000,00
	- Kewajiban 2016 (Setdako)	56.000.000,00
	- Kewajiban 2016 (PU)	104.124.000,00
	- Kewajiban 2016 (PK)	629.210.520,00
	- Mutasi dari perhubungan ke setdako	88.600.000,00
	- Reklas ke kib C (Dinkes)	935.103.374,00
	- Kewajiban 2016 (Muara Satu)	12.694.000,00
	- Kewajiban 2016 (DKPP)	95.170.000,00
	- Reklas ke kib D (DKPP)	47.300.000,00
	Jumlah Tanah 2017	324.516.491.273,00



Penjelasan mutasi asset tetap peralatan dan mesin sebagai berikut.

Tabel 101. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal	196.508.484.151,12
2	Mutasi Tambah	24.862.372.899,00
	- Belanja Modal 2017	23.545.313.357,00
	- Reklas dari Belanja 522 (PK)	165.400.000,00
	- Reklas dari Belanja 522 (Disperindagkop)	704.922.750,00
	- Reklas dari Kib C ke Kib B (BPKD)	6.450.000,00
	- Koreksi Aset yang tidak tercatat (Kesbangpol)	265.654.000,00
	- Koreksi Nilai Validasi 2016 (PK)	173.656.020,00
	- Koreksi 2017 (PK)	976.772,00
3	Mutasi Kurang	4.905.077.002,01
	- Kewajiban 2016 (Sekwan)	322.371.675,00
	- Reklas Ke Aset Tak Berwujud (Setwan)	48.285.000,00
	- Kewajiban 2016 (Setdako)	157.915.200,00
	- Ekstra Kompatebel (Dinkes)	175.000,00
	- Kewajiban 2016 (MAA)	6.000.000,00
	- Kewajiban 2016 (MPD)	3.500.000,00
	- Mutasi Ke Aset Lainnya (MPD)	29.970.000,00
	- Kewajiban 2016 (Muara Dua)	35.158.000,00
	- Kewajiban 2016 (PU)	85.489.600,00
	- Kewajiban 2016 (Dishub)	24.270.000,00
	- Kewajiban 2016 (Dishub Ke KIB D)	62.760.000,00
	- Kewajiban 2016 (Dinkes)	305.313.953,00
	- Kewajiban 2016 (Dinkes)	5.053.823,00
	- Aset Ekstra Kompatebel (Dinkes)	51.102.654,00
	- Kewajiban 2016 (PK)	66.268.000,00
	- Reklas ke Kib E (PK)	519.141.000,00
	- Reklas ke persediaan (PK)	98.752.000,00
	- Aset Ekstra Kompatebel (PK)	924.237.627,01
	- Reklas Pindah KIB E (PK)	1.564.051.430,00
	- Kewajiban 2016 (Dinsos)	13.920.000,00
	- Kewajiban 2016 (Badan PP)	6.000.000,00
	- Kewajiban 2016 (BPBD)	19.100.000,00
	- Kewajiban 2016 (BPM)	56.520.000,00
	- Kewajiban 2016 (Capil)	8.146.000,00
	- Kewajiban 2016 (BPKD)	89.620.000,00
	- Mutasi Ke Aset Lainnya (BPKD)	182.000.000,00
	- Aset ekstra Kompatebel (Bappeda)	460.000,00



No	Uraian	Jumlah
	- Kewajiban 2016 (BLHK)	110.086.040,00
	- Reklas Ke KIB D (BLHK)	46.900.000,00
	- Kewajiban 2016 (Kesbangpol)	4.500.000,00
	- Kewajiban 2016 (BKPP)	9.950.000,00
	- Kewajiban 2016 (Disporapar)	19.800.000,00
	- Kewajiban 2016 (Kominfo)	28.260.000,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin 2017	216.465.780.048,11

Penjelasan mutasi aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut:

Tabel 102. Mutasi aset tetap gedung dan bangunan

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal	453.523.470.376,18
2	<u>Mutasi Tambah</u>	75.765.299.875,00
	- Belanja Modal 2016	44.348.598.500,00
	- Reklas dari kib A (Dinkes)	935.103.375,00
	- Hibah APBN (PK)	3.435.983.000,00
	- Reklas dari Belanja (Bansos dan Temuan BPK)	24.365.445.000,00
	- Reklas dari 522 (Disperindakop)	2.288.746.300,00
	- Reklas dari 522 (Disperindakop)	10.200.000,00
	- Koreksi kurang catat 2016 (Disperindakop)	381.223.700,00
3	<u>Mutasi Kurang</u>	14.214.978.043,58
	- Kewajiban 2016 (Setwan)	79.482.126,00
	- Kewajiban 2016 (Setdako)	60.838.500,00
	- Kewajiban 2016 (Muara Dua)	5.844.000,00
	- Kewajiban 2016 (PU)	30.765.457,00
	- Aset ekstra Kompatebel (PU)	69.054.374,58
	- Reklas ke KIB F (PU)	89.190.000,00
	- Kewajiban 2016 (Dishub)	102.936.000,00
	- Kewajiban 2016 (Dinkes)	817.133.007,00
	- Aset ekstra Kompatebel (Dinkes)	122.223.250,00
	- Reklas Ke Kib F (Dinkes)	1.314.164.600,00
	- Reklas Ke Kib F (Dinsos)	89.860.000,00
	- Kewajiban 2016 (PK)	526.137.000,00
	- Aset ekstra Kompetebel (PK)	208.694.911,00
	- Reklas ke KIB F (PK)	4.034.443.200,00
	- Kewajiban 2016 (BPM)	46.800.000,00
	- Kewajiban 2016 (DKPP)	19.920.000,00
	- Kewajiban 2016 (Disperindakop)	4.317.929.488,00
	- Reklas Ke Kib B (BPKD)	6.450.000,00
	- Kewajiban 2016 (Bappeda)	49.760.000,00



No	Uraian	Jumlah
	- Kewajiban 2016 (BLHK)	1.493.910,00
	- Reklas Ke JIJ (BLHK)	420.776.000,00
	- Aset ekstra Kompetebel (Kominfo)	37.835.820,00
	- Reklas ke KIB F (Kominfo)	1.411.797.800,00
	- Koreksi Kesalahan catat 2017 (Sedako)	149.777.000,00
	- Koreksi Validasi 2016 (Dinkes)	6.408.350,00
	- Koreksi Validasi 2016 (PK)	31.913.250,00
	- Koreksi Validasi 2016 (PU)	38.700.000,00
	- Koreksi Validasi 2016 (Disperindagkop)	124.650.000,00
	Jumlah Gedung Bangunan 2017	515.073.792.207,60

Penjelasan mutasi aset tetap jalan, irigas dan jaringan sebagai berikut.

Tabel 103. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal	790.286.903.071,00
2	<u>Mutasi Tambah</u>	148.544.359.738,00
	- Belanja Modal 2017	147.877.598.738,00
	- Reklas dari Kib C (BLHK)	420.776.000,00
	- Reklas dari Kib D (BLHK)	46.900.000,00
	- Reklas dari kib A (DKPP)	47.300.000,00
	- Hibah APBN (PK)	151.785.000,00
3	<u>Mutasi Kurang</u>	91.872.642.294,00
	- Kewajiban 2016 (PU)	84.938.596.985,00
	- Kewajiban 2016 (Dishub)	32.310.000,00
	- Kewajiban 2016 (Dinkes)	76.960.000,00
	- Kewajiban 2016 (PK)	128.467.400,00
	- Kewajiban 2016 (DKPP)	951.470.700,00
	- Kewajiban 2016 (DISPERINDAGKOP)	25.788.000,00
	- Reklas Ke KIB F 2016 (Dinsos)	44.850.000,00
	- Reklas ke KIB F (PU)	370.060.000,00
	- Reklas ke KIB F F (BPBD)	4.980.814.625,00
	- Koreksi Validasi 2016 (PU)	250.844.433,00
	- Koreksi Validasi 2016 (PK)	606.900,00
	- Koreksi Validasi 2016 (DKPP)	71.873.251,00
	Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan 2017	846.958.620.515,00



Penjelasan mutasi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 104. Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal	14.060.203.965,00
2	Mutasi Tambah	3.568.566.835,00
	- Belanja Modal 2017	138.254.500,00
	- Dana BOS (PK)	2.940.091.335,00
	- Reklas dari KIB B ke Kib E (PK)	490.221.000,00
3	Mutasi Kurang	4.826.547.035,00
	- Kewajiban 2016 (Setwan)	2.000.000,00
	- Kewajiban 2016 (PK)	20.840.000,00
	- Kewajiban 2016 (DLH)	12.522.500,00
	- Kewajiban 2016 di KIB C (DLH)	1.125.000,00
	- Kewajiban 2016 (Muara Satu)	2.267.000,00
	- Reklas ke Aset Lainnya (DKPP)	1.579.368.800,00
	- Aset Ekstrakomtabel (PK)	3.208.423.735,00
	Jumlah Aktiva Tetap Lainnya 2017	12.802.223.765,00

Penjelasan mutasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebagai berikut :

Tabel 105. Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal	3.288.672.900,00
2	Mutasi Tambah	20.062.701.175,00
	- Reklas dari KIB C Ke Kib F (Dinkes)	1.314.164.600,00
	- Reklas dari KIB C ke Kib F (Dinsos)	89.780.000,00
	- Reklas dari KIB C ke Kib F (PK)	4.034.443.200,00
	- Reklas dari KIB C ke Kib F (Kominfo)	1.411.797.800,00
	- Reklas dari KIB D ke KIB F (PU)	370.060.000,00
	- Reklas dari KIB C ke KIB F (PU)	89.190.000,00
	- Reklas ke KIB F F (BPBD)	4.980.814.625,00
	- Hibah APBN (Disperindagkop)	7.772.250.950,00
	- Koreksi Validasi 2016 (DKPP)	200.000,00
3	Mutasi Kurang	94.033.000,00
	- Aset extracomptable (Dinsos)	44.930.000,00
	- Aset extracomptable (PU)	39.240.000,00
	- Reklas Ke Aset Definitif Kib C (Disperindagkop)	9.800.000,00
	- Koreksi kurang Catat (Dinsos)	63.000,00
	Jumlah Kontruksi Dalam Pengerjaan 2017	23.257.341.075,00

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Pemerintah Aceh telah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Personel, Sarana dan Prasarana serta dokumen Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Pemerintah Aceh sesuai BAST Nomor 1050/BA/2016 dan 45/BA/2016 tanggal 26 Oktober 2016. Penandatanganan BAST tersebut untuk memenuhi amanat UU 23 Tahun 2014, yang mengharuskan serah terima urusan tersebut dilakukan paling lambat dua tahun sejak UU diundangkan atau 2 Oktober 2016.

Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe yang akan diserahkan kepada Provinsi Aceh adalah sebagai berikut :

Tabel 106. Daftar Aset yang akan dialihkan kepada Pemerintah Aceh

No	Uraian	Bidang Pendidikan (Rp)	Bidang Kehutanan dan pelayanan fasilitas lainnya (Rp)
1	Tanah	6.954.481.000,00	
2	Peralatan dan Mesin	10.337.684.000,00	58.390.000,00
3	Gedung dan Bangunan	35.819.926.000,00	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	265.578.000,00	-
5	Aset Tetap Lainnya	28.121.470.000,00	-
	Jumlah	81.499.139.000,00	58.390.000,00
	Total		81.557.529.000,00

Pada daftar BMD Pemerintah Kota Lhokseumawe terdapat aset yang dihibahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tetapi masih dicatat pada KIB masing-masing SKPD, atas aset tersebut sampai berakhir tahun 2017 belum dilakukan penghapusan aset karena belum dibentuknya tim penghapusan aset tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 107. Barang yang dihibahkan masih tercatat di BMD

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian	1.545.720.800	Hewan ternak
2	Dinas Sosial	861.415.000	Pagar Kuburan
3	Dinas Syari'at Islam	1.530.388.000	Pembangunan pagar, tempat wudhu, tangga, plafond dan lantai
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	246.500.000	Tenda, timbangan dan gerobak dorong
	Jumlah	4.184.023.800	



5.5.1.3.1 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan tahun 2017 sebesar Rp495.507.883.130,97. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 108. Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Penyusutan s.d 2016	Penyusutan 2017	Penyesuaian	Akumulasi Penyusutan s.d 2017
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan Mesin	129.113.031.388,97	22.588.160.314,42	(2.705.061.874,42)	148.996.129.828,97
3	Gedung dan Bangunan	49.311.219.927,00	9.293.001.245,00	(252.606,00)	58.603.968.566,00
4	Jalan,Irigasi,dan Jaringan	226.497.671.000,00	61.378.217.135,00	6.149.435,00	287.882.037.570,00
5	Aktiva Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aset yang direklasifikasi ke Aset lainnya	0,00	6.766.834,00	18.980.332,00	25.747.166,00
	Jumlah	404.921.922.315,97	93.266.145.528,42	(2.680.184.713,42)	495.507.883.130,97

Tabel 109. Rincian Akumulasi Aset Tetap Per SKPD

No	Uraian	Penyusutan s.d 2016	Penyusutan 2017	Penyesuaian	Akumulasi Penyusutan s.d 2017
1	Dinas Pendidikan	27.646.578.252,55	6.962.547.600,00	(162.484.427,55)	34.446.641.425,00
2	Dinas Kesehatan	22.146.260.200,00	3.699.597.784,00	19.875,00	25.845.877.859,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	232.657.894.626,00	61.137.574.022,00	247.553.723,00	294.043.022.371,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	855.364.075,00	230.936.374,00		1.086.300.449,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	1.306.931.729,00	254.474.423,00		1.561.406.152,00
6	Dinas Sosial	1.302.430.777,00	184.927.541,00	(287.288.415,00)	1.200.069.903,00
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	940.600.824,00	467.248.743,14	66.079.422,00	1.473.928.989,14
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.469.518.379,00	312.993.080,00		2.782.511.459,00
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	6.718.100.770,00	1.859.216.908,00	(39.972,00)	8.577.277.706,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	15.717.967.703,00	2.217.198.442,00	0,99	17.935.166.145,99
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.389.270.664,00	325.988.877,00		1.715.259.541,00
12	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	1.169.822.802,00	224.637.066,00		1.394.459.868,00
13	Dinas Perhubungan	5.950.342.086,00	1.084.243.997,00	(31.987.760,00)	7.002.598.323,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	211.782.813,00	-	211.782.813,00



No	Uraian	Penyusutan s.d 2016	Penyusutan 2017	Penyesuaian	Akumulasi Penyusutan s.d 2017
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.000.929.794,00	856.019.338,00	505.286,00	2.857.454.418,00
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	0,00	315.819.507,00	-	315.819.507,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	836.640.685,00	201.928.136,00		1.038.568.821,00
18	Sekretariat Daerah	27.523.699.893,00	3.073.095.579,00	(220.700.554,00)	30.376.094.918,00
19	Sekretariat DPRK Lhokseumawe	6.750.361.919,00	1.357.109.641,00	(173.000.001,00)	7.934.471.559,00
20	Kecamatan Banda Sakti	804.526.289,00	138.677.814,00	(110.045.833,00)	833.158.270,00
21	Kecamatan Blang Mangat	642.220.092,00	93.956.002,00		736.176.094,00
22	Kecamatan Muara Satu	826.571.015,00	111.243.383,00		937.814.398,00
23	Kecamatan Muara Dua	635.119.734,00	95.316.179,00		730.435.913,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.956.136.501,00	509.454.866,00		10.465.591.367,00
25	Inspektorat	1.474.813.745,00	147.997.161,00	(28.679.167,00)	1.594.131.739,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.715.349.411,00	459.631.108,00	(241.006.921,00)	1.933.973.598,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	13.256.600.192,42	3.866.594.371,28	(1.549.497.725,86)	15.573.696.837,84
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.009.793.722,00	219.372.286,00		1.229.166.008,00
29	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	14.397.684.613,00	2.272.149.665,00	(189.612.244,00)	16.480.222.034,00
30	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	863.130.379,00	73.371.196,00		936.501.575,00
31	Sekretariat Baitul Mal	768.990.138,00	71.739.435,00		840.729.573,00
32	Sekretariat Majelis Adat Aceh	413.357.033,00	122.435.585,00		535.792.618,00
33	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	774.914.273,00	106.866.606,00	-	881.780.879,00
	Jumlah	404.921.922.315,97	93.266.145.528,42	(2.680.184.713,42)	495.507.883.130,97

5.5.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp25.727.964.072,30. Untuk tahun 2016 sebesar Rp24.190.016.737,30, terjadi kenaikan aset lainnya sebesar Rp1.537.947.334,00, hal ini disebabkan oleh amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp241.938.465,00 serta aset renovasi sebesar Rp117.000.000,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 110. Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	2017	2016
1	Software Aplikasi PBB	958.311.491,00	958.311.491,00
2	Software Bappeda	197.835.000,00	197.835.000,00
3	Software Dinas PK	321.757.000,00	200.500.000,00



No	Uraian	2017	2016
4	Software BKPSDM	49.580.000,00	49.580.000,00
5	Software BPKD	209.750.000,00	209.750.000,00
6	Software Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIMPER) DPMPTSP	48.200.000,00	48.200.000,00
7	Software Sekwan	48.285.000,00	0,00
8	Rencana Penghapusan Aset	25.324.179.888,00	23.713.836.088,00
9	Aset Renovasi	117.000.000,00	117.000.000,00
10	Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	(1.546.934.306,70)	(1.304.995.841,70)
	Jumlah	25.727.964.072,30	24.190.016.737,30

5.5.2 Kewajiban

Pos kewajiban per 31 Desember 2017 merupakan saldo dari pos Kewajiban Jangka Pendek, dikarenakan Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp94.234.177.886,87 dan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp248.807.468.902,29, terjadi penurunan kewajiban akibat pembayaran kewajiban serta adanya hasil validasi nilai utang tahun 2016. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 111. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	2017	2016
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	75.000,00	0,00
2	Utang Bunga		0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.883.729.115,28	2.116.765.911,41
5	Utang Beban	92.338.129.071,59	246.678.458.290,88
6	Utang Retensi	12.244.700,00	12.244.700,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	94.234.177.886,87	248.807.468.902,29

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp75.000,00 merupakan utang pajak pusat yang belum disetor Kantor Camat Blang Mangat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.



5.5.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka tahun 2017 sebesar Rp1.883.729.115,28 dan tahun 2016 sebesar Rp2.116.765.911,41. Rincian pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 112. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	2017	2016
1	Retribusi (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja)	1.512.453.494,42	1.810.992.254,56
2	Retribusi (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)	371.275.620,86	305.773.656,85
	Jumlah	1.883.729.115,28	2.116.765.911,41

Pendapatan Diterima Dimuka Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame sebesar Rp346.325.620,86 dan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp24.950.000,00.

5.5.2.1.3 Utang Beban

Utang beban tahun 2017 sebesar Rp92.338.129.071,59 dan tahun 2016 sebesar Rp246.678.458.290,88, terjadi penurunan utang beban sebesar Rp154.340.329.219,29. Rincian utang beban dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 113. Rincian Utang Beban

No	Uraian	2017	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.317.697.196,00	21.157.981.584,00
2	Dinas Kesehatan	1.672.642.375,00	4.710.501.601,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	44.660.184.369,00	153.198.410.139,88
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42.500.000,00	145.453.501,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	461.754.838,00	1.142.562.622,00
6	Dinas Sosial	3.919.612.780,00	7.250.982.399,00
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	109.396.478,00	270.920.888
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33.858.785,00	94.842.335,00
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	5.036.416.838,00	8.804.536.420,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	4.066.667.354,00	3.054.446.636,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52.133.778,00	168.089.217,00
12	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	233.380.527,00	868.075.443,00
13	Dinas Perhubungan	382.608.857,00	1.819.275.867,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	52.410.500,00	0



*Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe*

No	Uraian	2017	2016
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	931.782.465,00	22.051.968.711,00
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	111.313.092,00	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.259.494,00	25.317.180,00
18	Sekretariat Daerah	1.442.093.736,00	3.561.705.320,00
19	Sekretariat DPRK	1.194.589.571,00	2.057.536.233,00
20	Kecamatan Banda Sakti	24.994.129,00	63.477.228,00
21	Kecamatan Blang Mangat	25.289.694,00	66.743.667,00
22	Kecamatan Muara Satu	46.340.020,00	124.647.335,00
23	Kecamatan Muara Dua	64.122.724,00	159.079.779,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	219.213.488,00	343.935.620,00
25	Inspektorat	81.945.698,00	95.182.608,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	145.754.687,00	803.029.774,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	12.846.908.058,00	11.132.967.240,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	10.437.447.476,59	257.927.200,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	48.762.038,00	233.337.838,00
30	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	555.678.526,00	1.236.392.270,00
31	Sekretariat MPU	22.882.000,00	105.594.475,00
32	Sekretariat Baitul Mal	12.350.000,00	1.514.708.070,00
33	Sekretariat MAA	19.250.000,00	30.808.890,00
34	Sekretariat MPD	51.887.500,00	128.020.200,00
	Jumlah	92.338.129.071,59	246.678.458.290,88

Tabel 114. Rincian Utang Beban Per SKPD Tahun 2017

No	Uraian	2016	Pembayaran Kewajiban Tahun 2016	Koreksi Validasi kewajiban	Mutasi	Kewajiban Tahun Berjalan	Kewajiban Tahun 2017
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.157.981.584,00	18.166.238.073,00	(142.564.852,00)	468.518.537,00	-	3.317.697.196,00
2	Dinas Kesehatan	4.710.501.601,00	2.877.932.210,00	(191.815.914,00)		31.888.898,00	1.672.642.375,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	153.198.410.139,88	104.770.351.804,57	(3.767.873.966,31)			44.660.184.369,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	145.453.501,00	98.453.501,00	(4.500.000,00)			42.500.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	1.142.562.622,00	520.323.372,00	(165.977.250,00)		5.492.838,00	461.754.838,00
6	Dinas Sosial	7.250.982.399,00	3.179.463.550,00	(157.266.279,00)		5.360.210,00	3.919.612.780,00
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	270.920.888,00	69.665.362,00	(97.980.526,00)		6.121.478,00	109.396.478,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	94.842.335,00	25.832.335,00	(35.711.200,00)		559.985,00	33.858.785,00
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	8.804.536.420,00	4.228.851.820,00	449.700.000,00		11.032.238,00	5.036.416.838,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.054.446.636,00	1.067.651.357,00	(1.164.183.799,00)		3.244.055.874,00	4.066.667.354,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	168.089.217,00	93.045.717,00	(27.430.000,00)		4.520.278,00	52.133.778,00



*Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Kota Lhokseumawe*

No	Uraian	2016	Pembayaran Kewajiban Tahun 2016	Koreksi Validasi kewajiban	Mutasi	Kewajiban Tahun Berjalan	Kewajiban Tahun 2017
12	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	868.075.443,00	317.125.443,00	(327.410.000,00)		9.840.527,00	233.380.527,00
13	Dinas Perhubungan	1.819.275.867,00	394.018.750,00	(231.040.080,00)	(813.949.537,00)	2.341.357,00	382.608.857,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	36.100.000,00		87.625.000,00	885.500,00	52.410.500,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	22.051.968.711,00	4.609.624.738,00	(16.518.822.373,00)		8.260.865,00	931.782.465,00
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-	147.055.000,00		257.806.000,00	562.092,00	111.313.092,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.317.180,00	14.167.180,00			3.109.494,00	14.259.494,00
18	Sekretariat Daerah	3.561.705.320,00	1.538.306.274,00	(581.305.310,00)			1.442.093.736,00
19	Sekretariat DPRK	2.057.536.233,00	746.919.507,00	(136.694.826,00)		20.667.671,00	1.194.589.571,00
20	Kecamatan Banda Sakti	63.477.228,00	24.858.128,00	(16.769.100,00)		3.144.129,00	24.994.129,00
21	Kecamatan Blang Mangat	66.743.667,00	20.874.307,00	(24.569.360,00)		3.989.694,00	25.289.694,00
22	Kecamatan Muara Satu	124.647.335,00	50.196.285,00	(29.039.650,00)		928.620,00	46.340.020,00
23	Kecamatan Muara Dua	159.079.779,00	80.394.279,00	(15.741.000,00)		1.178.224,00	64.122.724,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	343.935.620,00	113.803.155,00	(12.543.897,00)		1.624.920,00	219.213.488,00
25	Inspektorat	95.182.608,00	17.807.608,00			4.570.698,00	81.945.698,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	803.029.774,00	195.158.424,00	(473.381.350,00)		11.264.687,00	145.754.687,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.132.967.240,00	531.301.142,00	(309.484.418,00)		2.554.726.378,00	12.846.908.058,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	257.927.200,00	16.348.217.979,41	26.527.738.256,00			10.437.447.476,59
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	233.337.838,00	29.990.000,00	(162.072.838,00)		7.487.038,00	48.762.038,00
30	Dinas Syariah Islam dan Pengembangan Dayah	1.236.392.270,00	414.223.098,00	(269.218.926,00)		2.728.280,00	555.678.526,00
31	Sekretariat MPU	105.594.475,00	31.681.175,00	(51.563.300,00)		532.000,00	22.882.000,00
32	Sekretariat Baitul Mal	1.514.708.070,00	1.509.402.770,00	7.044.700,00			12.350.000,00
33	Sekretariat MAA	30.808.890,00	11.558.890,00				19.250.000,00
34	Sekretariat MPD	128.020.200,00	35.277.700,00	(41.242.500,00)		387.500,00	51.887.500,00
	Jumlah	246.678.458.290,88	162.315.870.933,98	2.028.280.241,69	-	5.947.261.473,00	92.338.129.071,59

Karena adanya perubahan SOTK Tahun 2017 kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terbagi kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Untuk asuransi kesehatan dan JKK/JKM pada tahun lalu ditempatkan pada Utang Jangka Pendek lainnya, sedangkan untuk tahun 2017 dicatat dalam Utang Belanja. Rincian utang belanja asuransi kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 115. Utang Asuransi Kesehatan dan JKK/JKM

No	Uraian	2017	2016
1	Askes	8.731.281.819,00	6.479.042.303,00
2	JKK/JKN	284.950.681,00	150.568.735,00
	Jumlah	9.016.232.500,00	6.629.611.038,00

Berdasarkan surat dari BPJS Kesehatan Kota Lhokseumawe Nomor : 161/I-08/0318 tanggal 1 Maret 2018, menjelaskan bahwa nilai utang Asuransi Kesehatan telah dilakukan koreksi nilai utang sehingga berbeda nilai pengakuan pada tahun 2016 serta koreksi salah catat sebesar Rp644.883,00.

5.5.2.1.4 Utang Retensi

Utang retensi tahun 2017 sebesar Rp12.244.700,00 yang merupakan utang retensi tahun 2015 yang belum dilunasi pada Sekretariat Baitul Mal.

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.478.652.209.844,88, dan tahun 2016 adalah sebesar Rp1.229.914.306.661,30, terjadi peningkatan ekuitas sebesar Rp248.805.246.634,58, peningkatan ekuitas tertinggi didapat dari penambahan aset tetap baik dari belanja modal maupun kewajiban.

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2017 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

5.6.1 Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp255.147.327.416,32 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 107. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi pada Pemerintah Kota
Lhokseumawe Tahun 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2017	2016
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	27.839.764.484,00	24.519.447.668,83
4	Penerimaan Retribusi Daerah	4.050.483.522,00	3.816.764.587,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.093.717.479,31	4.253.406.003,14
6	Penerimaan Zakat dan Infaq Sadaqah	0,00	8.790.038.934,00
7	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	26.002.294.618,54	14.968.974.280,05
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	45.470.527.507,00	40.599.787.794,00
9	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.795.459.091,00	2.365.387.805,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum	459.628.037.000,00	467.846.597.000,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	135.319.88.183,00	177.543.384.827,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	73.736.159.755,00
13	Penerimaan Dana Penyesuaian	62.910.060.040,00	48.793.965.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.121.731.293,47	25.208.475.969,49
15	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	87.941.476.679,00	16.446.000.000,00
16	Penerimaan Hibah	20.547.760.000,00	
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 15)	901.721.200.897,32	908.888.389.623,51
17	Arus Keluar Kas		
18	Pembayaran Pegawai	290.092.323.645,00	396.283.041.380,00
19	Pembayaran Barang	155.017.573.857,00	93.024.186.048,21
20	Pembayaran Hibah	59.525.325.773,00	51.927.177.175,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	31.480.613.809,00	22.959.401.700,00
22	Pembayaran Tak Terduga	206.399.000,00	353.829.000,00
23	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	109.323.295.018,00	89.805.703.175,00
24	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	788.849.008,00	0,00
25	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	139.493.371,00	0,00
26	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s.d 25)	646.573.873.481,00	654.353.338.478,21
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-26)	255.147.327.416,32	254.535.051.145,30

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp255.147.327.416,32 merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp901.721.200.897,32 yang merupakan jumlah pendapatan daerah tahun 2017 dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp646.573.873.481,00 yang merupakan Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp536.576.267.540,00 ditambah Belanja Tak Terduga Sebesar Rp206.399.000,00 ditambah Belanja Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp467.911.923,00 dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp109.323.295.018,00.



5.6.2 Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2017 defisit sebesar Rp224.594.518.755,00. Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 108. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
pada Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 dan 2016
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2017	2016
28	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
29	Arus Masuk Kas		
30	Penjualan Aset	0,00	0,00
31	Jumlah Arus Masuk Kas (28)	0,00	0,00
32	Arus Keluar Kas		
33	Perolehan Tanah	7.657.161.155,00	18.631.135.900,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin	23.572.905.862,00	11.837.194.229,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan	44.348.598.500,00	35.556.555.820,00
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Bangunan	147.877.598.738,00	169.457.918.839,00
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya	138.254.500,00	502.205.700,00
38	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00
40	Jumlah Arus Keluar Kas (31 s.d 37)	224.594.518.755,00	235.985.010.488,00
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (29-38)	(224.594.518.755,00)	(235.985.010.488,00)

Arus kas masuk sebesar Rp0,00 dikarenakan tidak ada Penjualan Aset Daerah. Arus kas keluar sebesar Rp224.594.518.755,00 merupakan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran.

5.6.3 Aktivitas Transitoris

Saldo Arus kas bersih aktivitas non anggaran per 31 Desember 2017 defisit sebesar Rp262.728.491,00. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya



potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas non anggaran dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut :

Tabel 109. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris pada Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2017	2016
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
51	Arus Masuk Kas		
52	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	66.596.866.586,00	62.595.562.467,00
53	UYHD	4.800.716.737,00	5.100.150.630,00
54	Jumlah Arus Masuk Kas (50 s.d 51)	71.397.583.323,00	67.695.713.097,00
55	Arus Keluar Kas		
56	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	66.596.791.586,00	62.595.562.467,00
57	UYHD	5.063.520.228,00	4.734.123.286,00
58	Jumlah Arus Keluar Kas (54 s.d 55)	71.660.311.814,00	67.329.685.753,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (52-56)	(262.728.491,00)	366.027.344,00

Tabel 110. Rincian Saldo Akhir Arus Kas (dalam rupiah)

NO	URAIAN	2017	2016
81	Kenaikan/Penurunan Kas	30.290.080.170,32	18.916.068.001,30
82	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	20.047.579.835,23	1.130.411.833,93
83	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	50.337.660.005,55	20.046.479.835,23
84	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.100.000,00
85	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	0,00	54.853.003,00
86	Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN	5.008.667.225,00	4.745.863.734,00
87	Saldo Akhir Kas	55.346.327.230,55	24.848.296.572,23

Dari penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris, kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp20.047.579.835,23 menjadi saldo akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp50.337.660.005,55.

Saldo akhir kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran jika dijumlahkan Kas di Bendahara JKN sebesar Rp5.008.667.225,00 sebesar Rp55.346.327.230,55.



Tabel 111. Penjelasan selisih saldo akhir Kas dengan SiLPA

URAIAN	Jumlah (2017)	Jumlah (2016)
Saldo Akhir Kas	55.346.327.230,55	24.848.296.572,23
SiLPA	55.333.411.782,55	24.780.603.121,23
Selisih	12.915.448,00	67.693.451,00
Penjelasan Selisih :		
Kas di Bendahara Penerimaan	1.100.000,00	1.100.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	75.000,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	54.853.003,00
Kas di Bendahara JKN	11.740.448,00	11.740.448,00



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON – KEUANGAN

Pembentukan Kota Lhokseumawe didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109). Pembentukan otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan yang penuh untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta daerah otonom mengandung makna adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun visi dan misi, arah pembangunan serta kewenangan dan tugas Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana tertera dalam RPJM Kota Lhokseumawe tahun 2012 – 2017 dengan visi pembangunan **“Kota Lhokseumawe Yang Bermartabat, Sejahtera Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Sebagai Wujud Mou Helsinki”**.

A. Visi dan Misi

Adapun penjelasan visi dan misi adalah sebagai berikut:

- 1) **Bermartabat** dapat diwujudkan dengan berpedoman melalui peraturan-peraturan hasil turunan UUPA dan peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta penegakan supremasi hukum dan HAM, mengangkat kembali budaya aceh, khususnya Kota Lhokseumawe yang islami dan Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat.
- 2) **Sejahtera** adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe melalui pembangunan ekonomi berazaskan pada Beradat (bersih, aman, tertib) adalah kehidupan dan dinamika Kota Lhokseumawe pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi .



- 3) **Berkeadilan** adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.
- 4) **Mandiri** adalah Kota Lhokseumawe mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektifitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe .
- 5) **Berdasarkan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki** adalah mewujudkan pelaksanaan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang efektif dan efisien sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut guna tercapainya masyarakat Kota Lhokseumawe yang mandiri, makmur dan sejahtera

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kota Lhokseumawe mengembangkan beberapa misi yaitu :

- 1) **Menjalankan tata kelola Pemerintah Kota Lhokseumawe yang amanah dengan mengimplementasikan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).** Ini bermaksud mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan amanah melalui implementasi peraturan-peraturan turunan UUPA. Selanjutnya, peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, membangun transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Menjadikan UUPA dan turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Kota Lhokseumawe secara menyeluruh serta mewujudkan perdamaian abadi ;
- 2) **Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat,** Ini bermaksud membangun masyarakat Kota Lhokseumawe yang beriman, berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali budaya Aceh yang bernafaskan Islami dalam upaya pengembalian harkat dan martabat masyarakat Aceh. Mengimplementasikan budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan pemerintah dan kehidupan bermasyarakat secara efektif dan tepat;
- 3) **Memperkuat struktur sosial ekonomi, peningkatan nilai tambah produksi masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan SDA,** ini bermaksud mengembangkan kerangka ekonomi kerakyatan melalui peningkatan potensi



sektor unggulan daerah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat secara optimal; peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, memperluas kesempatan kerja melalui pembangunan infrastruktur ekonomi sektor riil dan pemihakan kepada UKM dan koperasi. Pembangunan ekonomi yang difokuskan kepada sektor pertanian yang berbasis potensi lokal masing-masing Kecamatan sehingga terwujudnya masyarakat Kota Lhokseumawe yang mampu memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna secara optimal;

- 4) **Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan**, Ini bermaksud mewujudkan pemerataan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal;
- 5) **Melaksanakan pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan**, ini bermaksud mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan kemanfaatan melalui perencanaan yang tepat, fokus dan tuntas. Terwujudnya penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan dan pengendalian bencana, perbaikan sistem dan jaringan sarana dan prasarana transportasi .

B. Arah dan kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk jangka menengah merupakan acuan bagi SKPD guna mencapai kinerja dan tugas fungsinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang yang terdiri dari 3 jenis program yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang kewenangannya, antara lain :

- 1) Program SKPD adalah merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- 2) Program lintas SKPD adalah merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan.
- 3) Program kewilayahan adalah merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan berkelanjutan pembangunan/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah Kota Lhokseumawe.



Adapun arah kebijakan dan program pembangunan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan sebagai Berikut :

- a. Menjalankan tata kelola Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang amanah dengan mengimplementasikan UUPA;**
- b. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat;**
- c. Memperkuat struktur sosial ekonomi, peningkatan nilai tambah produksi masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan SDA;**
- d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan;**
- e. Melaksanakan pembangunan Insfrastruktur Kota Lhokseumawe yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan;**

C. Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 – 2017 maka perlu diterjemahkan kedalam rencana yang actionable melalui program-program pembangunan, adapun perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yaitu perencanaan Strategis dan perencanaan operasional.

1. Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Untuk mendukung visi dan misi tersebut maka dapat dirumuskan kedalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut:
 - Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintah
 - Pendidikan
 - Kesehatan
 - Agama, Sosial dan budaya
 - Ekonomi
 - Insfrastruktur
 - Lingkungan Hidup
2. Perencanaan operasional yaitu Perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan, perencanaan operasional ini berasal dari Belanja Tidak langsung, Belanja rutin yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD serta belanja PPKD.



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2017 secara keseluruhan.

WALIKOTA LHOKEUMAWA

SUAIDI YAHYA